



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023 yang merupakan perjalanan tahun terakhir dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023, sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja.

Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas kinerja dan publikasi informasi tentang realisasi anggaran serta capaian target indikator kinerja, maka pada akhir pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun 2023 disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Penyusunan dokumen ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan. Capaian kinerja ini telah dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi, serta merencanakan strategi pemecahan masalah yang diperlukan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perencanaan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini menjadi ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang dijalankan serta dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.

Majalengka, 25 Maret 2024



Rj. Bupati Majalengka

H. Dedi Supandi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 520, Majalengka, Jawa Barat, 45413,
Telepon (0233) 281157, Laman inspektorat.majalengkakab.go.id
Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, sebagian besar tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Majalengka, 18 Maret 2024

Inspektur Kabupaten Majalengka



HENDRA KRISNAWAN, S.STP., CGCAE
NIP. 19780226 199703 1 002



KATA PENGANTAR



PERNYATAAN TELAH DI REVIU



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



PENDAHULUAN**Gambaran Umum Pemda****Data Kepegawaian****Isu Strategis****Sistematika Pelaporan**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Kabupaten Majalengka memiliki kedudukan yang sama dengan Daerah lainnya yaitu sebagai Daerah Otonom yang diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka mencakup seluruh urusan pemerintahan konkuren, kecuali urusan bidang Politik Luar Negeri, Pertanahan, Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta Kewenangan Bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Urusan konkuren tersebut terdiri atas:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.
2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

54 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

INSPEKTORAT

BADAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DINAS SOSIAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DINAS KETENAGAKERJAA N KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KECAMATAN

KEC. ARGAPURA

KEC. BANJARAN

KEC. BANTARUJEG

KEC. CIGASONG

KEC. CIKIJING

KEC. CINGAMBUL

KEC. DAUWAN

KEC. JATITUJUH

KEC. JATIWANGI

KEC. KADIPATEN

KEC. KASOKANDEL

KEC. KERTAJATI

KEC. LEMAHSUGIH

KEC. LEUWIMUNDING

KEC. LIGUNG

KEC. MAJA

KEC. MAJALENGKA

KEC. MALAUSMA

KEC. PALASAH

KEC. PANYINGKIRAN

KEC. RAJAGALUH

KEC. SINDANG

KEC. SINDANGWANGI

KEC. SUKAHAJI

KEC. SUMBERJAYA

KEC. TALAGA

B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2023 berjumlah 12.042 dengan rincian sebagai berikut:



C. Isu Strategis

Berikut isu strategis Kabupaten Majalengka yang tertuang pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program penguatan pendidikan karakter (PPK) kedepannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat memengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM

yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial Lainnya

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2018 penduduk miskin Majalengka sebesar 10,79 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 10,08 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,35 menjadi 11,43 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Jumlah penduduk miskin diperkirakan akan meningkat karena berdasarkan data BPS Jawa Barat, indikator kemiskinan dan pengangguran telah menunjukkan peningkatan sampai dengan Kuartal II-2020.

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah Terasering Panyaweuyan dan Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya seperti wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, kawasan wisata di Sindangwangi (KAWIT WANGI), wisata air Cikadongdong River Tubing (CRT) desa payung Kecamatan Rajagaluh dll. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan beberapa apresiasi di tingkat Nasional diantaranya Cikadongdong River Tubing sebagai Juara 1 wisata air terpopuler, Curug cipeuteuy sebagai juara ke 3 kategori surga yang tersembunyi, Paralayang Gunung Panten dengan kategori petualangan terpopuler dan ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif dengan sub sektor unggulan seni pertunjukan, kuliner dan kriya. Beberapa apresiasi tersebut memberikan dampak yang menimbulkan multiplier efek terhadap pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Majalengka.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,3 miliar rupiah, yang berasal dari pajak hiburan sebesar Rp. 300.000.000, hotel sebesar Rp 750.000.000 serta retribusi pariwisata sebesar Rp 250.000.000. Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam beberapa tahun mendatang, akan berdampak lebih signifikan beriringan dengan beroperasionalnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Jalan Tol Cisumdawu, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Kemandirian Desa

Kemandirian desa di tengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati. Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon). Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif.

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.

Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi Area Airport seluas 1.800 hektar ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektar dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan

terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektar yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Terkait masalah lingkungan, Kepala Departemen Perencanaan Produk dan Kemitraan PT. BIJB memprediksikan bahwa sampah yang dihasilkan di tiga tahun pertama BIJB beroperasi yakni 1,5 ton per hari. Sementara untuk dampak dari pencemaran limbah dan sampah BIJB, diakui telah disiapkan oleh pihak BIJB sesuai aturan bahwa tidak boleh ada sampah ataupun limbah yang dibuang atau dibawa keluar dari kawasan bandara. Perlu dipersiapkan langkah antisipatif, terutama ketika kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati sudah mulai beroperasi.

6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angkaangka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Selain itu Puskesmas di Majalengka juga belum ada yang statusnya PPK/BLUD (Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, 2017).

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

7. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana

pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah.

PERENCANAAN KINERJA**RPJMD****PERKIN 2023****Rencana Anggaran 2023**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada RPJMD Perubahan hanya terdapat 309 program sedangkan sebelum RPJMD Perubahan terdapat 481 program.

VISI

Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka
yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera

MISI

- 01 Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama
- 02 Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
- 03 Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya
- 04 Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani
- 05 Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Selanjutnya, ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor, dengan sasaran yang terdiri atas menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
3. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang terdiri atas terwujudnya akuntabilitas kinerja, terwujudnya akuntabilitas keuangan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN;
5. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran yang terdiri atas meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya investasi sektor industri, meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa;
6. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan sasaran meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2022 yaitu 17 IKU. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	Persen	5
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	Indeks	0,33

	di berbagai wilayah dan sektor	dan Antar Sektor			
		Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	10,37
		Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Persen	3,5
3	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	10
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	BB
		Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	Opini	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B
		Meningkatnya Profesionalisme , Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61
5	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	Indeks	59,44
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,54
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	70,12
		Meningkatnya Kesejahteraan	Laju Peningkatan PDRB Sektor	Persen	1

		Petani	Pertanian		
		Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Kunjungan	1.000.000
		Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5
		Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	Desa	18
6	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	Desa	25

Sebagaimana IKU di atas, maka perjanjian kinerja Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	5%
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	0,33
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,37%
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,50%
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10%
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
7	Terwujudnya	Opini BPK RI	WTP



	Akuntabilitas Keuangan		
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61
10	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	59,44
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,54
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,12%
13	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	1%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.000.000
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	18
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	25

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	551.983.095.723,00	18,03
PENDAPATAN TRANSFER		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.115.286.982.260,00	69,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah	392.895.409.574,00	12,84
Lain-lain Pendapatan yang Sah	600.191.000,00	0,02
JUMLAH PENDAPATAN	3.060.765.678.557,00	100



BELANJA		
Belanja Operasi	2.257.632.685.630,00	72,29
Belanja Modal	393.623.243.098,00	12,55
Belanja Tak Terduga	5.172.112.000,00	0,17
Belanja Transfer	470.377.932.789,00	15
JUMLAH BELANJA	3.136.799.410.802,00	100
SURPLUS/(DEFISIT)	(76.033.732.245,00)	
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	106.033.732.245,00	
Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO	76.033.732.245,00	

AKUNTABILITAS KINERJA

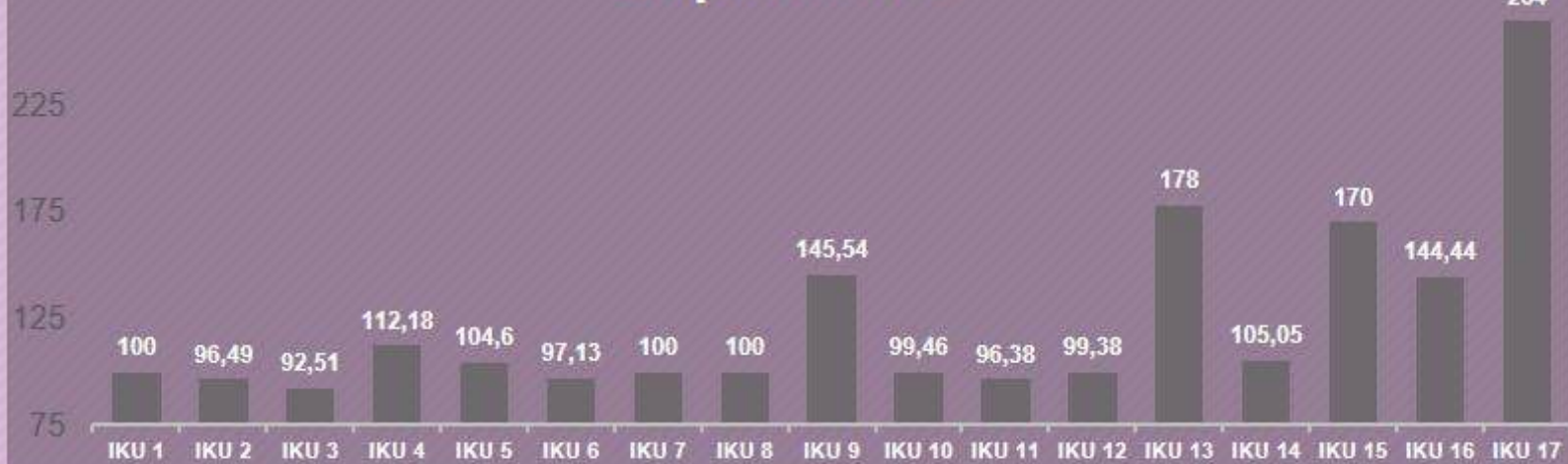
Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RPJMD. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 123,83%. Sebanyak 11 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 6 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	5	5	100%
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	0,330	0,342	96,49%
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,37	11,21	92,51%
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,50	3,12	112,18%
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10,46	104,6%
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB	B	97,13%
7	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP*	100%*
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%
9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61	88,78	145,54%
10	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	59,44	59,12	99,46%
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,54	74,73	96,38%



12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,12%	69,69%	99,38%
13	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	1	1,78	178%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.000.000	1.050.524	105,05%
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5	8,50	170%
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	18	26	144,44%
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	25	66	264%
Rata-rata					123,83

Keterangan:

* = data menggunakan pengukuran Tahun 2022

MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA



IKU : PERSENTASE PENINGKATAN RATA-RATA JAMAAH BERAKTIVITAS DI RUMAH IBADAH

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR
Yang Memengaruhi

- Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan dan Masyarakat

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM
Yang mendukung

EFISIENSI
Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 8,30% atau sebesar Rp1.155.792.727,00.

TREN PERSENTASE PENINGKATAN RATA-RATA JAMAAH BERAKTIVITAS DI RUMAH IBADAH



SASARAN 1:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Sasaran ini diukur oleh persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini yaitu Sekretariat Daerah.



Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah

Rata-rata jamaah yang beraktivitas di Rumah Ibadah mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **tercapainya target pada Tahun 2023** yaitu

peningkatan sebesar 5%. Jumlah jamaah tersebar di 3.039 rumah ibadah yang aktif. Capaian Tahun 2023 sama dengan **capaian Tahun 2022** yaitu sebesar 100% atau tidak mengalami penurunan capaian maupun realisasi. Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD sudah sesuai



dengan target kenaikan pertahun yaitu sebesar 5%. Target Peningkatan Jumlah Jamaah Yang Beraktivitas di Rumah Ibadah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka **pada akhir RPJMD** atau pada Tahun 2023 adalah sebesar 5%.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)
5%	5%	5%	5%

Indikator persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah tidak bisa **dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat** maupun Nasional. Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

Target kinerja ini berhasil dicapai melalui intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Rp13.932.334.784,00

Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah diantaranya meningkatkan jumlah rumah ibadah yang aktif dari 2.702 menjadi 3.039 Rumah Ibadah, peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan, pemberian bantuan sarana prasarana untuk Rumah Ibadah, bantuan partisipasi tokoh agama dan bantuan kapasitas kelembagaan keagamaan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain mengaktifkan 337 rumah ibadah yang tersebar di Kabupaten Majalengka, memberikan bantuan



kepada 42 lembaga keagamaan berupa hibah dalam bentuk uang,

memfasilitasi 229 rumah ibadah dengan sarana prasarana ibadah yang memadai, memfasilitasi 1.127 tokoh agama yang terdiri dari imam masjid, pengurus masjid, guru mengaji dan tokoh agama lainnya.

Di tahun mendatang, sasaran strategis dan indikator ini akan diganti menjadi Indeks Kesalehan Umat Beragama. Terdapat lima dimensi yang digunakan untuk mengukur indikator ini, yaitu kepedulian sosial, relasi antar umat manusia, etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan dan patuh pada peraturan pemerintah. Sedangkan faktor utama yang memengaruhi indikator indeks kesalehan umat beragama terdiri dari empat faktor, yaitu: habituasi, kesalehan ritual, pengetahuan, dan kinerja pemerintah khususnya bagian kesejahteraan rakyat.

Adapun upaya yang harus dilanjutkan di tahun mendatang yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten; memberikan himbauan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik berupa majlis ta'lim, pengajian rutin dan TPA atau TPQ bagi anak-anak; pemerataan pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah; serta mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk memiliki kompetensi sehingga dapat mengembangkan diri dan dapat mandiri.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 8,30% atau sebesar Rp1.155.792.727,00 dari pagu anggaran Rp13.932.334.784,00 dengan realisasi Rp12.776.542.057,00.

MENURUNNYA KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN ANTAR SEKTOR



IKU : INDEKS GINI

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022

0,367



+0,025

Capaian 2022

91,83%



+4,67%

CAPAIAN 2023
96,49%

TARGET

REALISASI

0,330

0,342

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Target RPJMD

0,330

Realisasi 2023 terhadap
target RPJMD

96,49%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Prov. Jabar

0,425

Realisasi 2023 terhadap
Prov. Jabar

-0,083

FAKTOR

Yang Memengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap

- ☐ Akses Pelayanan Kesehatan
- ☐ Akses Pendidikan
- ☐ Akses Sanitasi dan air bersih
- ☐ Mendapatkan pekerjaan yang layak
- ☐ Mendapatkan barang-barang pokok terjangkau
- ☐ Mendapatkan infrastruktur yang baik

- ☐ Program Rehabilitasi Sosial
- ☐ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ☐ Program Pemberdayaan Sosial
- ☐ Program Penempatan Tenaga Kerja
- ☐ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usah Kecil dan Usaha Mikro
- ☐ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ☐ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- ☐ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ☐ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ☐ Program Penyediaan dan Pengembangan Pertanian
- ☐ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya mencapai 96,49%.

TREN INDEKS GINI



SASARAN 2:

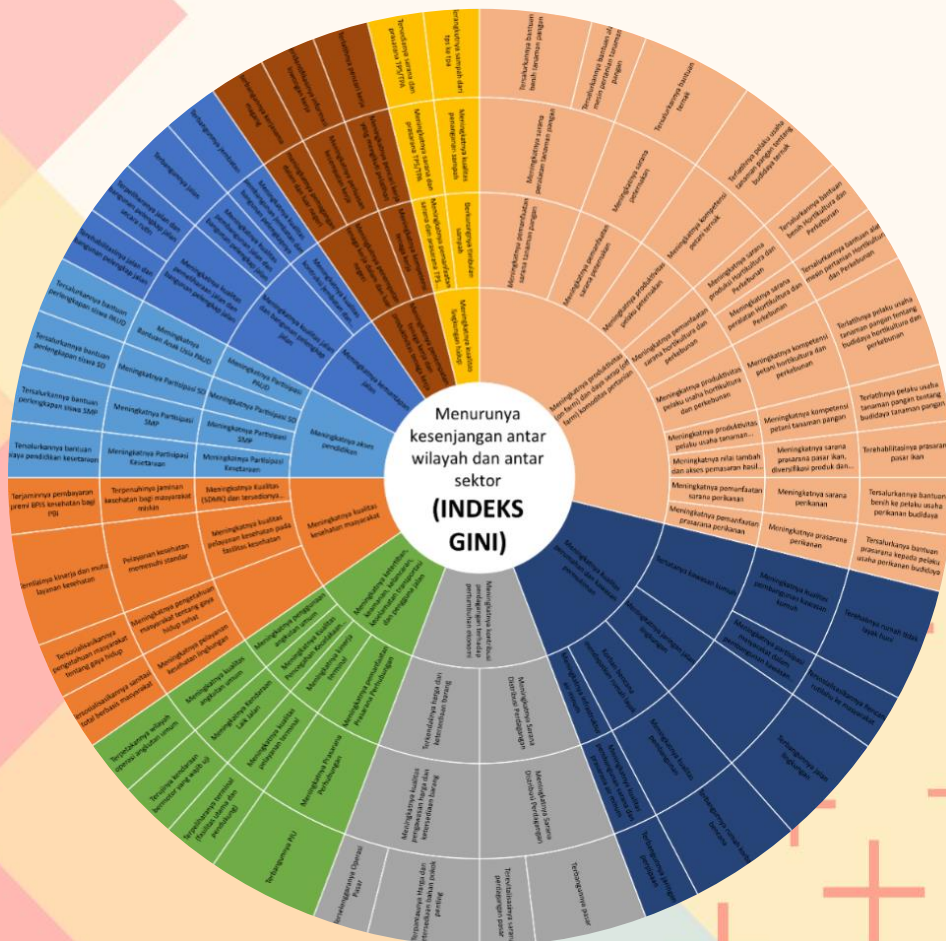
MENURUNNYA KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN ANTAR SEKTOR

Untuk mengukur kesenjangan antar wilayah dan antar sektor digunakan Indikator Indeks Gini yang merupakan sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai Indeks Gini berada diantara 0 dan 1, semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan.

Adapun kategori ketimpangan adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah, nilainya antara 0 – 0,3
- Ketimpangan sedang, nilainya antara 0,3 – 0,5
- Ketimpangan tinggi, nilainya lebih besar dari 0,5

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Indeks Gini

Realisasi indeks gini di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 **lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di Provinsi Jawa Barat dan realisasi Nasional**. Indeks Gini Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,083 poin dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai



0,425 poin dan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional yang mencapai 0,388 poin, Indeks Gini Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,046 poin.

Meskipun **kinerja Tahun 2023** masih belum maksimal karena hanya mencapai 96,49% dengan realisasi 0,342 dari target 0,330 poin. Namun **Jika dibandingkan dengan Tahun 2022** yang kinerjanya mencapai 91,83% dengan realisasi 0,367 poin, kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,025 poin dan peningkatan capaian sebesar 4,67%.

Pemerintah Kabupaten Majalengka merencanakan kondisi akhir Indeks Gini Kabupaten Majalengka dapat mencapai 0,330 poin. Melihat realisasi Indeks Gini pada Tahun 2023 yang mencapai 0,342 poin maka jika **dibandingkan dengan target RPJMD** telah mencapai 96,49%.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor adalah **KESEMPATAN YANG SAMA**. Belum meratanya kesempatan yang sama di berbagai aspek menjadi faktor penentu penurunan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Berikut beberapa aspek yang menjadi akar masalah kesenjangan, diantaranya:

1. Kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan

Penduduk 20 persen teratas dapat menikmati pelayanan Kesehatan cukup mudah terutama bagi penduduk yang berada di perkotaan karena sudah tersedia RSUD Cideres, RSUD Majalengka dan berbagai klinik lainnya untuk menjangkau masyarakat yang sakit ataupun membutuhkan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dari mulai mengandung sampai dengan melahirkan. Sedangkan bagi penduduk 40 persen terbawah terutama di perdesaan **tidak semuanya dapat menjangkau pelayanan kesehatan**. Disinilah pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Majalengka hadir bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan

Kesehatan. Pada Tahun 2023 Kabupaten Majalengka telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

- Memberikan bantuan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sebanyak 865.500 peserta jaminan kesehatan dengan rincian sebanyak 684.304 PBI APBN dan sebanyak 181.196 PBI APBD.
- Melaksanakan **Program “Puskesmas Nganjang Ka Imah”** sebanyak 179.541 kunjungan oleh 32 puskesmas di Kabupaten Majalengka sepanjang Tahun 2023 sebagai bentuk pelayanan promotif dan preventif namun cara ini **masih perlu dikembangkan dengan kegiatan lainnya.**
- Memberikan bantuan layanan ambulans jenazah gratis melalui **Program Si Jago Raharja** sebanyak 1 unit ambulans.

Dari 32 Puskesmas yang berada di Kabupaten Majalengka 26 Puskesmas mendapatkan status akreditasi Paripurna dan 6 Puskesmas lainnya berstatus akreditasi Utama, hal ini sebagai salah satu bentuk pemberian kualitas pelayanan yang sama kepada seluruh Masyarakat baik di perdesaan atau perkotaan.

Untuk RSUD Cideres dan RSUD Majalengka mendapatkan akreditasi paripurna. Selain itu, pada Tahun 2023 sudah diresmikan RSUD Talaga untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dua bagi masyarakat wilayah Majalengka Selatan, namun secara

operasional masih belum 100% karena SDM yang tersedia masih belum optimal terutama dokter spesialis.

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah:

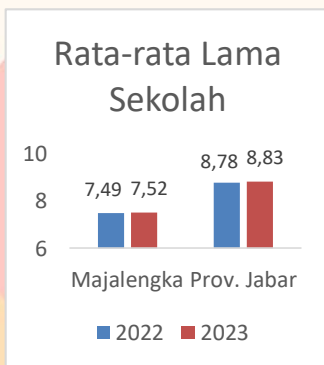
- a. Memastikan seluruh penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah tercover oleh BPJS dengan cara meningkatkan jumlah PBI, memastikan seluruh Perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya dan memudahkan proses pengajuan rekomendasi bantuan, bisa dilakukan secara *online* atau bisa diselesaikan minimal di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan.



- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif seperti melaksanakan senam di setiap kecamatan dan membuka kembali acara *Car Free Day* sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berolahraga dalam *event* tersebut.
- Mendistribusikan tenaga medis di tingkat puskesmas agar lebih merata dan mendistribusikan atau merekrut dokter spesialis untuk RSUD Talaga agar bisa optimal beroperasi.

2. Kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nilai APK SD di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 mengalami penurunan di angka 103,03% namun masih berada di atas 100% dan APM SD mengalami peningkatan di angka 98,71% begitu juga untuk APK SMP Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 98,90% dan untuk APM mengalami peningkatan menjadi 81,25%. Hal ini menunjukkan perbaikan partisipasi masyarakat untuk bersekolah pada jenjang SD dan SMP.



Untuk Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka meningkat 0,03 tahun pada tahun 2022 dari 7,49 menjadi 7,52 pada Tahun 2023 (setara kelas VIII), namun jika kita bandingkan dengan rata-rata RLS Provinsi Jawa Barat dengan nilai 8,83 **masih berada di bawah 1,31 poin** sehingga masih perlu intervensi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka

untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Majalengka, karena dengan kesempatan bersekolah yang sama akan menjadi modal untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang sama juga.

Berdasarkan data BPS sebagian besar penduduk bekerja di Kabupaten Majalengka pada Bulan Agustus Tahun 2022 **lulusan SD ke bawah yaitu sebesar 327.538 jiwa atau 53,06 persen.**

Sebesar 103.588 jiwa atau 16,78 persen berpendidikan lulusan SMP/ sederajat, lulusan SMA sebesar 84.208 jiwa atau 13,64 persen, lulusan SMK sebesar 52,844 jiwa atau 8,56 persen dan 49.142 jiwa atau 7,96 persen lulusan universitas.



Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah memberikan bantuan, diantaranya sebagai berikut:

- Bantuan perlengkapan siswa PAUD sebanyak 1.550 siswa.
- Bantuan perlengkapan siswa SD sebanyak 211 unit.
- Bantuan perlengkapan siswa SMP sebanyak 100 siswa dan bantuan perlengkapan sekolah kesetaraan sebesar 20 paket. Hal tersebut dimaksudkan agar partisipasi PAUD, SD dan SMP terus mengalami peningkatan.

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk memastikan anak usia sekolah di Kabupaten Majalengka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses Pendidikan yang layak adalah

- a. Meningkatkan jumlah bantuan bagi siswa yang keluarganya berada di bawah garis kemiskinan seperti buku, alat tulis, seragam, Sepatu, tas dan lainnya, menyediakan transportasi bagi siswa dengan jarak tempuh ke sekolah yang jauh, uang saku, biaya kursus/les tambahan agar bisa meminimalisir kendala yang dihadapi baik itu secara ekonomi, lingkungan maupun secara internal.
- b. Meningkatkan penyaluran bantuan biaya Pendidikan kesetaraan bagi mayoritas Masyarakat yang lulusannya masih SD kebawah serta memberikan kesempatan bagi Masyarakat yang terkendala sosial, ekonomi, waktu dan geografi pada usia sekolah untuk meningkatkan kemampuannya.

3. Kesempatan yang sama terhadap akses sanitasi dan air bersih



Pada Tahun 2023 BPS mengeluarkan data terkait persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Majalengka sebesar 82,67%, realisasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan 1,41% dibandingkan dengan Tahun 2022 di angka 81,26%. Sedangkan untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengalami **penurunan realisasi dari Tahun 2022 sebesar 2,32% menjadi 93,38%.**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan infrastruktur air minum dengan cara membangun jaringan



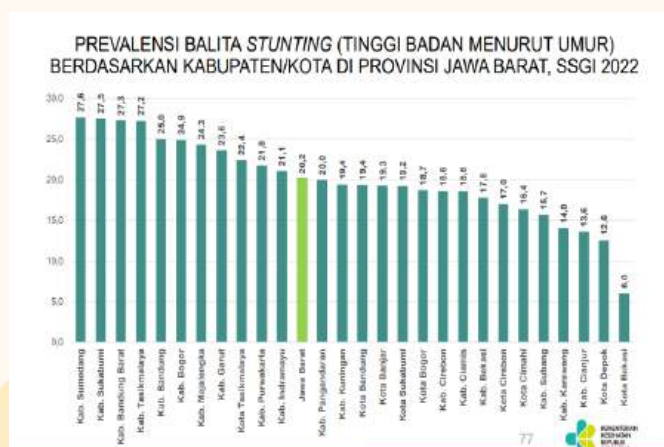
perpipaan sepanjang 2.589 SR (sambungan rumah). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan pengolahan air limbah dengan cara membangun MCK 3 unit dan membangun drainase lingkungan di 3 titik.

Namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan suhu signifikan yang disebut dengan fenomena El Nino selama berbulan-bulan tepatnya pada Tanggal 7 Oktober 2023 wilayah Majalengka (Kertajati) menjadi



wilayah dengan suhu maksimum tertinggi di Indonesia dengan suhu 38,3 Derajat. Fenomena ini perlu diantisipasi untuk kedepannya karena dengan musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan Masyarakat Majalengka mengalami **kekeringan dan kesulitan air bersih**.

Berdasarkan data SSGI pada Tahun 2022 Prevalensi Balita **Stunting di Majalengka masih tinggi dengan nilai 24,3%** dimana yang menjadi salah satu indikator penurunan stunting adalah akses sanitasi yang layak.



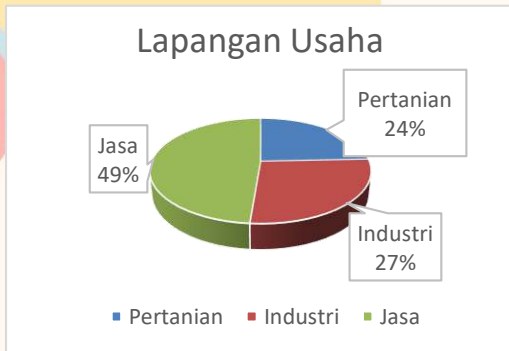
Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sanitasi dan air bersih adalah:

- Membentuk tim penyalur air bersih ketika kemarau berkepanjangan
- Meningkatkan pembentukan desa ODF

4. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

Untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor diperlukan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, setelah

kita melakukan intervensi terhadap kebutuhan dasar penduduk 40 persen berpenghasilan terbawah seperti akses Kesehatan dan akses Pendidikan, selanjutnya adalah menjadikan penduduk 40 persen berpenghasilan terbawah graduasi ke penduduk 40 persen berpenghasilan menengah. Salah satu caranya adalah memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan yang layak.



Berdasarkan data BPS Pada Tahun 2022 Penduduk Kabupaten Majalengka berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu terbagi menurut 3 lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Industri pengolahan dan Jasa. Sebagian besar penduduk Majalengka

bermata pencaharian pada sektor Jasa yaitu sebesar 300.620 jiwa atau 49 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 166.571 jiwa atau 27 persen dan sektor pertanian 150.129 jiwa atau sebesar 24 persen.

Untuk memberikan kesempatan yang sama mendapatkan pekerjaan Pemerintah harus hadir sebagai jembatan antara dunia kerja dengan Masyarakat terutama kepada penduduk 40 persen terbawah. Pada Tahun



2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menempatkan pencari kerja sebanyak 10.799 dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 14.218 orang melalui event job fair yang bekerjasama dengan Perusahaan di Kabupaten Majalengka. Namun untuk meningkatkan kompetensi dari para pencari kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka **belum memiliki Lembaga Pelatihan Kerja.**



Di sektor informal pun Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan cara memberikan bantuan sarana dan prasarana sebanyak 66 paket, namun Pemerintah Kabupaten

Majalengka **belum memiliki program khusus pembiayaan atau bantuan**

finansial kepada UMKM seperti program kredit mesra yang diluncurkan oleh Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dengan cara membuat 4 kali pameran untuk meningkatkan promosi perdagangan dalam negeri, namun pada Tahun 2023 **belum melaksanakan revitalisasi Pasar.**



Untuk pekerjaan di sektor pertanian Pemerintah telah berupaya meningkatkan produktivitas dan daya serap komoditas pertanian dengan cara memberikan pelatihan pertanian yang diikuti oleh 30 orang peserta di setiap kecamatan yang terdiri dari

penyuluh pertanian kecamatan dan kelompok tani untuk meningkatkan kompetensi petani, telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian hortikultura dan perkebunan ke 9 kelompok, telah menyalurkan bantuan berupa benih jagung hibrida sebanyak 750 kg kepada 10 kelompok tani masing-masing 75 kg untuk,



telah menyalurkan bantuan ternak ayam untuk RTM dengan jumlah bibit ternak sebanyak 360 ekor (80 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 3 dan 280 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 2), tiap RTM mendapatkan 9 ekor (2 ekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina) berlokasi di 40 RTM yang

memelihara ternak ayam kampung (20 RTM di Desa Sukadana dan 20 RTM lainnya di Desa Buninagara).

Untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani perlu adanya **bantuan dari Pemerintah terhadap biaya produksi** terutama harga pupuk yang murah dan tersedia.

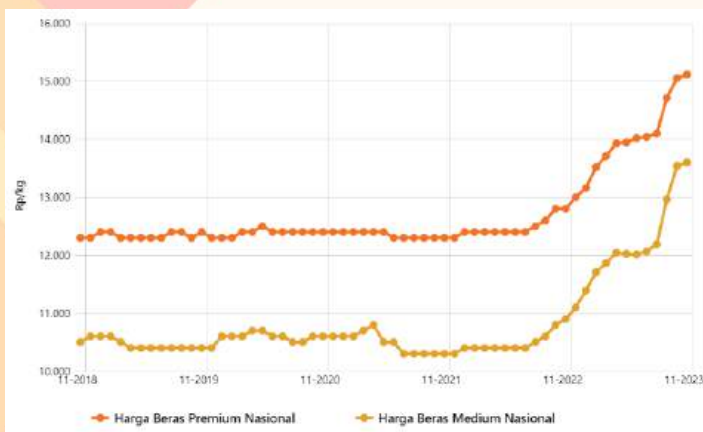
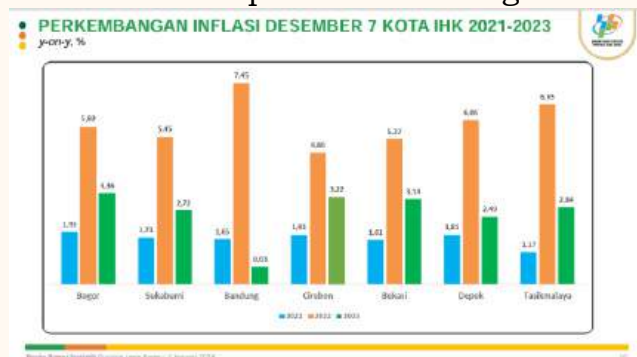
Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak adalah

- Membentuk Lembaga Pelatihan Kerja Digital atau bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja
- Memudahkan akses terhadap kredit/pembiayaan dengan bunga rendah
- Meningkatkan bantuan produksi sektor pertanian terutama pupuk murah dan tersedia
- Merevitalisasi Pasar

5. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang-barang pokok yang terjangkau

Harga yang stabil membantu penduduk 40 persen terbawah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apabila harga tidak stabil pengeluaran akan berubah kepada hal-hal pokok dan tidak dapat membantu graduasi menjadi penduduk 40 persen menengah.

Berdasarkan data BPS inflasi di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 cukup terkendali dengan Inflasi *Year on Year* di angka 3,22% (data IHK Cirebon). Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah makanan, minuman dan tembakau.



Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada November 2023 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional mencapai 15.117 per kilogram (kg). Harga tersebut meningkat 18,1%

dibandingkan dengan setahun lalu sekaligus menjadi rekor termahal baru dalam lima tahun terakhir, begitupula untuk harga beras kualitas medium dengan rata-rata harganya secara nasional mencapai 13.600 per kg yang meningkat 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya (katadata, 2023).

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya memastikan barang-barang pokok terjangkau melalui pelaksanaan program Operasi Pasar Murah sebanyak 2 kali.



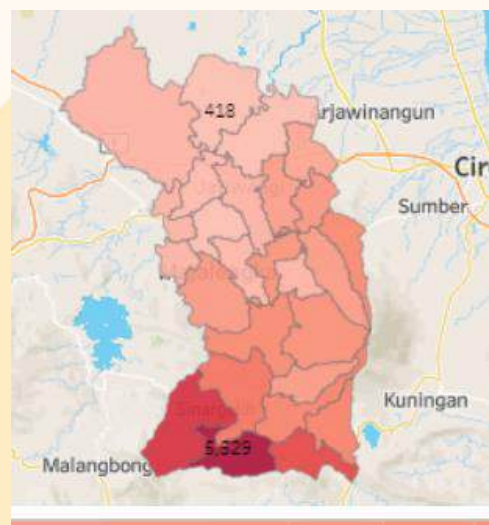
Pemerintah perlu hadir untuk **memastikan gabah dan beras tersedia** pada saat harga beras meningkat atau terjadi kelangkaan yang diakibatkan perubahan iklim. Penurunan biaya produksi dan kepastian produksi pertanian terutama beras dibeli oleh Pemerintah untuk menjadikan wilayah yang memiliki ketahanan pangan.

Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan barang-barang pokok yang terjangkau adalah

- Mencadangkan stok pangan yang cukup
- Memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern, pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan
- Meningkatkan pengawasan terhadap pasar beras dan gabah untuk mencegah praktik spekulasi harga yang tidak sehat
- Mengadakan program Operasi Pasar Murah

6. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan infrastruktur yang baik

Infrastruktur memiliki peranan penting untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, dengan adanya kesempatan yang sama untuk menikmati infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Majalengka.



Salah satu peranan penting infrastruktur yaitu untuk meningkatkan konektivitas

antar wilayah sehingga akses ke pasar dan sumber daya baik dari perdesaan ke perkotaan atau sebaliknya menjadi lebih luas. Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah meningkatkan jalan mantap sepanjang 791,023 km dengan jalan yang telah dipelihara sepanjang 255,635 km serta terdapat 17 jembatan yang dipelihara. Namun **masih terdapat aduan dari Masyarakat terkait jalan rusak** melalui media sosial.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah peningkatan ketertiban, keamanan, keselamatan transportasi dan pengguna jalannya serta memastikan ketersediaan kendaraan umum sebagai moda transportasi dari perdesaan ke perkotaan atau sebaliknya.



Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya menyediakan angkutan umum sebanyak 1.026 unit, telah menguji 212 kendaraan bermotor yang wajib uji, telah memelihara terminal sebanyak 5 terminal sehingga penumpang nyaman. Untuk menunjang peningkatan konektivitas masih terdapat Pembangunan PJU dan perlengkapan

jalan yang belum maksimal seperti lampu merah yang belum beroperasi dengan baik. Untuk **informasi/pemetaan angkutan umum belum tersedia secara online** sehingga penumpang kesulitan mencari informasi tentang transportasi umum di Kabupaten Majalengka terlebih Bandara Kertajati dan Tol Cisumdawu juga sudah beroperasi.

Selain infrastruktur jalan, dibutuhkan juga infrastruktur persampahan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Kondisi lingkungan yang tidak baik karena polusi lingkungan dapat membuat penduduk menjadi mudah terserang penyakit sehingga tidak dapat bekerja untuk mencari pendapatan.

Pada dasarnya sistem pengelolaan persampahan mulai dari pengangkutan dan penyediaan tempat sampah baru berjalan di daerah perkotaan, perlu adanya perluasan kebijakan untuk **membuat sistem pengelolaan persampahan yang baik juga di perdesaan**. Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah membangun TPS3R di 9 lokasi yaitu Desa Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji, Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi, Desa Banjaran Kecamatan Banjaran, Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, Desa Karang Anyar Kecamatan Dawuan, Desa Kramatjati Kecamatan Malausma, Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung, Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh, dan Desa Sindangkerta Kecamatan Maja.



Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan infrastruktur yang baik adalah

- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.
- Membuat layanan pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* guna memberikan tanggapan berupa aksi nyata perbaikan jalan berdasarkan aduan dari Masyarakat.
- Memetakan wilayah angkutan umum secara online sehingga mudah di akses oleh seluruh Masyarakat (terkait rute dan moda transportasi yang tersedia)
- Memperbanyak pembangunan TPS3R, pengadaan sarana persampahan, membuat desain pengangkutan sampah di perkotaan dan perdesaan serta menggagas pengelolaan sampah terpadu.

Program-program Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mendukung penurunan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR	Rp171.021.815.170,00
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagin	Rp640.992.500,00
3.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup	Rp7.877.940.000,00
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan (Pengelolaan Perlengkapan Siswa)	Rp558.710.000,00
5.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp2.137.198.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	Rp22.153.531.555,00
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Rp106.954.151.840,00 DAU/DAK/BANKEU/D BHCHT/PAJAK ROKOK

8.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp34.600.375.759,00 (DBH dan DBHCHT)
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp.22.269.220.400,00
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp5.102.425.212,00
11.	Program Penyuluh Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp.1.295.480.000,00

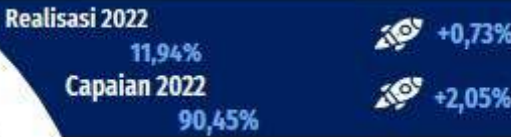
Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp338.164.769.976,00. **Efisiensi** atas capaian kinerja dengan indikator indeks gini pada sasaran menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor tidak ada karena IKU hanya mencapai 96,49%.

PENGURANGAN KEMISKINAN



IKU : ANGKA KEMISKINAN

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Beban Pengeluaran Masyarakat
- ☐ Pengurangan kantong kemiskinan
- ☐ Peningkatan pendapatan Masyarakat
- ☐ Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan

- ☐ Program Rehabilitasi Sosial
- ☐ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ☐ Program Pemberdayaan Sosial
- ☐ Program Penempatan Tenaga Kerja
- ☐ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- ☐ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ☐ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- ☐ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ☐ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ☐ Program Penyediaan dan Pengembangan Pertanian
- ☐ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

PROGRAM

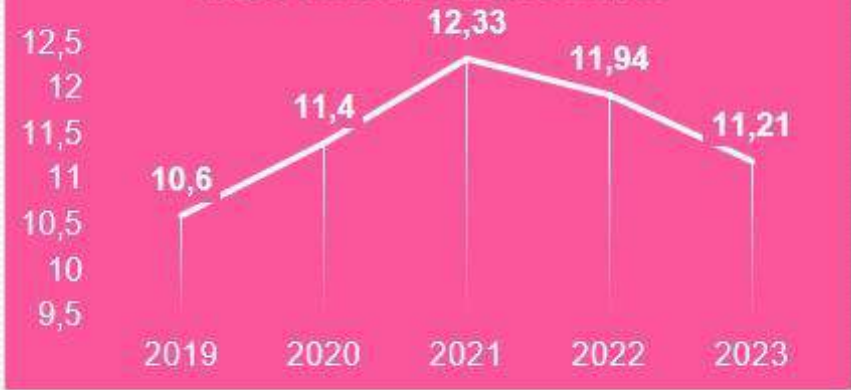
Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya 92,51%.

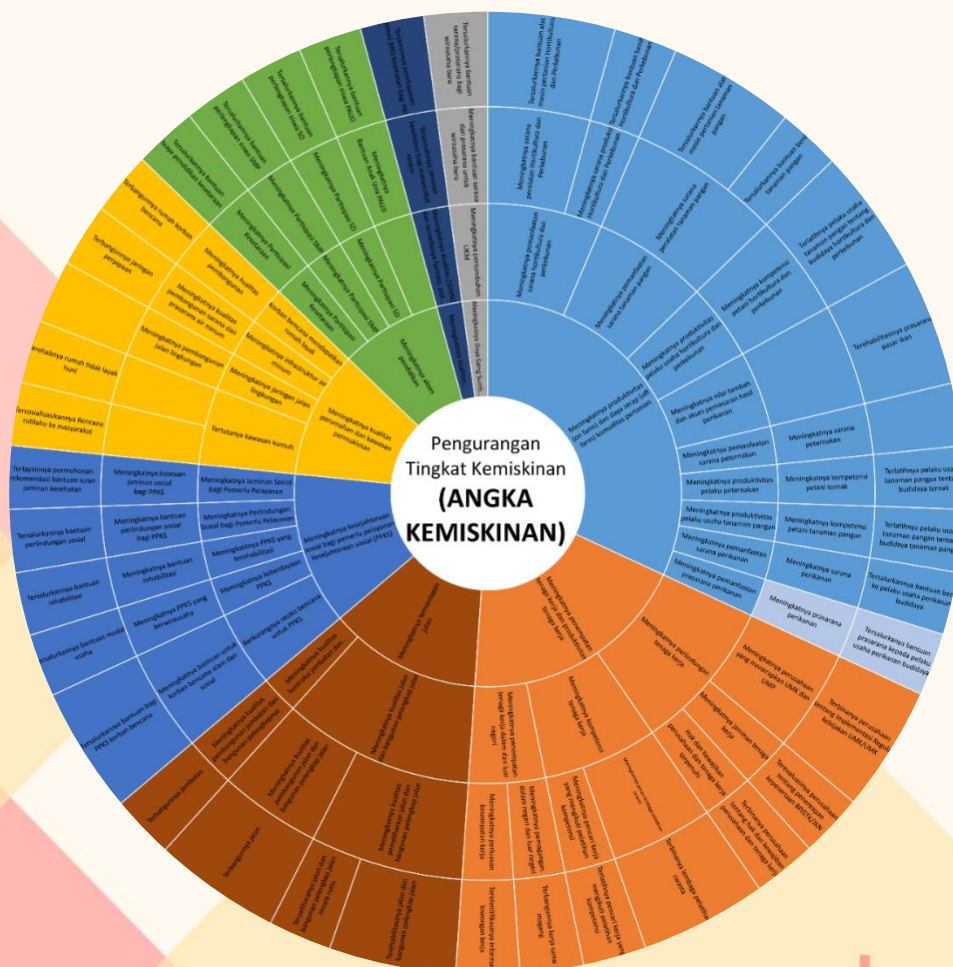
TREN ANGKA KEMISKINAN



SASARAN 3:

PENGURANGAN KEMISKINAN

Sasaran ini diukur dengan Angka Kemiskinan yang merupakan persentase Masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan apakah seseorang atau suatu keluarga dianggap miskin atau tidak. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Kesehatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:

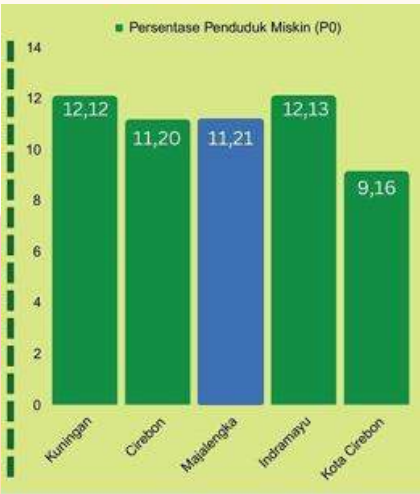


Angka Kemiskinan

Pada Tahun 2023 Angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan jika **dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Tahun 2022**. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Majalengka sebesar 11,94% sedangkan di Tahun 2023 sebesar 11,21%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan capaian sebesar 2.05% terlihat dari realisasi angka kemiskinan yang berkurang sebesar 0,73% dari tahun sebelumnya. Terbukti dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berkurang sebanyak 8.380 ribu jiwa dari total penduduk miskin di tahun sebelumnya yang mencapai 147.120 jiwa, sehingga pada Tahun 2023 ini total penduduk miskin berjumlah 138.740 jiwa.

Tahun	Indikator	
	Persentase Penduduk Miskin/P0 (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
(1)	(2)	(3)
2023	11,21	138,74
2022	11,94	147,12
Perubahan	0,73	8,38

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2022 dan Maret 2023



Menurut data BPS Jika **dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata di Wilayah 3 Cirebon**, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka berada di urutan ketiga lebih baik daripada Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. Akan tetapi berada di bawah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Rata-rata angka kemiskinan di wilayah 3 Cirebon yaitu 11,16% selisih 0,05% dengan Kabupaten Majalengka. Namun demikian, tren angka kemiskinan bergerak kearah yang positif meskipun belum menghasilkan penurunan yang signifikan.

Realisasi penurunan angka kemiskinan jika **dibandingkan dengan target akhir RPJMD** mencapai 92,51%. Hal ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengurangi angka kemiskinan masih harus ditingkatkan lagi karena target 10,37 belum tercapai.

Meskipun realisasi Tahun 2023 lebih baik 0,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, namun jika **realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target Tahun 2023** masih belum mencapai 100%, hanya sebesar 92,51% dengan realisasi penurunan angka kemiskinan berada di angka 11,21% dari target 10,37%.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terdapat beberapa **faktor** yang dapat

menurunkan kemiskinan, diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan tata kelola pengentasan kemiskinannya.

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

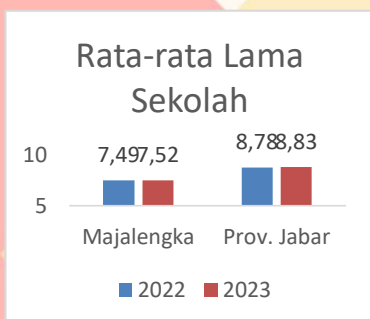
a. Bantuan Jaminan Sosial

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah memberikan bantuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun Pada Tahun 2023 peningkatan kesejahteraan sosial bagi **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum optimal** dari 329.934 jiwa yang seharusnya mendapat bantuan namun hanya 311.530 jiwa yang mendapat bantuan. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara:

- Memberikan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar sebanyak 2.867 penerima manfaat.
- Mengeluarkan rekomendasi bantuan iuran jaminan kesejahteraan sosial sebanyak 60.069 bantuan yang berupa BPJS Jamkesda dan BPJS PBIJK.
- Memberikan bantuan perlindungan sosial sebanyak 832.972 keluarga penerima manfaat.
- Memberikan makanan bagi lansia melalui **Program Rantang Kanyaah** yang pada Tahun 2023 sudah disalurkan kepada 830 orang.



b. Akses Pendidikan



Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2023 meningkat 0,03 tahun dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan RLS yaitu dari 7,49 pada Tahun 2022, menjadi 7,52 (setara kelas VIII) pada Tahun 2023.

Namun jika dibandingkan dengan rata-rata RLS Provinsi Jawa Barat dengan nilai 8,83 **masih berada di bawah 1,31 poin** sehingga masih perlu intervensi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan bantuan kepada anak usia sekolah di Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah memberikan bantuan, diantaranya sebagai berikut:

- Bantuan perlengkapan siswa PAUD sebanyak 1.550 siswa.
- Bantuan perlengkapan siswa SD sebanyak 211 unit.
- Bantuan perlengkapan siswa SMP sebanyak 100 siswa dan bantuan perlengkapan sekolah kesetaraan sebesar 20 paket.



c. Akses Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya memberikan kemudahan akses kesehatan melalui:

- Peningkatan jumlah peserta **Program Penerima Bantuan Iuran (PBI)** pada Tahun 2023 sebanyak 865.500 peserta jaminan kesehatan dengan rincian sebanyak 684.304 PBI APBN dan sebanyak 181.196 PBI APBD.
- Melakukan pengecekan kesehatan secara berkala melalui jemput bola dengan nama **Program “Puskesmas Nganjang Kaimah”** sebanyak 179.541 kunjungan oleh 32 puskesmas di Kabupaten Majalengka sepanjang Tahun 2023 sebagai bentuk pelayanan promotif dan preventif
- Memberikan bantuan layanan ambulans jenazah gratis melalui **Program Si Jago Raharja** sebanyak 1 ambulans.
- Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Talaga pada Tahun 2023 untuk memudahkan pelayanan kesehatan di wilayah Selatan Majalengka. Pengoperasionalan RSUD Talaga sudah berjalan, namun belum maksimal karena dari segi tenaga kesehatan spesialis belum



tersedia.

d. Stabilitas Harga

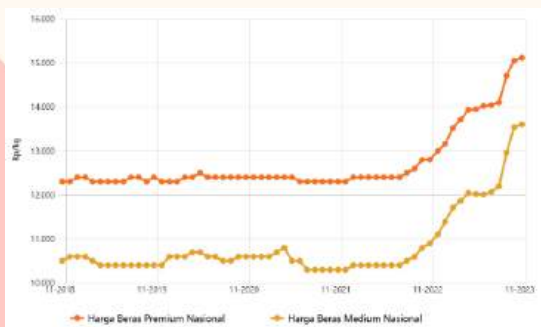
Berdasarkan data BPS Garis Kemiskinan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar Rp520.713,00 per kapita per bulan dan pada Tahun 2022 sebesar

Garis Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)
2023	520.713
2022	483.319
Perubahan (%)	7,2

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2022 dan Maret 2023

Rp483.319,00. Selama periode 2022 hingga 2023 telah terjadi kenaikan garis kemiskinan Rp37.394,00 per kapita per bulan atau naik 7,18%. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.



Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada November 2023 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional mencapai Rp15.117,00 per kilogram (kg). Harga tersebut meningkat 18,1%

dibandingkan dengan tahun lalu sekaligus menjadi rekor termahal baru dalam lima tahun terakhir, begitupula untuk harga beras kualitas medium dengan rata-rata harganya secara nasional mencapai Rp13.600,00 per kg yang meningkat 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya (katadata, 2023).

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya menjaga stabilitas harga dengan melaksanakan program Operasi Pasar Murah sebanyak 2 kali. Akan tetapi dampak Operasi Pasar Murah terhadap kenaikan harga pangan tidak signifikan, maka dari itu Pemerintah harus terus hadir untuk **memastikan gabah dan beras tersedia** pada saat harga beras meningkat atau terjadi kelangkaan yang diakibatkan perubahan



iklim. Selain itu, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh biaya produksi maka Pemerintah harus mampu menekan biaya produksi dan memberikan kepastian alur produksi pasca panen sehingga ketahanan pangan suatu wilayah dapat terjamin.

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk menurunkan beban pengeluaran Masyarakat adalah

- a) Mendistribusikan tenaga medis di tingkat puskesmas agar lebih merata dan mendistribusikan atau merekrut dokter spesialis untuk RSUD Talaga agar bisa optimal beroperasi.
- b) Meningkatkan jumlah bantuan bagi siswa yang keluarganya berada di bawah garis kemiskinan seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, tas dan lainnya, menyediakan transportasi bagi siswa dengan jarak tempuh ke sekolah yang jauh, uang saku, biaya kursus/les tambahan agar bisa meminimalisir kendala yang dihadapi baik itu secara ekonomi, lingkungan maupun secara internal.
- c) Meningkatkan kualitas pemberian rekomendasi jaminan Kesehatan dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
- d) Mencadangkan stok pangan yang cukup.
- e) Meningkatkan pengawasan terhadap pasar beras dan gabah untuk mencegah praktik spekulasi harga yang tidak sehat.
- f) Meningkatkan program Operasi Pasar Murah.
- g) Membuat sistem distribusi yang lebih efisien dari pelaku usaha sampai ke konsumen atau dibantu oleh Pemerintah.

2. Pengurangan Kantong Kemiskinan

a. Pembangunan rumah tangga layak huni

Dalam hal pengurangan kantong kemiskinan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang dapat dilihat dari rumah tangga hunian layak sebanyak 360.950 unit dari total jumlah hunian sebanyak 373.851 unit rumah. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah merehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 638 unit rumah namun masih terdapat rumah



tidak layak huni yang belum mendapat manfaat dari rehabilitasi rutilahu ini.



Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah membangun jaringan perpipaan sebanyak 2.589 SR (sambungan rumah) dan membangun jalan lingkungan sepanjang 35,23 km untuk memudahkan transportasi antar desa.

b. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Salah satu peranan penting infrastruktur yaitu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah meningkatkan jalan mantap sepanjang 791,023 km dengan jalan yang telah dipelihara sepanjang 255,635 km serta terdapat 17 jembatan yang dipelihara. Namun **masih terdapat aduan dari masyarakat terkait jalan rusak** melalui media sosial. Selain itu, perlu peningkatan pemeliharaan irigasi dan embung.

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan adalah

- Meningkatkan sosialisasi rutilahu dan memudahkan prosedur rutilahu secara tepat sasaran.
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.
- Membuat layanan pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* guna memberikan tanggapan berupa aksi nyata perbaikan jalan berdasarkan aduan dari masyarakat.

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

a. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu melalui penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Tingkat Pengangguran

Terbuka pada Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka menunjukkan angka yang baik yaitu 4,12% dari jumlah angkatan kerja. Sebanyak 95,88% telah bekerja namun 53% masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah.

Pemerintah harus hadir sebagai jembatan antara dunia kerja dengan Masyarakat. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah



menempatkan pencari kerja sebanyak 10.799 orang dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 14.218 orang melalui *event job fair* yang bekerjasama dengan Perusahaan di Kabupaten

Majalengka, telah membina 280 Perusahaan terkait regulasi kebijakan UMK melalui Surat Edaran Nomor TK.02/2390/DK2UKM/2023. Namun untuk meningkatkan kompetensi dari para pencari kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka **belum memiliki Lembaga Pelatihan Kerja** dan **belum melaksanakan program magang** baik itu dengan lembaga Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2023 telah memberikan bantuan modal usaha untuk PPKS sebanyak 88 keluarga penerima manfaat antara lain bantuan gerobak usaha sebanyak

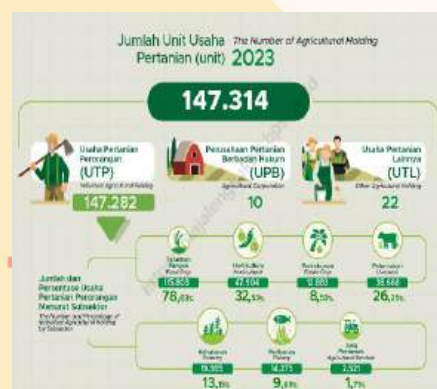


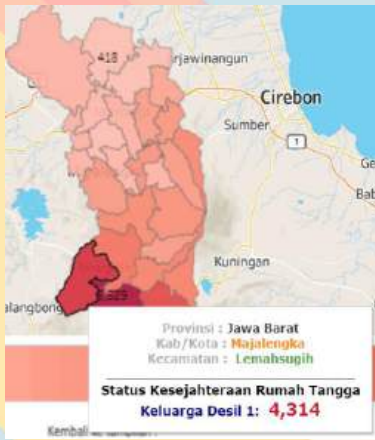
40 gerobak, dan bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) sebanyak 48 keluarga penerima manfaat.

b. Peningkatan Produktivitas Pertanian

Berdasarkan data BPS Pada Tahun 2023 terdapat 147.314 Unit Usaha Pertanian dengan 147.282 nya adalah petani perorangan dan sub sektor pertaniannya adalah tanaman pangan sebesar 78,63%.

Usaha dengan pertanian terbanyak di Kabupaten Majalengka adalah Kecamatan Lemahsugih sebanyak 12.305 unit atau 8,35% dari total usaha pertanian perorangan di Kabupaten Majalengka.





Ironisnya Kecamatan Lemahsugih termasuk kedalam salah satu desil 1 (kelompok kesejahteraan yang paling rendah) terbanyak di Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 4.314 keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah harus hadir untuk **memberikan bantuan kepada petani agar petani menjadi sejahtera** dan keluar dari garis kemiskinan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

- Membangun prasarana pertanian untuk 81 Kelompok Tani sebagai Pokmas penyelenggara swakelola di 81 Desa pada 25 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan volume panjang jalan usaha tani sesuai RAB/kondisi di masing-masing lokasi guna meningkatkan kelancaran mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian dan kegiatan lainnya dari dan ke lahan pertanian.
- Menyalurkan bantuan berupa benih jagung hibrida sebanyak 750 kg kepada 10 kelompok tani masing-masing 75 kg.



- Menyalurkan bantuan ternak ayam untuk RTM dengan jumlah bibit ternak sebanyak 360 ekor (80 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 3 dan 280 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 2), tiap RTM mendapatkan 9 ekor

(2 ekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina) berlokasi di 40 RTM yang memelihara ternak ayam kampung (20 RTM di Desa Sukadana dan 20 RTM lainnya di Desa Buninagara).

- Memberikan pelatihan pertanian yang diikuti oleh 30 orang peserta di setiap kecamatan yang terdiri dari penyuluh



pertanian kecamatan dan kelompok tani untuk meningkatkan kompetensi petani.

Berbagai bantuan tersebut dimaksudkan untuk memicu agar Masyarakat bisa tergerak meningkatkan usahanya.

Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat adalah

- Membentuk Lembaga Pelatihan Kerja Digital atau bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja dan memperbanyak program magang dengan Perusahaan maupun Pemerintah.
- Meningkatkan bantuan berupa pupuk murah, alat mesin pertanian kepada petani serta perbaikan sistem distribusi dan penyuluhan mulai dari penanaman sampai panen.
- Meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern, penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan.
- Membantu mendapatkan akses pembiayaan pertanian.

4. Tata kelola Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk tim khusus untuk menangani kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun **data yang tersedia saat ini masih belum cukup akurat** sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah meluncurkan aplikasi SIMNANGKIS untuk memperbaiki data kemiskinan yang ada di Kabupaten Majalengka. Diharapkan dari aplikasi ini dapat menjadikan data lebih akurat dan dapat mendeteksi keluarga miskin yang sudah graduasi. Selain perbaikan data, diperlukan juga perbaikan proses bisnis dan SOP nya.



Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan tata kelola pengentasan kemiskinan adalah:

- Memperbaiki tata kelola pelaksanaan pengentasan kemiskinan mulai dari peningkatan kualitas data penduduk miskin.
- Penyusunan Proses Bisnis.

c) Penyusunan SOP pengentasan kemiskinan.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan penurunan angka kemiskinan melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Rp1.145.164.000,00
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Rp982.171.700,00
3	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Rp1.161.502.000,00
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp34.600.375.759,00
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp.324.477.900,00
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp136.000.000,00
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp2.137.198.800,00
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp16.622.468.000,00
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Rp106.954.151.840,00 DAU/DAK/BANKEU/D BHCHT/PAJAK ROKOK
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp22.269.220.400,00
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp5.102.425.212,00

12	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.171.021.815.170,00
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rp558.710.000,00

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp355.913.517.381,00. **Efisiensi** atas capaian kinerja dengan indikator angka kemiskinan pada sasaran strategis Pengurangan Tingkat Kemiskinan tidak ada karena IKU hanya mencapai 92,51%.

PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



IKU : ANGKA STUNTING

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022
3,84%
Capaian 2022
104,17%

-0,72%
+8,01%

CAPAIAN 2023
112,18%

TARGET

REALISASI

3,50%

3,12%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Renstra
3,50%

Realisasi 2023 terhadap
target Renstra
-0,72%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI JABAR

Tidak dapat dibandingkan

FAKTOR

Yang
Memengaruhi

- Meningkatnya konsumsi gizi
- Meningkatnya kualitas pola asuh
- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
- Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
- Meningkatnya kualitas *database* dan infrastruktur sistem informasi penanganan stunting

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Perangkat Daerah
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 2,71% atau Rp4.257.552.910,00.

TREN ANGKA STUNTING

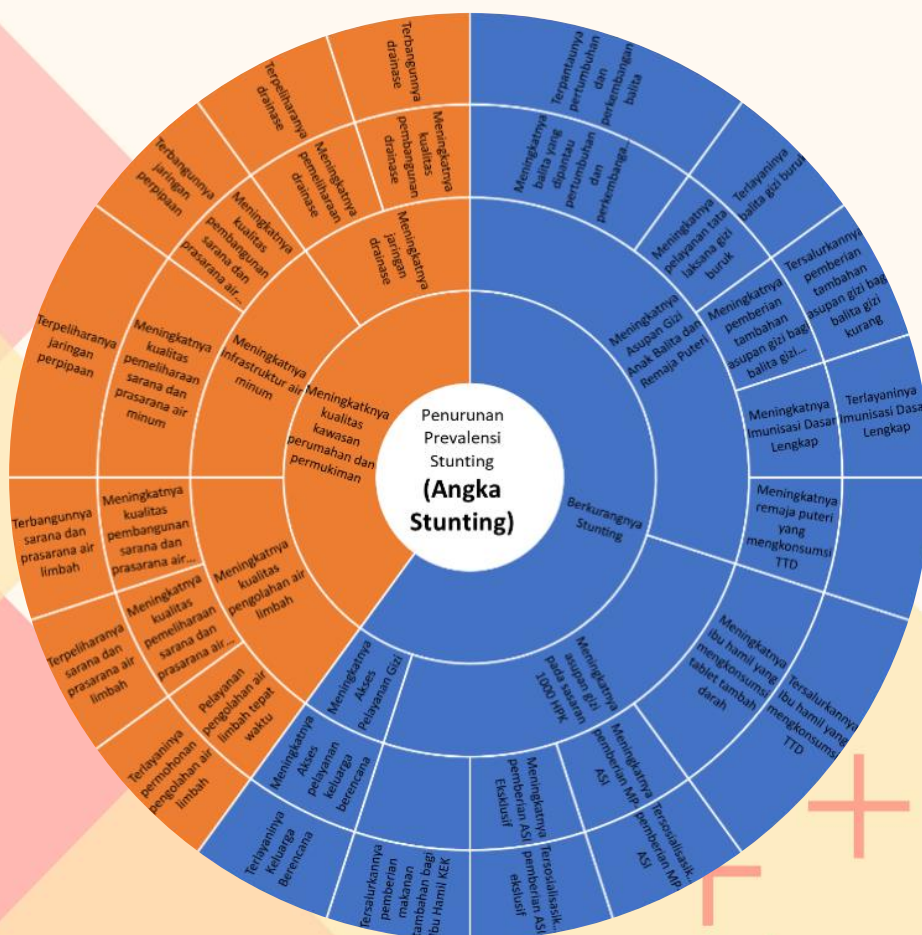


SASARAN 4:

PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Untuk mengukur penurunan prevalensi stunting digunakan indikator Angka Stunting yang merupakan persentase jumlah balita pendek dari keseluruhan balita yang diukur. Stunting sendiri adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan tubuh seorang anak terhambat atau terhenti sebagai akibat dari kurang gizi, kurangnya asupan nutrisi yang memadai, dan/atau kondisi lingkungan yang tidak sehat selama masa pertumbuhan awal mereka, terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Angka Stunting

Angka Stunting di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi pada Tahun 2023** yaitu sebesar 3,12% atau 0,38% lebih rendah dari target sebesar 3,50%, sehingga capaian Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2023 mencapai 112,18%. Sebagaimana data pada Tahun 2023, dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 77.780 balita, terdapat 2.465 balita yang mengalami stunting. Jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, realisasi Tahun 2022 sebesar 3,84%, lebih baik 0,72% dari realisasi Tahun 2023. Sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 104,17% lebih rendah 8,01% dari capaian Tahun 2023.

Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2023 juga dapat **dibandingkan dengan target akhir RPJMD** sebesar 3,50%. Sehingga Realisasi Angka Stunting terhadap RPJMD mencapai 3,12% dengan capaian terhadap target akhir RPJMD 112,18%.

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2023 (Akhir RPJMD)
3,50	3,12	3,50

Untuk perbandingan realisasi Angka Stunting Tahun 2023 dengan **realisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat** tidak bisa dibandingkan karena metode penghitungan yang digunakan berbeda. Angka Stunting menurut Survei Kesehatan Indonesia belum dipublikasikan untuk Tahun 2023.

Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan prevalensi stunting yaitu:

1. Meningkatnya Konsumsi Gizi

- Dalam rangka meningkatkan konsumsi gizi maka Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan:
 1. Pemberian tablet Tambah Darah kepada ibu hamil sebanyak 20.142.
 2. Pemberian tablet Tambah Darah kepada remaja putri sebanyak 48.060.
 3. Melakukan skrining anemia kepada remaja putri sebanyak 20.717.
 4. Memberikan MP-ASI kaya protein hewani kepada bayi dua tahun sebanyak 2.858.

2. Meningkatnya kualitas pola asuh

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pola asuh, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan

1. Melakukan promosi dan konseling menyusui kepada ibu bayi, sehingga bayi Usia 0 - 6 bulan mendapat ASI Eksklusif sebanyak 15.646 bayi.
2. Melakukan penguatan Tatalaksana Gizi Buruk dengan penanganan balita gizi buruk sebanyak 51.
3. Melakukan penimbangan balita di posyandu sebanyak 77.780.
4. Workshop penurunan stunting kepada Guru PAUD sebanyak 817 guru.
5. Pemberian Kit Stunting kepada 30 kelompok BKB (Bina Keluarga Balita).

3. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan

- Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan, telah melaksanakan kegiatan:
 1. Melakukan penanganan dengan tambahan asupan gizi kepada 447 balita kekurangan gizi.
 2. Melakukan peningkatan Kualitas Lingkungan dengan status Desa ODF (*Open Defecation Free*) sebanyak 343 desa dan kelurahan.
 3. Pelayanan sesuai standar kepada 75.936 balita.
 4. Pelayanan KB Pasca Persalinan kepada 16.436 peserta.
 5. Pelayanan Pemeriksaan kepada 7.906 Calon Pasangan Usia Subur.
 6. Alat antropometri kit sudah terstandar sehingga penemuan kasus stunting lebih cepat diintervensi.
 7. Seluruh Puskesmas memiliki USG dan ibu hamil kunjungan k1 dan K5 dilakukan USG oleh dokter sehingga jika diketahui pertumbuhan janin terhambat segera diintervensi.

4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan

- Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan kegiatan :
 1. Pemberian Bantuan Pangan Non-Tunai kepada 153.104 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
 2. Pemberian Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat terindikasi masalah gizi kepada 18.0759 warga.

3. Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 72.137 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
4. Balita melaksanakan Program PAUD sebanyak 27.019 balita.
5. Pemberian bantuan Perbaikan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada 2 kelompok.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan status Desa ODF (*Open Defecation Free*) sebanyak 343 desa dan kelurahan.
7. Pencegahan penyakit dan promosi Kesehatan dengan melakukan pengecekan Kesehatan kepada 369.151 warga.
8. Membentuk tim pendampingan calon pengantin keluarga berisiko Stunting dan balita stunting sebanyak 1.006 tim.
9. Fasilitasi bantuan sarana air bersih kepada 1.927 rumah yang mendapatkan layanan air bersih.
10. Fasilitasi bantuan sarana MCK kepada 110 Kepala Keluarga.

5. Meningkatnya Kualitas Database dan Infrastruktur Sistem Informasi Penanganan Stunting

- Dalam rangka meningkatkan kualitas database dan infrastruktur sistem informasi penanganan stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan kegiatan:
 1. Pengumpulan dan pemantauan Data Stunting (Profiling data stunting) oleh 3.018 pendamping.
 2. Melakukan Audit/Pemutakhiran Data Stunting.

Ada pula **beberapa program** yang mendukung Penurunan Prevalensi Stunting yaitu:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Rp 106.954.151.840,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rp989.104.000,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	Rp 16.622.468.000,00

		Pertanahan	
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp1.283.100.000,00
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp147.500.000,00
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp217.192.400,00
7	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp1.295.480.000,00
8	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rp1.732.860.000,00
9	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rp75.000.000,00
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp1.836.134.938,00
11	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp4.827.817.900,00
12	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp1.119.600.000,00
13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Rp6.717.000.000,00
14	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp542.400.000,00

		Berencana	
15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Rp 12.636.115.000,00

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan lagi kinerja penurunan prevalensi stunting di tahun mendatang yaitu:

1. Memaksimalkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sosialisasi gizi seimbang berbahan pangan lokal
3. Penguatan pencegahan anemia pada remaja putri
4. Sosialisasi pemberian makan pada bayi dan anak
5. Distribusi makanan tambahan balita gizi kurang dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) bekerja sama dengan PKK, DWP dan GOW
6. Bincang sehat setiap hari Selasa minggu kedua dengan tema pencegahan stunting
7. Memastikan ketersediaan air bersih dan memaksimalkan akses terhadap layanan air bersih melalui optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten khususnya di kawasan perdesaan.
8. Memaksimalkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Melakukan peningkatan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yg lebih tajam lagi ke sasaran Keluarga Resiko Stunting sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari unsur kader KB, PKK dan Bidan Desa di setiap desa

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Penurunan Prevalensi Stunting melalui indikator Angka Stunting yaitu 2,71 % atau sebesar Rp4.257.552.910,00 dari pagu anggaran Rp156.995.924.070,00 dengan realisasi Rp152.738.371.168,00.

TERWUJUDNYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB DI MASYARAKAT



IKU : PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PENYAKIT MASYARAKAT

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022

8%

Capaian 2022

80%



+2,46%



+24,6%

CAPAAN 2023
104,6%

TARGET

REALISASI

10%

10,46%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Target RPJMD

10%

Realisasi 2023 terhadap target RPJMD

104,6%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Tidak dapat dibandingkan

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada
- ☐ Menurunnya Gangguan Trantibum
- ☐ Peningkatan perlindungan masyarakat
- ☐ Peningkatan kualitas SDM Satpol PP

- ☐ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ☐ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

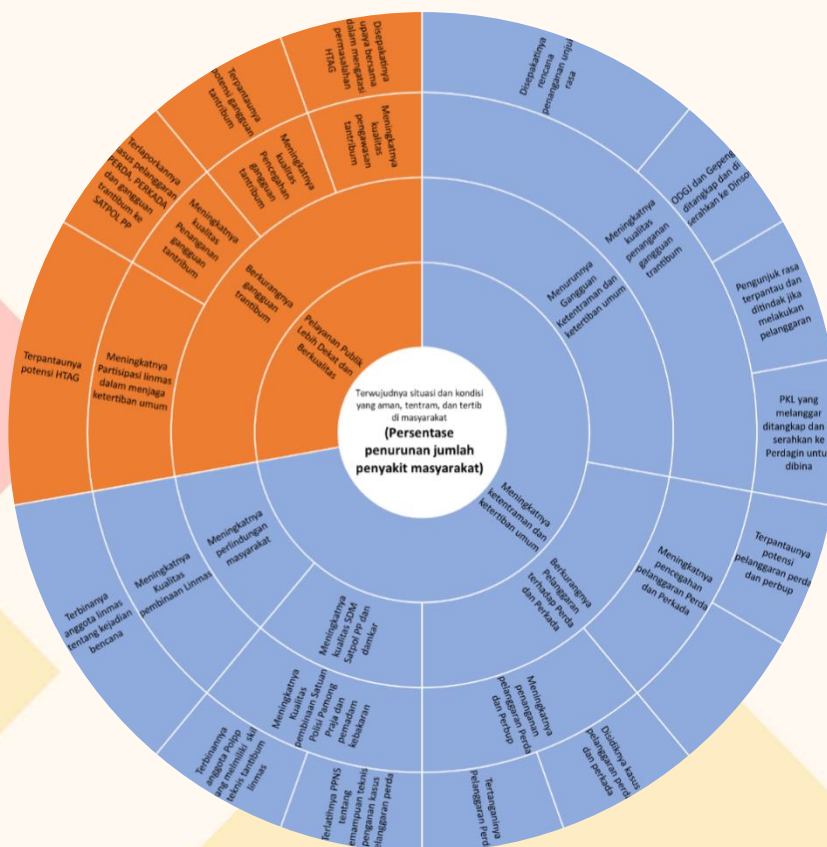
Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 4,42% atau Rp.405.217.953.

PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PENYAKIT MASYARAKAT



SASARAN 5:
TERWUJUDNYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB
DI MASYARAKAT

Sasaran ini diukur oleh Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat, perhitungannya diperoleh dari jumlah penyakit masyarakat tahun n dikurang jumlah penyakit masyarakat tahun $n-1$ dibagi dengan jumlah penyakit masyarakat tahun $n-1$ kemudian dikali 100%. Jika penurunan jumlah penyakit masyarakat semakin tinggi maka situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat akan terwujud. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kecamatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil merealisasikan penurunan jumlah penyakit masyarakat dengan persentase sebesar 10,46% dari target yang sudah ditentukan 10% sehingga **capaian pada Tahun 2023** adalah 104,6%. Sebanyak 1.765 Gangguan Trantibum telah ditangani dengan rincian 80 orang terjaring operasi yustisi kependudukan dan gerakan disiplin

nasional, 85 orang pelaku prostitusi, 100 orang gelandangan dan pengemis serta 1.500 minuman beralkohol yang ditertibkan. Jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2023 lebih tinggi 24,60% dan realisasinya lebih tinggi 2,46% dikarenakan realisasi pada Tahun 2022 hanya 8% dengan capaian 80%.

Pada akhir Tahun RPJMD sudah ditetapkan target sebesar 10%, jika kita **bandingkan realisasi Tahun 2023 dengan target RPJMD** sudah mencapai 104,6%. Hal ini berarti, realisasi Tahun 2023 sudah diatas target RPJMD di tahun kelima.

Indikator ini tidak dapat **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat** karena tidak ada indikator di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

Terdapat beberapa **faktor** yang dapat berhasil menurunkan jumlah penyakit masyarakat diantaranya adalah berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, menurunnya gangguan trantibum, meningkatnya perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM Satpol PP.

1. Berkurangnya Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada

Pengurangan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bisa menjadi indikator positif dari berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang efektif, dan adanya kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.



Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka **telah menangani pelanggaran perda** sebanyak 52 pelanggaran. Untuk meningkatkan pencegahan pelanggaran perda dan perkadanya

telah melakukan pemantauan potensi pelanggaran perda dan perkada sebanyak 19 kali, namun sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan pada Tahun 2023.

Upaya yang harus dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk terus menurunkan jumlah pelanggaran perda dan perkada yaitu

- a. Melakukan sosialisasi perda dan perkara kepada masyarakat.
- b. Melakukan pemantauan potensi pelanggaran perda dan perkara.
- c. Membuat kanal pengaduan *online* untuk masyarakat terkait pelanggaran perda.

2. Menurunnya Gangguan Trantibum

Untuk menciptakan lingkungan yang aman perlu adanya penanganan terhadap gangguan trantibum. Dengan menyelesaikan gangguan trantibum, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan kualitas penanganan gangguan trantibum diantaranya dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penertiban ODGJ

Penertiban ini telah dilaksanakan 9 kali dengan sasaran ODGJ yang terlantar di wilayah Kabupaten Majalengka untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial yang akan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait seperti



Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Penertiban PKL

Penertiban ini bertujuan untuk mengamankan dan mensterilkan wilayah atau area yang menjadi larangan untuk berjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka No. 12 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk selanjutnya dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

c. Pemantauan kegiatan unjuk rasa

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan unjuk rasa berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kerusuhan yang mengakibatkan adanya kerusakan terhadap fasilitas umum ataupun aset daerah. Sepanjang Tahun 2023, kegiatan pemantauan ini telah dilaksanakan sebanyak 11 kali.

d. Pemantauan potensi terjadinya gangguan trantibum

Pada kegiatan ini Satpol PP menerima laporan dari kecamatan terkait kasus pelanggaran perda dan perkara serta **memantau potensi terjadinya gangguan trantibum** yang terjadi di wilayah kecamatan.

Upaya yang harus dilakukan untuk terus menurunkan gangguan trantibum di Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Meningkatkan penertiban PKL, ODGJ dan Gepeng.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa.
- c. Meningkatkan pemantauan potensi gangguan trantibum di tingkat kecamatan.

3. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah hal yang penting untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.



Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan **kualitas pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja** dengan cara membina anggota Satpol PP tentang kemampuan teknis sebanyak 6 kegiatan dengan

melibatkan 750 orang. Namun pada Tahun 2023 **belum dilaksanakan pembinaan** terhadap Linmas.

Upaya yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas SDM Satpol PP di Kabupaten Majalengka adalah

- a. Meningkatnya Kualitas pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Meningkatnya Kualitas pembinaan Linmas

Berikut merupakan **program** yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya dalam menurunkan jumlah penyakit masyarakat:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp8.967.569.953,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Rp210.460.400,00

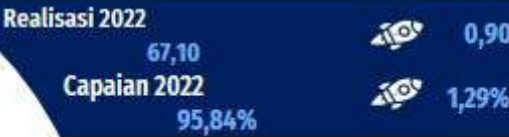
Efisiensi pada sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat dengan indikator persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat yaitu sebesar 4,42% atau Rp405.217.953,00 dengan anggaran Rp9.178.030.353,00 dan realisasi Rp8.772.812.400,00.

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA



IKU : NILAI SAKIP

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN REALISASI PROVINSI



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Aspek Perencanaan Kinerja
- ☐ Aspek Pengukuran Kinerja
- ☐ Aspek Pelaporan Kinerja
- ☐ Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- ☐ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ☐ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya mencapai 97,13%.

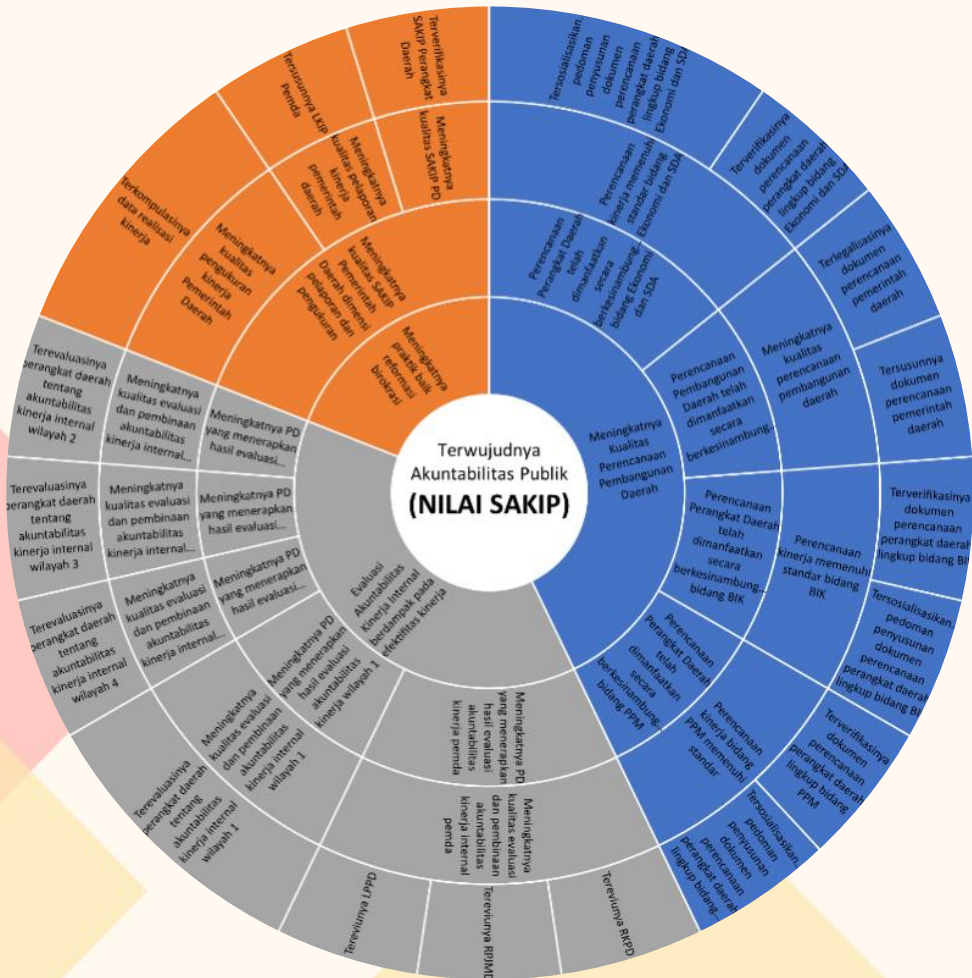
TREN NILAI SAKIP



SASARAN 6:

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran ini diukur dengan Nilai SAKIP yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Nilai SAKIP Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2023** mengalami peningkatan sebesar 0,90 yaitu dari nilai Tahun 2022 sebesar 67,10 menjadi 68,00 sehingga capaian nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 97,13%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,57
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,07

3.	Pelaporan Kinerja	15	9,59
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Meskipun secara predikat masih mempertahankan predikat B, akan tetapi jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** capaian nilai SAKIP Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen dan realisasi sebesar 0,9 poin. Jika dibandingkan dengan **rata-rata Provinsi Jawa barat**, predikat Kabupaten Majalengka setara dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebagian besar mendapatkan predikat SAKIP B, meskipun dari segi nilai masih lebih rendah 1,41 poin dari rata-rata nilai SAKIP di Provinsi Jawa Barat tetapi nilai SAKIP Kabupaten Majalengka meningkat menjadi urutan ke-14 bila dibandingkan Tahun 2022 yang berada di urutan ke-16. Kemudian realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 jika **dibandingkan dengan target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir RPJMD** masih belum sesuai dengan harapan, yaitu baru mencapai 97,13 persen. Target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada akhir tahun RPJMD adalah predikat BB atau minimal nilai SAKIP sebesar 70,01 poin. Hal ini dapat tergambar pada tabel berikut ini:

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Rata-Rata Jawa Barat
70,01	68,00	67,10	70,01	69,41

Faktor-faktor yang memengaruhi capaian nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui fasilitasi dari Bagian Organisasi berkerjasama dengan Bappedalitbang telah melakukan reuiu Renstra di Tahun 2023 serta menambahkan isu-isu strategis sebagai ukuran kinerja sehingga menjadi lebih berorientasi hasil dan telah



menjabarkannya sampai ke level individu. Hal tersebut berhasil meningkatkan nilai komponen Perencanaan Kinerja sebesar 0,48 poin dari 22,09 poin pada Tahun 2022 menjadi 22,57 poin pada Tahun 2023 sehingga untuk aspek Perencanaan Kinerja Kabupaten Majalengka mendapatkan peningkatan nilai paling tinggi se-Jawa Barat.

Akan tetapi terdapat tiga hal yang masih perlu diperhatikan, yaitu:

- Perjanjian kinerja yang belum selaras dengan Indikator Kinerja Utama PD.
- Indikator Kinerja pada dokumen perencanaan PD belum cukup untuk menjawab sasaran strategis yang ditetapkan.
- Penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan beberapa kegiatan berikut pada Tahun 2024:

- Mereviu tujuan dan sasaran strategis PD yang ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen perencanaan.
- Mereviu tujuan dan sasaran strategis Pemda berdasarkan *cascading* hasil reviu yang ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen perencanaan.
- Mereviu dan menyusun *cascading* baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen RPD dan Renstra Tahun 2024-2026.

Komponen Penilaian	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Perencanaan Kinerja	Mereviu tujuan dan sasaran strategis PD yang ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen perencanaan (before after)	29 tujuan renstra PD dan 45 sasaran strategis PD	Jan-Maret	Bappedalitbang
	Mereviu tujuan dan sasaran strategis Pemda berdasarkan <i>cascading</i> hasil reviu yang ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen	5 tujuan renstra Pemda dan 17 sasaran strategis Pemda	Jan-Maret	Bappedalitbang
	Mereviu dan menyusun <i>cascading</i> baru berdasarkan PermpenPAN RB 89 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan	54 <i>Cascading</i> dan Pohon Kinerja	Jan-Maret	Bappedalitbang

2. Aspek Pengukuran Kinerja

Upaya lain yang dilakukan di Tahun 2023 adalah pada komponen **pengukuran kinerja** dengan melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi anggaran kepada seluruh PD dengan menggunakan aplikasi e-SAKIP serta telah menyusun SOP data pengumpulan kinerja. Upaya tersebut meningkatkan nilai pengukuran kinerja sebesar 0,27 poin



dari sebelumnya 19,80 poin pada Tahun 2022 menjadi 20,07 poin pada Tahun 2023.

Akan tetapi belum seluruh IKU level PD dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data, monev yang dilakukan masih secara manual dan berorientasi pada penyerapan anggaran serta hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi, mutasi dan rotasi pegawai.

Berdasarkan akar permasalahan tersebut maka upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2024 yaitu:

- Memutakhirkan definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data IKU.
- Melaksanakan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (e-SAKIP).
- Memperbaiki strategi target kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (rekomendasi dari LKIP).
- Manajemen talenta mempertimbangkan kinerja PNS hasil pengukuran kinerja (*mapping talent box*).

Komponen Penilaian	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Pengukuran Kinerja	Pemuktahiran Definisi Operasional, Rumus, dan Sumber data IKU	9 IKU Pemda dan 57 IKU PD	Jan-Maret	Bappedalitbang dan Diskominfo
	Pengukuran Kinerja menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (E-SAKIP)	1 Aplikasi	Maret, Juni, September, Desember	Bappedalitbang
	Perbaikan strategi target kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (rekomendasi dari LKIP)	17 rekomendasi perbaikan	Maret	Bappedalitbang
	Manajemen Talenta mempertimbangkan kinerja PNS hasil pengukuran kinerja (mapping talent box)	1 kali mapping talent box	Februari- Juli	BKPSDM

3. Aspek Pelaporan Kinerja

Terkait dengan penyusunan laporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan Asistensi Penyusunan LKIP melalui pendampingan oleh Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asistensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LKIP Pemerintah

Kabupaten Majalengka yang memuat tujuh informasi wajib sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014.





Hasilnya penyusunan laporan kinerja Pemda dan sebagian besar PD sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja sehingga berhasil meningkatkan nilai pada aspek pelaporan kinerja meskipun tidak signifikan.

Akan tetapi masih saja terdapat beberapa PD yang belum menyajikan analisa yang sama sehingga LKIP yang disusun belum memenuhi standar serta informasi kinerja yang dituangkan terutama pada LKIP PD belum dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang yaitu:

- Mereviu LKIP PD dengan fokus pada 7 informasi kinerja dan pemanfaatan LKIP dalam memperbaiki dokumen perencanaan.
- Melaksanakan koordinasi dengan BPS sebagai sumber data capaian indikator dari sasaran strategis Pemda.
- Memperbaiki strategi target kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (rekomendasi dari LKIP).

Komponen Penilaian	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Pelaporan Kinerja	Reviu LKIP PD dengan fokus pada 7 informasi kinerja dan pemanfaatan LKIP dalam memperbaiki dokumen perencanaan	54 LKIP	Februari-Maret	Bag. Organisasi
	Berkoordinasi dengan BPS sebagai sumber Data capaian indikator dari sasaran strategis Pemda	Data yang akurat terkait capaian target dari sasaran strategis dan indikator yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemkab	Februari	Bag. Organisasi
	Perbaikan strategi target kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (rekomendasi dari LKIP)	 rekomendasi perbaikan	Februari-Maret	Bag. Organisasi

4. Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP di PD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 dan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Namun, monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja PD dan Pemkab. Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD belum memacu perbaikan

akuntabilitas kinerja secara signifikan serta hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD. Untuk lebih meningkatkan kualitas evaluasi internal, pada Tahun 2024 akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Monev tindak lanjut LHE SAKIP PD.
- Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan LHE.
- Memberikan reward kepada PD terbaik berdasarkan evaluasi SAKIP internal.

Komponen Penilaian	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Monev tindak Lanjut LHE SAKIP PD	54 LHE PD	April-Mei	Inspektorat
	Bimtek penyusunan LHE	1 Kegiatan	April	Inspektorat
	Memberikan reward kepada PD terbaik berdasarkan evaluasi akip internal	3 PD terbaik	Maret	Inspektorat

Berbagai upaya telah dilakukan melalui kolaborasi antara Perangkat Daerah pengampu untuk meningkatkan nilai SAKIP. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kementerian PAN RB Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majalengka dinilai telah menerapkan implementasi kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.

Ada pula **beberapa program** yang mendukung peningkatan nilai SAKIP meliputi:

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Rp1.215.189.700,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	Rp576.844.350,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Rp848.432.800,00

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp2.587.956.150,00. **Efisiensi** atas capaian kinerja dengan indikator Nilai SAKIP pada sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja tidak ada dikarenakan IKU tidak mencapai 100%.

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN



IKU : OPINI BPK RI

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR

Yang memengaruhi

- ☐ Pengelolaan keuangan dan aset daerah
- ☐ Pemerintah yang bebas KKN
- ☐ Pengelolaan pendapatan daerah

- ☐ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- ☐ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ☐ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- ☐ Program Penyelenggaraan Pengawasan
- ☐ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM

Yang mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis sebesar 1,71% atau Rp 8.422.325.757,00

TREN OPINI BPK



SASARAN 7:

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sasaran ini diukur dengan Opini BPK. Opini BPK adalah opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

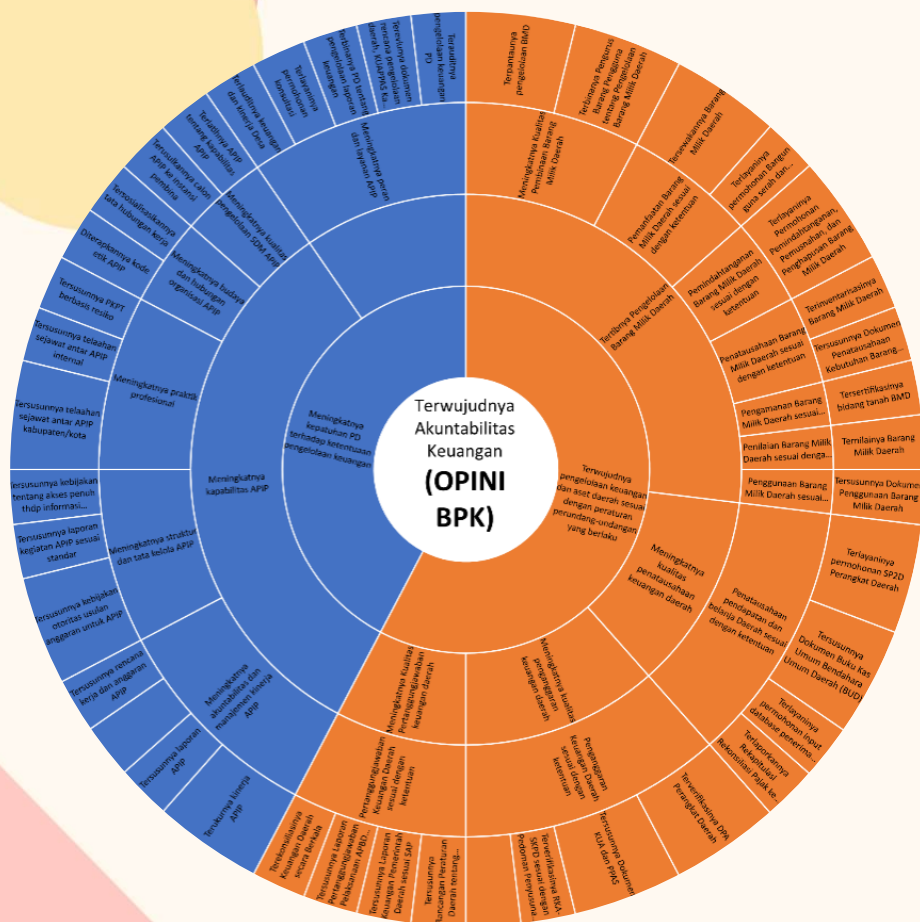
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Opini BPK

Target Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 adalah meraih opini WTP. Pada 10 Tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil meraih opini BPK dengan opini WTP, hal ini sesuai dengan **target akhir RPJMD**. Opini WTP merupakan pencapaian tertinggi dalam kategori jenis opini laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran ditandai dengan dikeluarkannya opini BPK dengan **realiasi Tahun 2022** opini WTP. Sehingga **capaian pada Tahun 2022** mencapai 100% dan jika **dibandingkan dengan Tahun 2021** capaian dan reaslisasi untuk indikator ini tetap dan tidak mengalami penurunan. Realisasi indikator ini jika **dibandingkan dengan capaian di Provinsi Jawa Barat** adalah setara karena pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan kategori WTP.

Opini WTP dapat tercapai karena kewajiban informasi keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi beberapa kriteria antara lain kesesuaian laporan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal.



Terwujudnya akuntabilitas keuangan dapat diraih karena **tiga faktor** yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kabupaten Majalengka mampu melakukan beberapa upaya seperti menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Selain itu, upaya/langkah yang telah dilakukan Pemkab Majalengka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan handal untuk mencapai Opini WTP:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK dan berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai penyelesaian Temuan BPK;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
4. Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada Laporan Keuangan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pengelola Keuangan di PD;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan persediaan PD;
7. Konsinyering Laporan Keuangan;

8. Penyempurnaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan;
9. Mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan pada 56 PD dan 33 BLUD.

Serta optimalisasi pada program pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan upaya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara legal yakni dengan pensertifikatan tanah milik pemerintah Daerah kabupaten Majalengka dengan target 1.083 bidang tanah dan telah direalisasikan 53 bidang tanah. Langkah/upaya yang dilakukan untuk percepatan sertifikasi tanah milik pemda antara lain dengan:

1. Melakukan koordinasi percepatan sertifikasi dengan Kantor ATR/BPN Majalengka.
2. Menyampaikan surat Bupati tentang percepatan sertifikasi tanah milik pemda ke kantor ATR/BPN Majalengka.

Selanjutnya untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dari sisi fisik telah dilaksanakan pemasangan patok pada 10 bidang tanah serta pemasangan plang pada 20 bidang tanah. Dari sisi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara administrasi telah dilakukan langkah-langkah dan upaya sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Permendagri No. 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan PD terkait dilaksanakan 2 kali dalam setahun waktu pelaksanaan di triwulan I dan III.
2. Menyelenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan BMD minimal 1 kali setahun.
3. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada PD terkait setelah rencana kerja PD (Renja) ditetapkan.

Upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah melalui beberapa strategi antara lain:

1. Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh PD.
2. Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan, Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal, tindak lanjut temuan BPK perlu difasilitasi, termasuk lewat



pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendasi BPK untuk segera ditindaklanjuti, temuan tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.

3. *Action Plan* yang terintegrasi harus disusun dalam rencana pembangunan.
4. Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan suatu keharusan.
5. Penetapan Perda APBD paling lambat Bulan Desember tahun sebelumnya.
6. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan.

2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah yang bersih akan dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Peran Inspektorat dalam mencapai opini WTP:

a. Pemeriksaan Internal

Inspektorat melakukan pemeriksaan internal secara berkala terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan.

b. Pemberian Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, inspektorat memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk perbaikan atau perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Pengawasan Efektivitas

Inspektorat mengawasi efektivitas implementasi rekomendasi yang diberikan, serta memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilakukan.

Pengawasan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan *good and clean governance*. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan, termasuk mencegah terulangnya kembali kesalahan yang sama di masa mendatang. Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal



Pemerintah (APIP) adalah untuk membantu PD/unit kerja, agar pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan pada setiap PD/unit kerja, senantiasa berada pada jalur yang benar, sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Upaya yang harus dilakukan di tahun selanjutnya, antara lain:

- Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pelatihan SDM APIP dan pengusulan calon APIP ke instansi pembina.
- Meningkatkan praktik profesional melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dan menyusun telaahan sejawat antar APIP.
- Meningkatkan *whistleblowing system* melalui peningkatan kualitas pelayanan permohonan pengaduan.

3. Pengelolaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor, pendapatan daerah yang tinggi dan terdiversifikasi dengan baik dapat memberikan indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik dan efektif.

Pendapatan yang cukup dapat menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendapatan yang terdiversifikasi juga dapat mengurangi risiko terhadap fluktuasi pendapatan dari sumber-sumber tertentu.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka terdiri Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Dengan rincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.060.765.678.556	3.018.669.869.618	98.62
1.	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	551.983.095.722	524.145.902.200	94.96
A	PAJAK DAERAH	174.388.210.375	155.232.982.485	89.02
B	RETRIBUSI DAERAH	18.049.318.726	13.276.775.081	73.56
C	PENGELOLAAN KEKAYAAN	9.810.220.865	9.524.899.395	97.09

	DAERAH YANG DIPISAHKAN			
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH	349.735.345.756	346.111.245.239	98.96
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.508.182.391.834	2.494.367.841.918	99.45
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	600.191.000	156.125.500	26.01

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan Tahun 2023 tidak sesuai dengan harapan. Masih ada permasalahan seperti data wajib pajak masih dalam pembaruan, masih banyak regulasi yang belum dibuat sejak diberlakukannya perda tentang pajak daerah dan Pajak PBB, belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat serta masyarakat yang malas bayar langsung ke *outlet* yang ditunjuk.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bapenda telah mengupayakan beberapa hal yaitu : meluncurkan inovasi pembayaran PBB P2 melalui *outlet* Indomaret dan Alfamart serta melalui aplikasi *online* seperti BJB DIGI. Diharapkan masyarakat bisa membayar PBB secara *online* dan dari tempat terdekat. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat Majalengka agar sadar pajak, diantaranya:

1. Bekerjasama dengan Stasiun Televisi Swasta Nasional “ANTV “ dalam rangka HUT Majalengka.
 - “Grebeg Pasar” Majalengka yang dilaksanakan di Pasar Talaga. Wajib Pajak yang bayar pajak di “Mobil Lapak” (Unit layanan Keliling) langsung dapat *doorprize*.
 - Tampilnya “The Patriot Band” Grup Band yang dibentuk Badan Pendapatan Daerah dengan misi utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk sadar pajak melalui lagu “SADAR Pajak” yang diputar di seluruh pusat perbelanjaan di Kabupaten Majalengka.
2. Lapak Raharja (Layanan Pajak Daerah Terpadu untuk Majalengka Raharja) dengan menggunakan Mobil Lapak mempunyai jadwal ke setiap pelosok Majalengka dalam rangka jemput pajak secara langsung.
3. NGALAPAK MEWAH RAHARJA (Ngajak Lunas Pajak, Merdeka Bawa Hadiah Raharja) sesuai tema di laksanakan dalam rangka memperingati HUT RI.
4. PESPA MERAH & TAPPAK MERAH (Pelajar Mahasiswa Sadar Pajak dan Petugas Pemungut Pajak Majalengka Raharja Berhadiah) Program ini hadir sebagai bentuk edukasi dan fasilitasi pembayaran secara digital

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan hadiah bagi masyarakat Majalengka yang membayar pajak.

5. ANUGERAH PAJAK 2023 sebagai penutup kegiatan akhir tahun dalam rangka apresiasi terhadap wajib pajak dengan berbagai kategori dan hadiah yang telah disiapkan.

Kemudian upaya yang harus dilakukan di tahun selanjutnya adalah:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan PAD.
- b. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD.
- c. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
- d. Pemberian *reward* bagi wajib pajak berprestasi.
- e. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar PD/unit kerja dalam pengelolaan PAD.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pencapaian target IKU Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Rp 480.173.718.989,00
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Rp2.452.000.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Rp848.432.800,00
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	Rp1.360.332.600,00
5	Program Pengelolaan Pendapatan Pendapatan Daerah	Bapenda	Rp7.426.751.931,00

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dengan indikator Opini BPK yaitu 1,71% atau sebesar Rp8.422.325.757,00 dari pagu anggaran Rp492.261.236.320,00 dengan realisasi Rp483.838.910.563,00.

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



IKU : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022

B

Capaian 2022

100%



0



0

CAPAIAN 2023

100%

TARGET

REALISASI

B

B

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Renstra

B

Realisasi 2023 terhadap target Renstra

B

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI JABAR

Realisasi Provinsi

A

Majalengka Lebih Rendah

B

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik
- ☐ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- ☐ Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
- ☐ Meningkatnya keterbukaan informasi publik

- ☐ Program Informasi dan Komunikasi
- ☐ Program Pendaftaran Penduduk
- ☐ Program Pencatatan Sipil
- ☐ Program Pelayanan Modal

PROGRAM

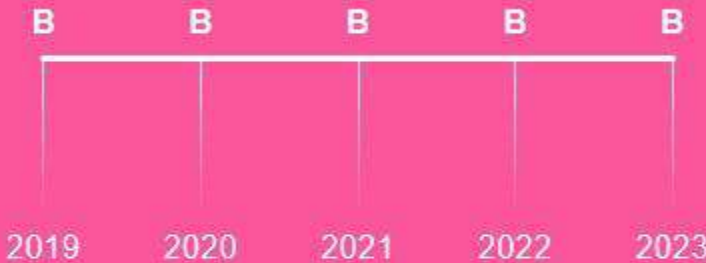
Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 1,89% atau Rp25.721.035,00.

TREN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



SASARAN 8:

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan rangkuman data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Terdapat 9 Unsur dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat diantaranya

Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya, Produk, Perilaku, Kompetensi, Sarana dan Pengaduan. IKM diperoleh dari total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Sekretariat Daerah sebagai koordinator untuk mengompulasi data IKM Kabupaten yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan terutama Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Perangkat Daerah yang melayani publik secara langsung.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

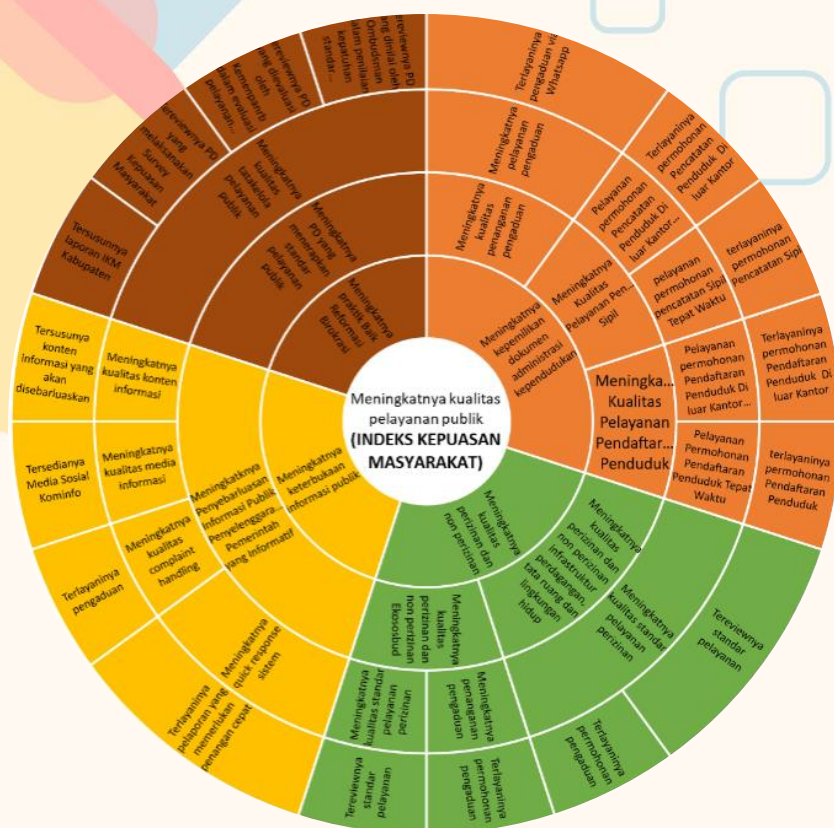
Indeks Kepuasan Masyarakat

$$= \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Konversi nilai IKM

$$= \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \times 25$$

Crosscutting antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:

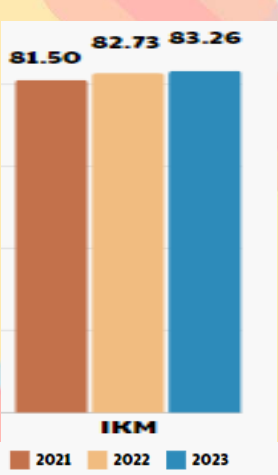
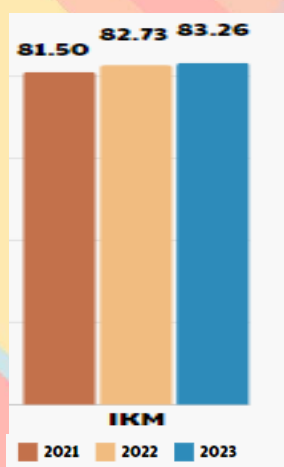


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap mempertahankan kualitasnya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi IKM Tahun 2023** yang mendapatkan nilai 83,26 dengan predikat B dari target predikat B sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, sebanyak 57 Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Majalengka mendapatkan predikat B. Upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik ini juga dapat terlihat jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Pada Tahun 2022 realisasi IKM Kabupaten Majalengka mendapatkan predikat B dengan capaian kinerja 100% sesuai dengan yang ditargetkan untuk 55 Perangkat Daerah mendapatkan predikat B.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Realisasi Jawa Barat
B	B (83,26)	B (82,73)	B	A (89,02)

Komitmen untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas ini dapat terlihat dari nilai mutu pelayanan yang mengalami peningkatan dari **Tahun 2021** yang memperoleh nilai 81,50, di **Tahun 2022** memperoleh nilai



Tahun	IKM
2021	81.50
2022	82.73
2023	83.26

82,73 dan meningkat di **Tahun 2023** dengan nilai 83,26. **Realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan RPJMD** sudah sesuai dan *on the track* dengan yang ditargetkan di akhir tahun RPJMD. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Barat**, IKM Kabupaten Majalengka masih berada 1 predikat di bawahnya. IKM Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan predikat A dengan nilai 89,02 sedangkan IKM Kabupaten Majalengka pada tahun yang sama masih mendapatkan peringkat B dengan nilai 83,26.

Faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator IKM Kabupaten Majalengka, diantaranya:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, tata Kelola dari pelayanan publik seluruh aspek perlu ditingkatkan kualitasnya.

- Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pendampingan kepada 7 unit lokus evaluasi yang akan dinilai standar kepatuhan pelayanan publiknya oleh Ombudsman, yaitu Disdukcapil, DPMPSTSP, Dinsos, Disdik, Dinkes, Puskesmas Cigasong dan Puskesmas Munjul.



Hasil yang diperoleh Kabupaten Majalengka untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Tahun 2023 mendapatkan nilai **91,64 Zona Hijau** dengan **Kualitas Tertinggi**.

- Pendampingan kepada 3 unit lokus evaluasi yang akan dinilai kualitas pelayanannya oleh KemenPAN RB, yaitu RSUD Cideres untuk



mewakili kategori Pelayanan Jasa, Dinsos untuk mewakili kategori Pelayanan Barang dan Kec. Ligung untuk mewakili kategori Administratif.

Adapun hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (PEKPP) yang diperoleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil PEKPPP		
Lokus	Nilai	Predikat
Kecamatan Ligung	2,9	C
Dinas Sosial	4,39	A
RSUD Cideres	4,32	A
Rata-rata	3,87	B

- Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri kepada seluruh Perangkat Daerah secara *hybrid*. Perangkat Daerah dengan nilai terbaik diumumkan pada acara Penganugerahan Pelayanan Publik terbaik dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 yang dihadiri oleh Sekretaris Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB.



Pemenang Pelayanan Publik terbaik **kategori Perangkat Daerah dan RSUD** adalah Disdukcapil, RSUD Cideres dan DPMPTSP, sedangkan untuk Pemenang Pelayanan Publik terbaik **kategori Kecamatan** adalah Kecamatan Sindang, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Kadipaten.

- Telah disusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, namun saat ini masih dilaksanakan secara *offline*, sebaiknya pada Tahun yang akan datang dibuat sistem informasi untuk input survei kepuasan Masyarakat secara online.

- Reviu Standar Pelayanan bertujuan untuk memetakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan memberikan langkah-langkah rekomendasi dan rencana aksi ke depan. Masukan-masukan dalam setiap upaya reviu Standar



Pelayanan akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Standar Pelayanan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan.

Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan Pelayanan publik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan. Pelaksanaan reviu Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target 65 pelaku usaha yang terlayani perizinannya, tercapai 100% dengan telah terlayannya 65 pelaku usaha di Tahun 2023. Adanya kenaikan nilai kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI sebesar 12,69 poin dari 80,61 menjadi 93,40.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu:

a. Pelatihan petugas perizinan

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diperlukan pelatihan petugas layanan perizinan dan berbagai pengembangan kompetensi pegawai, pendidikan, pelatihan, pemberian *reward*, dan lainnya sehingga tercipta sumber daya aparatur yang kompetitif, berkualitas dan profesional dan kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. DPMPTSP telah membuat surat pengajuan peningkatan Kualitas SDM kepada Bupati Majalengka melalui BKPSDM dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM.
2. DPMPTSP telah mengikuti Pelatihan *Training Of Trainer Online Single Submission Risk Based Approach* (TOT OSS RBA) sebanyak 3 orang, dan pelatihan Teknis Tingkat Dasar Perizinan Berusaha Bidang Penanaman Modal sebanyak 21 orang.
3. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

b. Pelayanan permohonan pengaduan

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik terjadi ketika masyarakat sebagai pengguna layanan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Ada kalanya pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan sehingga menimbulkan kekecewaan.

Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan pengaduan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP baik secara online (whatsapp, website, email, Instagram dan SP4N lapor) maupun offline (pengaduan tatap muka, kotak saran dan surat pengaduan)

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pengelolaan pelayanan permohonan pengaduan, DPMPTSP telah melaksanakan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka di tahun selanjutnya yaitu pembangunan Mal Pelayanan Publik.

Di Kabupaten Majalengka perlu dibangun Mal Pelayanan Publik. Adapun tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik yaitu:

- a. memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dengan adanya Mall Pelayanan Publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

3. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan



Peningkatan pelayanan kependudukan seperti pendaftaran penduduk yang dapat dilihat dari tercapainya target kepemilikan KTP mencapai 100,12% dengan realisasi 99,52% dari target 99,4%. Capaian kepemilikan kartu identitas anak sebesar 131,52% dengan realisasi 65,76% dari target

50%. Tercapainya target pemutakhiran Kartu Keluarga sebesar 105,26% dengan realisasi 100% dari target 95%. Selain itu pelayanan pencatatan sipil juga meningkat dilihat dari tercapainya target kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang mencapai 102,83% dengan realisasi 99,73% dari target 97%. Tercapainya target penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian sebesar 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari **upaya yang telah dilakukan** diantaranya sebagai berikut:

a. Kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dapat dibagi 2 yaitu peningkatan pelayanan di dalam kantor dan di luar kantor.

1. Peningkatan pelayanan di dalam kantor dengan cara memastikan Standar Pelayanan dan sistem prosedur pelayanan di kantor Disdukcapil dan di kecamatan dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan sehingga dokumen kependudukan yang menjadi output pelayanan pendaftaran penduduk berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan pindah/datang dan lain-lain dapat selesai diterima oleh masyarakat tepat waktu, mudah dan gratis.
2. Peningkatan pelayanan di luar kantor dengan cara pelayanan aktif secara Daring (Online) dan Luring (Langsung). Melalui pelayanan Daring, masyarakat dapat mengakses pelayanan dan menerima dokumen kependudukan melalui media whatsapp (WA), sementara pelayanan langsung dilaksanakan secara rutin dan terjadwal oleh tim

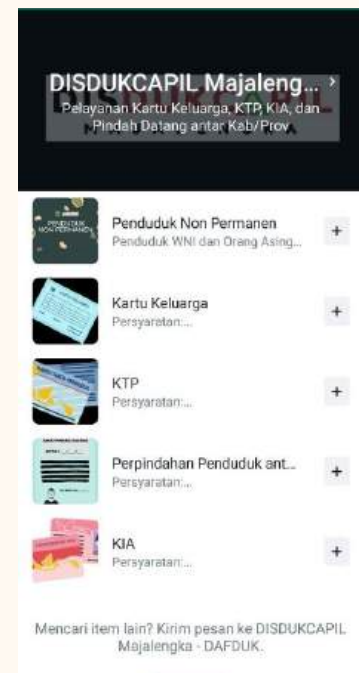
yang mendatangi Dinas/Instansi/Desa/Lembaga lain yang membutuhkan.

b. Kualitas pelayanan pencatatan sipil

Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil dapat dibagi 2 juga yaitu peningkatan pelayanan di dalam kantor dan di luar kantor.

1. Peningkatan pelayanan di dalam kantor dengan cara memastikan Standar Pelayanan dan sistem prosedur pelayanan di kantor Disdukcapil dan di kecamatan dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan sehingga dokumen kependudukan yang menjadi output pelayanan pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan lain-lain dapat selesai diterima oleh masyarakat tepat waktu, mudah dan gratis.

2. Peningkatan pelayanan di luar kantor dengan cara pelayanan aktif secara Daring (Online) dan Luring (Langsung). Melalui pelayanan Daring, masyarakat dapat mengakses pelayanan dan menerima dokumen kependudukan melalui media whatsapp (WA) melalui inovasi SILANCAR (Sistem Layanan Administrasi kependudukan Cepat dari Rumah), sementara pelayanan langsung dilaksanakan secara rutin dan terjadwal oleh tim yang mendatangi Dinas/Instansi/Desa/Lembaga lain yang membutuhkan.



c. Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan cara:

1. memelihara peralatan, sistem dan jaringan SIAK yang berada di Disdukcapil dan 26 kecamatan dalam kondisi baik dan lancar untuk menunjang pelayanan selesai tepat waktu yaitu 1 (satu) hari selesai.
2. meningkatkan kapasitas petugas pelayanan agar melek secara pengetahuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan *skill*/kemampuan teknisnya.

d. Pemanfaatan Data Kependudukan

Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan PD lain, sehingga penggunaan data kependudukan dapat semakin luas menunjang pelayanan publik sektor lain yang akan memacu penduduk untuk senantiasa memperbarui data pribadi dan keluarganya begitu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terjadi.

e. Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan tentu sangat berefek pada semakin mudah dan cepatnya penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan. Dengan Inovasi pelayanan ini penduduk dapat memperoleh 2 atau 3 dokumen sekaligus dalam 1 (satu) kali pendaftaran, misal pemohon mendaftar Akta Kelahiran, secara otomatis akan menerima dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga terbaru, dan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus.



f. Kualitas penanganan pengaduan

Peningkatan kualitas penanganan pengaduan akan berefek juga pada cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat, karena dengan merespon pengaduan dari masyarakat secara cepat akan melancarkan proses pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan yang mungkin tadinya akan mandek/terhambat.

Peningkatan penanganan pengaduan dilaksanakan berupa penyediaan sarana pengaduan langsung (melalui kantor Disdukcapil) dan secara Daring (online) melalui *website* dan media *whatsapp*.

4. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Dari segi informasi, faktor meningkatnya keterbukaan informasi publik khususnya informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat terlihat melalui peningkatan penyebarluasan informasi publik yang terukur dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik. **Tercapainya Indeks Keterbukaan Informasi Publik** sebesar 131,14% dengan realisasi 80 dari target 61 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka sudah menuju informatif.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa **upaya yang telah dilakukan** diantaranya sebagai berikut:

a. Kualitas konten informasi

Dengan telah tersedianya konten informasi melalui *Youtube*, *Instagram*, *website* secara rutin dalam momen kegiatan pemerintah daerah, hal ini informasi dapat tersebarluaskan secara *online* kepada publik sehingga publik dapat mengetahui sasaran Prioritas Pembangunan Daerah.



b. Tersedianya media cetak dan elektronik

Dengan dilakukannya kerja sama dengan Insan Pers atau dengan Pihak Redaksi Harian Penerbitan Berita setiap sebulan sekali serta melalui Penyiaran Informasi Publik melalui Radika FM, maka akan tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang informatif.

c. Tersusunnya rancangan probis dan SOP pengelolaan informasi publik

Telah tersedianya Landasan Hukum mengatur tentang standar Pengelolaan Informasi Publik dengan adanya:

1. Peraturan Bupati Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Kedaruratan 112.
2. Keputusan Bupati Nomor K.I.03.01/KEP.865-Diskominfo/2022 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor : 162-Kominfo/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID).
3. Keputusan Bupati Nomor 337/Kep. 149-Diskominfo/2019 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Tugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sistem Pengaduan Layanan Nasional (SP4N) Kabupaten Majalengka, hal ini menjadi dasar Kebijakan pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Kedaruratan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan.

- d. Pelayanan pengaduan, pembangunan kerja sama dengan insan media
Dengan telah dilakukan kerjasama dengan kelompok informasi masyarakat melalui pembinaan serta sosialisasi informasi publik, hal ini dapat membantu penyebarluasan informasi sehingga informasi publik dapat tersampaikan secara cepat kepada publik.
- e. Pembentukan kerja sama media dan Kelompok Informasi Masyarakat
Dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, maka pengelolaan pengaduan dapat diselenggarakan secara sederhana, cepat tepat tuntas dan terkoordinasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, hal ini akan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Program yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 696.820.000,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp15.200.000,00
3.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp14.200.000,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 633.360.000,00

Kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan dan dipertahankan. Maka dari itu, **upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang** adalah tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cara

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk seluruh Perangkat Daerah, membuat Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan dapat diakses publik
- b. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pemerintah Kabupaten Majalengka dengan membuat *Open Data* Majalengka

- c. Meningkatkan pelayanan digitalisasi dan sosialisasi dalam melayani masyarakat agar pelayanan menjadi lebih efisien, cepat dan tepat sasaran serta mengoptimalkan pelayanan regular dan jemput bola.
- d. Melakukan pengumpulan Survei Kepuasan Masyarakat secara online
- e. Membuat event pelayanan publik terpadu.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 1,89 % atau sebesar Rp25.721.035,00 dari pagu anggaran Rp1.359.580.000,00 dengan realisasi Rp1.333.858.963,00.

MENINGKATNYA PROFESIONALISME, KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN



IKU : INDEKS PROFESIONALITAS ASN

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian
- Meningkatnya kompetensi ASN
- Meningkatnya kinerja ASN
- Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM

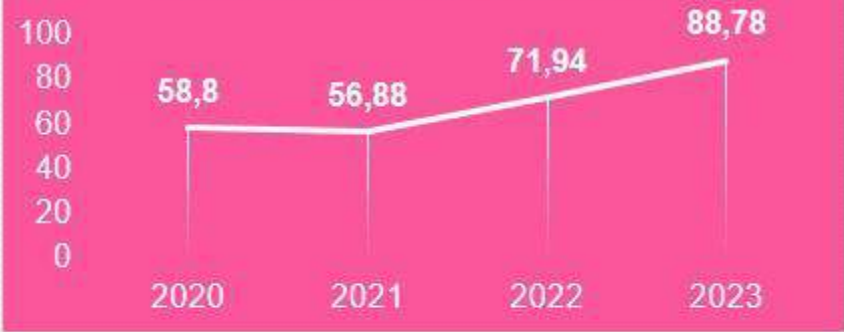
Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 7,35% atau Rp416,834,500,00.

TREN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

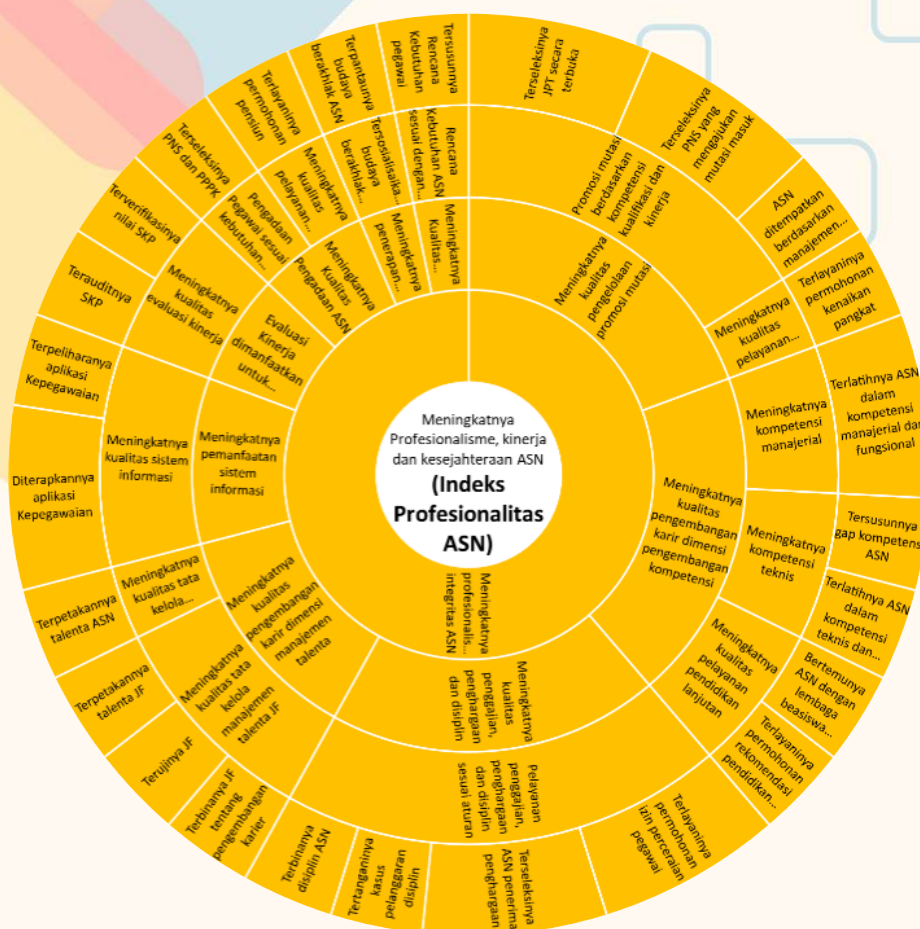


**SASARAN 9:
MENINGKATNYA PROFESIONALISME, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN ASN**

Sasaran ini diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Manfaat dari adanya IP ASN bagi pegawai digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN, bagi Instansi Pemerintah digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional, bagi Masyarakat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Faktor pembentuk IP ASN terdiri dari Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin yang datanya diambil dari Sistem Aplikasi Kepegawaian, Pendataan Ulang PNS, penilaian prestasi kerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai. Sedangkan rumus pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.

Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka melebihi target. Jika **dibandingkan dengan RPJMD**, indeks profesionalitas ASN pada Tahun 2023 telah mencapai 145,54%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2023 mengalami peningkatan capaian sebanyak 26,63 % dari Tahun 2022. Begitu pula dengan realisasinya pada Tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 16,84 poin dibandingkan dengan Tahun 2022.

Jika **dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat** yang mendapat angka 76,76 poin, Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka lebih tinggi 13,02 poin.

Capaian indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh **beberapa faktor** antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan Informasi Kepegawaian di lingkungan Pemkab Majalengka, BKPSDM telah melakukan Upaya sebagai berikut :

- Melakukan rekonsiliasi data ASN dengan Kanreg 3 BKN.
- Melakukan updating data ASN setiap bulan berupa infografik ASN
- Melakukan update data secara berkala setiap kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan layanan kepegawaian lainnya
- Melakukan publikasi melalui Media Sosial (Facebook, Instagram dan Website) yang dimiliki BKPSDM secara uptodate.
- Semua layanan kepegawaian sudah tersedia di aplikasi SMART (Sistem Manajemen ASN Rinci dan Terintegrasi).



2. Meningkatnya Kompetensi ASN

Pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang dimiliki ASN berpengaruh pada keahlian atau kompetensi serta sikap dan kepribadian profesional ASN. Sehingga diperlukan percepatan peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar.

Pengembangan kompetensi yang menjadi bobot besar untuk Indeks Profesionalitas ASN sudah dilaksanakan cukup maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan diklat untuk pejabat struktural. Pada Tahun 2023 ini dari total 639 orang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, di targetkan 383 pejabat struktural mengikuti diklat struktural dan bisa terealisasi sebanyak 429 orang mengikuti diklat tersebut. Selain itu untuk peningkatan kompetensi ASN, di Tahun 2023, BKPSDM telah melaksanakan beberapa seminar, BKPSDM juga telah melaksanakan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3. Meningkatnya Kinerja ASN

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif sesuai amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, BKPSDM telah membangun dan memanfaatkan aplikasi pengelolaan kinerja pegawai ASN secara mandiri melalui aplikasi Sinergis (Sistem Informasi Kinerja ASN) yang terintegrasi Dengan Laporan Kegiatan Harian, Sistem Absensi Online (SIAP = Sistem Informasi Absensi Pegawai) dan Tunjangan Kinerja ASN. Keselarasan penetapan kinerja antara Renstra dan PK, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) dan pejabat di bawahnya secara berjenjang telah dilaksanakan dalam Aplikasi Sinergi (Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi). Selain penggunaan aplikasi tersebut, untuk mengukur dan memotret kinerja ASN yang terintegrasi, pada tahun 2023 sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis pengisian E-Kinerja dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* pengisian



aplikasi e-Kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah dan sampai dengan November 2023 sudah dimanfaatkan oleh sekitar 11297 ASN atau kurang lebih 94,33% dan memperoleh peringkat 2 tertinggi di Jawa Barat.

4. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur



Sebanyak 9.418 ASN dari 12.042 ASN di Kabupaten Majalengka merupakan pegawai fungsional dengan capaian 110,15%, lebih tinggi 10,15% dari yang ditargetkan. Ada pula pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 5.871

ASN, lebih banyak 220 ASN dari yang ditargetkan. Jabatan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, diharapkan dapat mengisi ruang yang mungkin selama ini dianggap kosong, selain itu jabatan fungsional dapat menjadi model dari seorang ASN sebagai tenaga kerja yang profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian. Jabatan Fungsional diharapkan menjadi *role model* ASN yang kompetitif. Pada segi kualifikasi pendidikan, dari total 12.042 ASN, sebanyak 11.188 ASN telah menempuh pendidikan tinggi atau mencapai 92.91 % dari keseluruhan ASN di Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah ASN
Strata Tiga (S3)	11
Strata Dua (2)	632
Strata Satu (S1)	8.895
Diploma Empat (D4)	289
Diploma Tiga (D3)	1.358
Diploma Dua (D2)	75
Diploma Satu (D1)	12

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar ASN Kabupaten Majalengka merupakan sarjana atau lulusan Strata Satu (1).

Selain itu, capaian indeks profesionalitas juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui **program** dan kegiatan yang tertera dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 3.728.556.700,00

2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 1.944.151.800,00
----	--	--	---------------------

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan pada tahun mendatang antara lain dilakukan profiling untuk mengidentifikasikan kompetensi ASN melalui *assessment* center, mengklasifikasikan ASN berdasarkan kompetensi yang dimiliki, menempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, pembinaan jabatan fungsional, meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi pembina kepegawaian tingkat atas serta pihak lain dalam proses pengembangan karir PNS dan penyelenggaraan kediklatan, serta mengembangkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

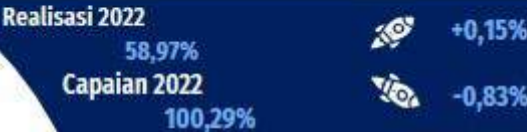
Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN sebesar 7,35% atau Rp416.834.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp5.672.708.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.255.874.000,00.

MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN



IKU : INDEKS PENGETAHUAN

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



CAPAIAN 2023
99,46%

TARGET REALISASI

59,44 59,12

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Mutu pembelajaran
- ☐ Akses pembelajaran
- ☐ Kualitas lingkungan belajar

- ☐ Program Pengelolaan Pendidikan (SD)
- ☐ Program Pengelolaan Pendidikan (SMP)
- ☐ Program Pengelolaan Pendidikan (Pendidikan Non Formal)
- ☐ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya mencapai 99,46%.

TREN INDEKS PENGETAHUAN

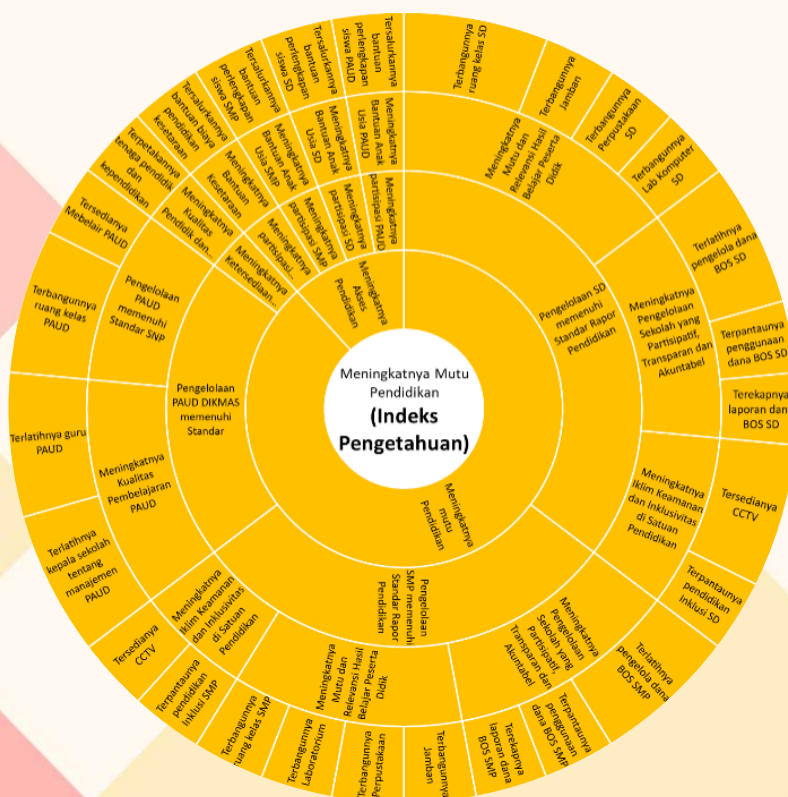


SASARAN 10:

MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN

Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengetahuan yang merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diwakili oleh 3 (tiga) komponen indeks yaitu indeks harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks kemampuan daya beli.

Indeks Pengetahuan diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Kemudian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan pengukuran yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Pendidikan.



Indeks Pengetahuan

Indeks Pengetahuan di Kabupaten Majalengka mengalami **peningkatan dari tahun sebelumnya**. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 59,12% lebih tinggi 0,15% dari realisasi Tahun 2022 yaitu 58,97%. **Capaian Tahun 2023** sebesar 99,46% dengan realisasi 59,12% dari target 59,44%.

Sehingga perbandingan capaian Tahun 2023 lebih rendah 0,83% dari capaian Tahun 2022.

Indeks pengetahuan selama periode RPJMD terus mengalami peningkatan, dan **realisasi Tahun 2023 terhadap RPJMD** telah mencapai 99,46%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks Pengetahuan **di Provinsi Jawa Barat**, Indeks Pengetahuan Kabupaten Majalengka lebih rendah 5,52%. Rata-rata Indeks Pengetahuan di Provinsi Jawa Barat yaitu 64,65%.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor peningkatan Indeks Pengetahuan **melalui program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

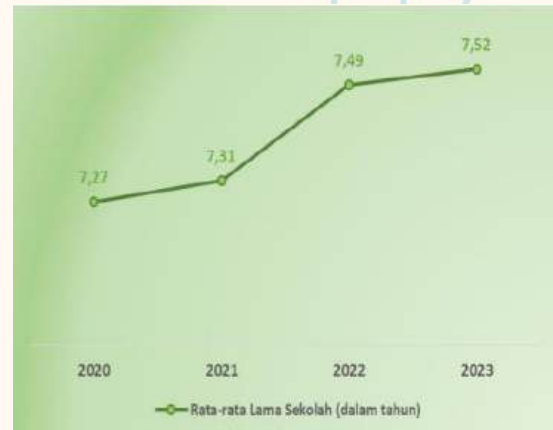
No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rp547.799.291.370

Indeks Pengetahuan merupakan salah satu tolok ukur kualitas pendidikan. Peningkatan Indeks Pengetahuan di Kabupaten Majalengka menandakan semakin berkualitasnya pendidikan di Kabupaten Majalengka. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2023, HLS Kabupaten Majalengka rata-rata meningkat sebesar 0,35 persen per tahun. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Majalengka mencapai 12,26 tahun, artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam



jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,26 tahun atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,24 tahun.

Sementara itu, selama periode 2020-2023, RLS Kabupaten Majalengka rata-rata meningkat sebesar 1,15 persen per tahun. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas meningkat dari 7,49 tahun menjadi 7,52 tahun (setara kelas VIII) atau meningkat 0,03 tahun dibandingkan Tahun 2022.



Berikut **faktor-faktor yang memengaruhi** sasaran meningkatnya mutu pendidikan:

1. Mutu Pembelajaran

Meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah merupakan serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dengan peserta didik melalui sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pembelajaran hingga berjalan dengan efektif dan efisien. Kualitas pendidik harus menjadi perhatian yang serius karena pengakuan guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru sudah memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik ini diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat dan sertifikat pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran diperlukan bahan ajar yang semakin berkualitas agar peserta didik semangat dalam belajar.

Namun masyarakat Kabupaten Majalengka saat ini masih cenderung memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu yang mereka anggap memiliki kualitas sekolah lebih baik, salah satunya dikarenakan kualitas tenaga pendidik belum merata. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas Pendidikan di banyak sekolah karena siswa unggulan hanya menumpuk di beberapa sekolah saja. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan cara sebagai berikut:

- Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kepada 75 tenaga kependidikan.



- b. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan kepada 202 tenaga pendidik.
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar kepada 78 tenaga kependidikan.
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama kepada 118 tenaga kependidikan.
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD kepada 100 orang tenaga kependidikan.
- f. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan kepada 102 tenaga kependidikan.

Namun jumlah ini masih sedikit jika dilihat dari jumlah 654 Sekolah Dasar, 79 Sekolah Menengah Pertama dan 5 Taman Kanak-kanak.



Untuk meningkatkan mutu pembelajaran **di tahun selanjutnya** maka akan dilakukan peningkatan jumlah peserta dan jumlah bimbingan teknis bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, belum meratanya distribusi tenaga pendidik juga menjadi kendala dalam

peningkatan mutu pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah merekrut guru PPPK sebanyak 365 guru untuk memenuhi kekurangan guru di Kabupaten Majalengka. Di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Majalengka akan melakukan redistribusi dan merekrut guru dengan memperhatikan kebutuhan guru pada masing-masing sekolah.

2. Akses Pendidikan

Faktor yang memengaruhi akses pendidikan yang tidak merata yaitu lokasi geografis dan tingkat ekonomi. Beberapa desa yang letak geografisnya jauh dari perkotaan memiliki akses pendidikan yang terbatas terlihat dari jarak tempuh menuju sekolah yang akses nya susah dilalui.

Untuk di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat memberikan bantuan khusus transportasi bagi siswa yang memiliki keterbatasan biaya dan jauh dari lokasi sekolah berupa uang transport ataupun akses kendaraan seperti penyediaan transportasi umum yang dilalui sekolah dengan harga khusus pelajar.



Selain itu, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga dapat mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak dari kelompok tersebut lebih cenderung putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di Kabupaten Majalengka masih ada 32 siswa SD yang putus sekolah dan 184 siswa SMP yang putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memberikan bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah melalui bantuan pengadaan perlengkapan siswa PAUD sebanyak 1.550 siswa, siswa SD sebanyak 211 siswa, siswa SMP sebanyak 100 siswa. Pada tahun selanjutnya bantuan akan tetap diberikan kepada siswa yang membutuhkan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

3. Kualitas lingkungan belajar

Kualitas lingkungan belajar sangat penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Lingkungan belajar yang baik menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran yang optimal. Beberapa faktor yang menentukan kualitas lingkungan belajar antara lain:

a. Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, dan area olahraga, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Fasilitas Teknologi

Integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti akses internet yang cepat, komputer, dan perangkat lunak pendukung pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang digital.

c. Ketersediaan Sumber Belajar

Ketersediaan buku teks, referensi, dan materi pembelajaran lainnya yang relevan dan mutakhir dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Permasalahannya di Kabupaten Majalengka masih terdapat beberapa Desa yang bangunan sekolahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, atau berat. Juga masih ada yang



kekurangan fasilitas sekolah, namun Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengupayakan pembangunan fisik, rehabilitasi bangunan dan pengadaan fasilitas seperti data berikut ini:

PAUD	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	9 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	41 Meter
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6 Ruang
Pengadaan Mebel PAUD	10 Paket
Pengadaan Perlengkapan PAUD	20 Paket
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	81 Paket

SEKOLAH DASAR	
Penambahan Ruang Kelas Baru	7 Ruang
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 Ruang
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.650 M
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	279 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Ruang
Pengadaan Mebel Sekolah	95 Paket
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1369 Unit

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang
Pembangunan Laboratorium	7 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	808 Meter
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	67 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	5 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	9 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	4 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 Ruang
Pengadaan Mebel Sekolah	71 Paket
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	108 Unit



Untuk tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Majalengka akan tetap melakukan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan rusak ringan, sedang, atau berat sesuai dengan skala prioritas. Hal yang tidak kalah pentingnya, dalam melakukan pembangunan atau rehabilitasi, dilakukan pengawasan penggunaan anggaran agar tidak disalahgunakan.

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp537.431.777.149,00. **Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Pengetahuan pada sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,46%.

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT



IKU : INDEKS KESEHATAN

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022

74,44

Capaian 2022

96,35%



+0,29



+0,03%

CAPAIAN 2023

96,38%

TARGET

REALISASI

77,54

74,73

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target RPJMD

77,54

Realisasi 2023 terhadap target RPJMD

96,38%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Provinsi

74,91

Kab. Majalengka lebih rendah

0,18

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ❑ Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan
- ❑ Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
- ❑ Meningkatnya kesehatan lingkungan
- ❑ Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makan minum
- ❑ Terkendalnya penyakit menular dan tidak menular

- ❑ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer)

PROGRAM

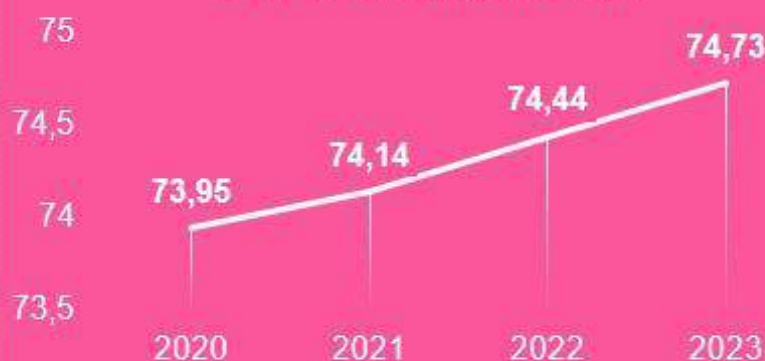
Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya mencapai 96,38%.

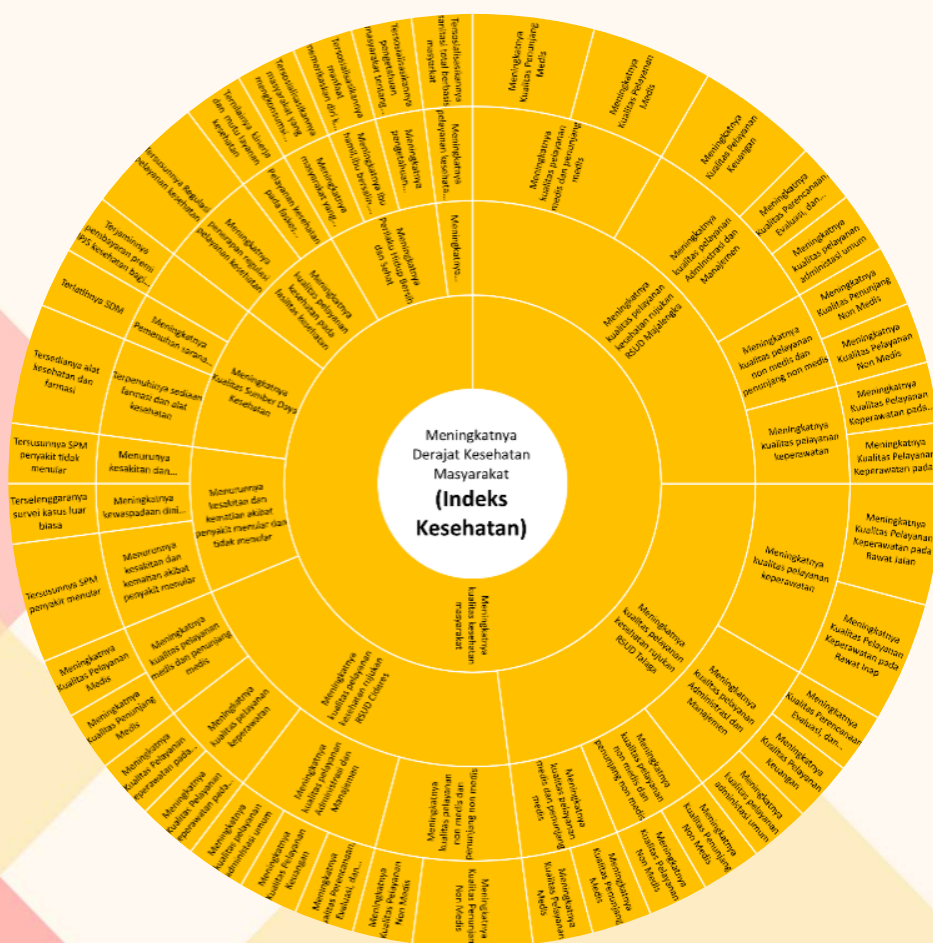
TREN INDEKS KESEHATAN



SASARAN 11:

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat digunakan indikator Indeks Kesehatan yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup yang merupakan perkiraan rata-rata berapa lama sekelompok orang diperkirakan akan hidup berdasarkan pada tahun kelahiran mereka, serta faktor-faktor seperti kesehatan, lingkungan, dan gaya hidup yang memengaruhi umur mereka. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Kesehatan.



Indeks Kesehatan

Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat **jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan 0,03% dari capaian Tahun 2022 sebesar 96,35%. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,29 poin dari realisasi Tahun 2022 sebesar 74,44 poin.



Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, menandakan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Namun **Capaian Indeks Kesehatan** di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 belum maksimal yaitu sebesar 96,38% dengan Nilai Indeks Kesehatan sebesar 74,73 poin dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 77,54 poin. Sama halnya jika **dibandingkan dengan target akhir RPJMD**, kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 96,38%. Begitu juga **dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat**, Indeks Kesehatan Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,18 poin.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir RPJMD)	Realisasi Jawa Barat
77,54	74,73	74,44	77,54	74,91

Faktor-faktor yang memengaruhi derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penilaian kinerja dan mutu pelayanan kesehatan kepada 32 Puskesmas yang ada di Kabupaten Majalengka. Sebanyak 26 Puskesmas terakreditasi Paripurna dan sebanyak 6 Puskesmas masih mendapat akreditasi Utama. Untuk penilaian Rumah Sakit di Kabupaten Majalengka, 2 RSUD mendapat akreditasi Paripurna dan 1 RSUD belum bisa mengikuti penilaian akreditasi yaitu RSUD Talaga karena baru diresmikan pada akhir Tahun 2023.

2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah melakukan:

- a. Sosialisasi terkait pengetahuan gaya hidup sehat kepada masyarakat sebanyak 96 kali.
- b. Sosialisasi manfaat memeriksakan diri ke faskes kepada masyarakat sebanyak 12 kali.
- c. Sosialisasi terkait konsumsi makanan bergizi seimbang kepada masyarakat sebanyak 32 kali.

3. Meningkatnya Kesehatan lingkungan

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah melakukan sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat sebanyak 14 kali sehingga pada Tahun 2023 seluruh desa di Kabupaten Majalengka sudah ditetapkan *Open Defecation Free* (ODF).

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah melakukan penjaminan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 865.500 peserta, dengan sumber pendanaan dari APBN sebanyak 684.304 peserta dan dari APBD sebanyak 181.196 peserta. Selain itu, jumlah non PBI yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 417.615 sehingga total peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Majalengka adalah 1.283.115 atau 95,75% dari total penduduk.

Program yang mendukung Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer)	Dinas Kesehatan	115.210.257.345,00	107.440.367.046,00

Upaya yang perlu dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah:

- peningkatan akses layanan kesehatan baik itu pelayanan kesehatan promotif, preventif atau kuratif.
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan.
- Peningkatan upaya deteksi dini kasus dan tata laksana sesuai standar.
- Peningkatan kegiatan home care di masing-masing wilayah kerja Puskesmas.

- e. Pemenuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang tidak mampu.
- f. Penguatan jejaring rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp107.440.367.046,00. **Efisiensi** atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kesehatan pada sasaran strategis meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tidak ada karena IKU hanya mencapai 96,38%.

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN



IKU : PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022 69,76%
Capaian 2022 100,01%



-0,07%



-0,63%

CAPAIAN 2023

99,38%

TARGET

REALISASI

70,12%

69,69%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target RPJMD 70,12%

Realisasi 2023 terhadap target RPJMD 99,38%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Provinsi 74,88%

Kab. Majalengka lebih tinggi 7,75%

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Kualitas Pengolahan Air Limbah
- ☐ Kualitas Pengelolaan Sampah

- ☐ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- ☐ Program Pengelolaan Persampahan

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya mencapai 99,38%.

TREN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK

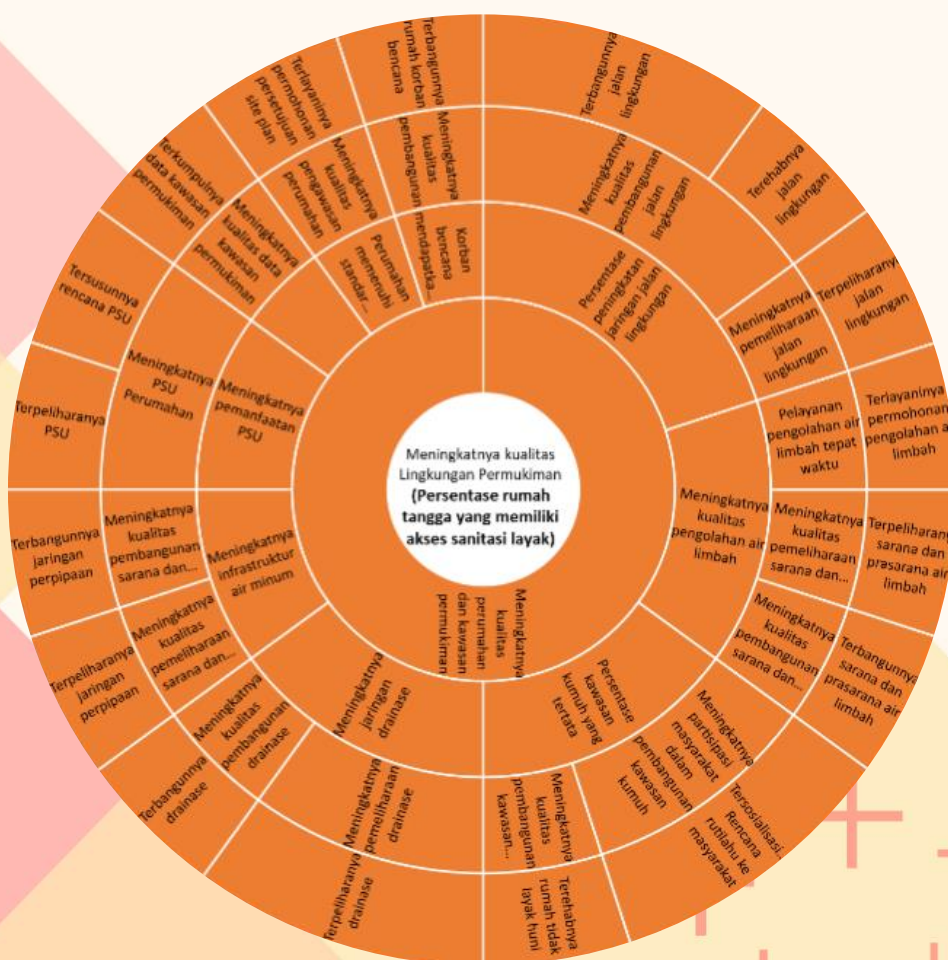


SASARAN 12:

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak. Diketahui bahwa air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan. Akses sanitasi layak dilihat dari beberapa komponen. Antara lain (1) penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, (2) bangunan atas/jenis kloset berupa leher angsa dan (3) bangunan bawah/tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak dapat dihitung melalui Jumlah Rumah Tangga yang mengakses sanitasi baik dari jumlah seluruh rumah tinggi.



Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah salah satu indikator dari 5 (lima) indikator pengukuran persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun.

Capaian Kinerja untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,38% dengan realisasi sebesar 69,69% dari target sebesar 70,12%.

Jika membandingkan **realisasi Tahun 2023 dengan Target RPJMD**, realisasi kinerja Tahun 2023 atau di tahun ke-5 ini sebesar 99,38%. Akan tetapi, capaian Tahun 2023 lebih rendah 0,63% **dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022** yang mencapai 100,01%.

Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD
69,76%	69,69%	70,12%

Sumber: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Apabila menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 82,63%, jika dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di **Provinsi Jawa Barat**, yaitu sebesar 74,88%, posisi Kabupaten Majalengka **lebih tinggi 7,75%**.

Realisasi Kab. Majalengka 2023	Realisasi Jawa Barat 2023
82,63%*	74,88%**

*Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut Badan Pusat Statistik.

Faktor yang memengaruhi persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak yaitu:

1. Kualitas Pengolahan Air Limbah

Agar kualitas lingkungan permukiman baik, salah satu hal yang penting adalah sistem pengolahan limbah. Air limbah rumah tangga adalah air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan di dalam rumah tangga, seperti mandi, mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Air limbah rumah tangga mengandung berbagai zat yang tidak diinginkan, seperti deterjen, sabun, minyak, lemak, dan zat organik lainnya yang berasal dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga. Sehingga dibutuhkan

saluran khusus untuk air limbah. Selain dari itu, tempat pembuangan air besar perlu diperhatikan, seharusnya dilarang untuk membuang air besar sembarangan, karena dapat mencemari lingkungan.

Permasalahan di Kabupaten Majalengka, cakupan pelayanan air limbah Tahun 2023 masih mencakup sebanyak 341,403 KK, dari total 489,895 KK.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merehabilitasi saluran air limbah, melakukan pembangunan MCK 1 Unit di Desa Randegan Wetan Kec. Jatitujuh, Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Desa Maja Selatan Kec. Maja dan



Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Desa Maja Utara Kecamatan Maja. Ini merupakan upaya yang dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya, di tahun selanjutnya akan tetap dilakukan pembangunan sarana dan prasarana air limbah untuk mencakup lebih banyak KK.

2. Kualitas Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah juga menjadi faktor yang ikut menentukan tingkat sanitasi rumah tangga melalui penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS permukiman/perumahan, pasar, industri/pelaku usaha dan fasilitas umum lainnya, melakukan pelayanan kebersihan di fasilitas umum seperti pasar dan jalur perkotaan



Majalengka, sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, melaksanakan gerakan kebersihan bersama PKK dan kelompok masyarakat, di Tahun 2023 melakukan pembangunan Bank Sampah di 2 lokasi yaitu Desa Kertabasuki Kecamatan Maja dan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka.

Juga melakukan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*) di 9 lokasi yaitu Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji; Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi; Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran; Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh; Desa Karang



Anyar, Kecamatan Dawuan; Desa Kramatjati, Kecamatan Malausma; Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung; Desa Rajagaluh Lor, Kecamatan Rajagaluh; Dan Desa Sindangkerta, Kecamatan Maja.



Serta penyediaan sarana persampahan sebanyak 11 unit yaitu Excavator 1 Unit, Truk Arm Roll 3 Unit, Dump Truk 1 Unit, dan Kontainer Sampah 6 Unit.

Adapun program Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mendukung pencapaian target IKU persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp1.383.100.000,00
2.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp6.545.361.000,00

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran ini yaitu sebesar Rp7.865.563.300,00. **Efisiensi** atas capaian kinerja dengan indikator persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak pada sasaran mneingkatnya kualitas lingkungan permukiman tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,38%.

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI



IKU : LAJU PENINGKATAN PDRB SEKTOR PERTANIAN

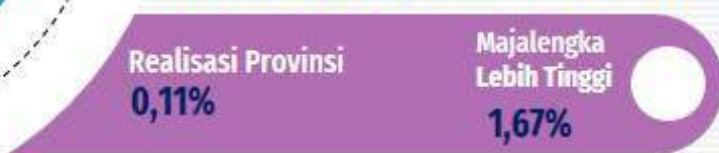
PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- Meningkatnya produktivitas pertanian
- Harga komoditas pertanian yang stabil
- Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- Berkurangnya resiko gagal panen

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Budidaya
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

PROGRAM

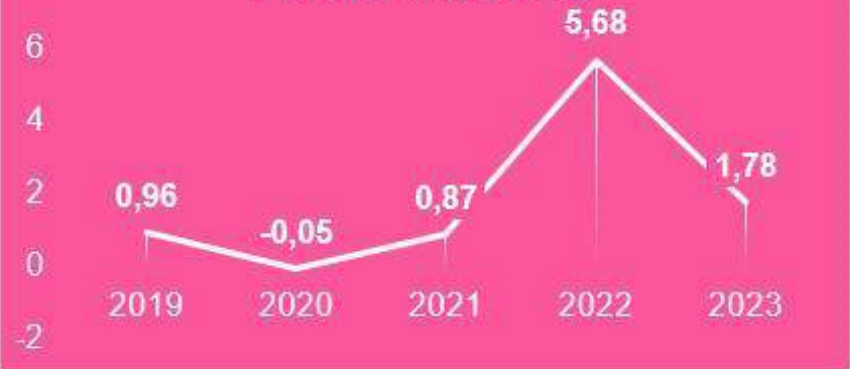
Yang mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini sebesar 4,01% atau Rp2.355.487.168,00.

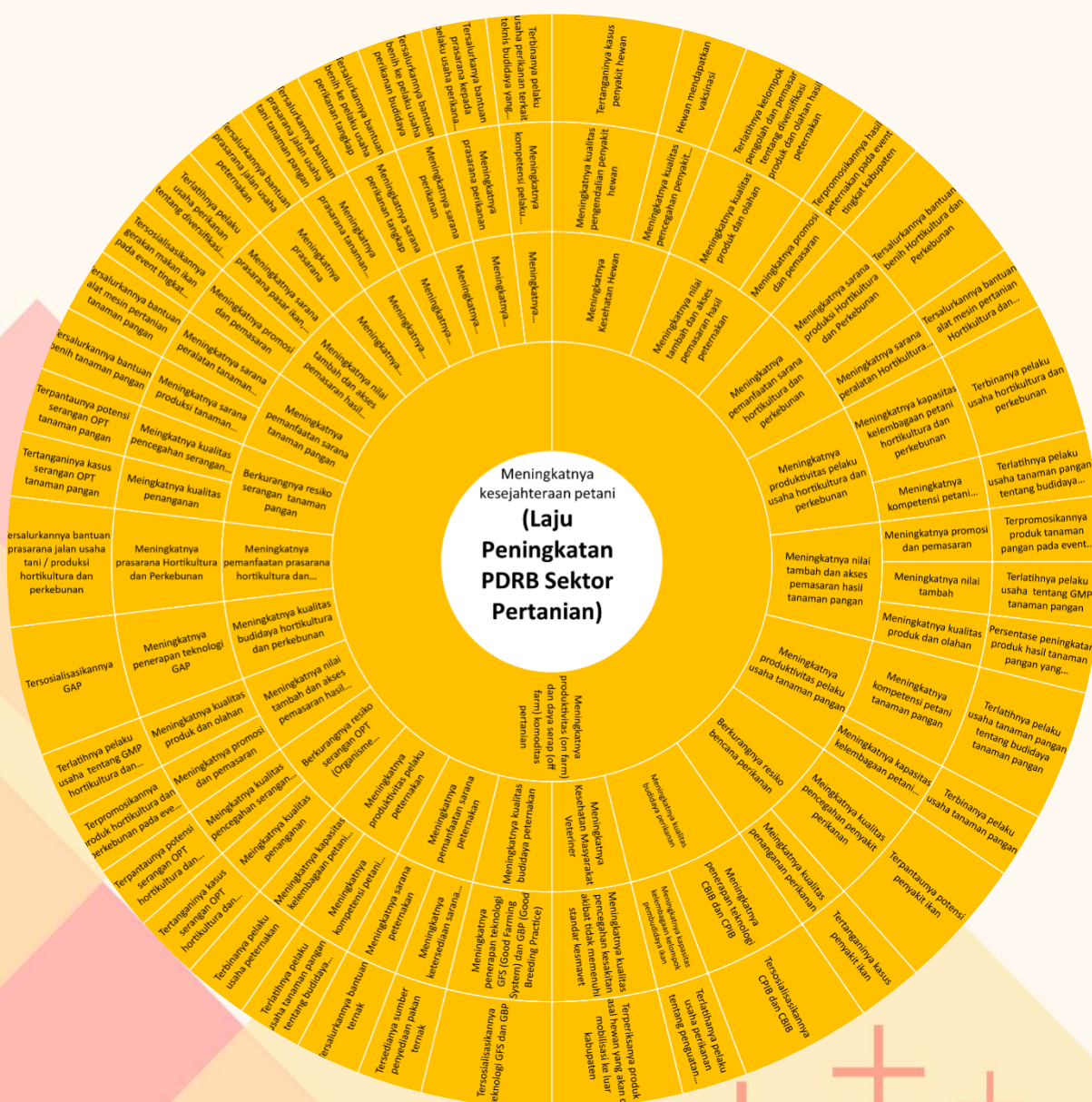
TREN LAJU PENINGKATAN PDRB SEKTOR PERTANIAN (PERSEN)



SASARAN 13:

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI

Untuk mengukur kesejahteraan petani digunakan indikator Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian yang merupakan nilai keseluruhan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan sektor pertanian dalam periode satu tahun. PDRB sektor pertanian mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian, seperti produksi tanaman pangan, peternakan, perikanan, hortikultura dan perkebunan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.



Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian

Capaian PDRB sektor pertanian Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2023 yaitu 178%**, hal ini dapat dilihat dari target 1% dan realisasi 1,78%. Laju peningkatan PDRB sektor pertanian Tahun 2023 jika dibandingkan **dengan target akhir RPJMD** sebesar 1%, capaiannya juga mencapai 178%. PDRB sektor pertanian Kabupaten Majalengka 1,67% lebih tinggi **dibandingkan dengan PDRB Jawa Barat** yang hanya sebesar 0,11%.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Realisasi Jawa Barat
1,0	1,78	5,68	1,0	0,11

Namun Laju Peningkatan PDRB sektor pertanian Tahun 2023 sebesar jika dibandingkan **dengan tahun sebelumnya**, dimana pada Tahun 2022 Laju Peningkatan PDRB sektor pertanian sebesar 5,68%, maka Laju Peningkatan PDRB sektor pertanian melambat sebesar 3,9% secara realisasi pada Tahun 2023, sedangkan untuk perbandingan capaiannya turun 390% dimana pada Tahun 2022 capaian Laju Peningkatan PDRB sektor pertanian sebesar 568%.

Nilai PDRB sektor pertanian dapat **dipengaruhi oleh berbagai faktor**, termasuk meningkatnya produktivitas pertanian, harga komoditas pertanian yang stabil, pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian serta berkurangnya resiko gagal panen.

1. Meningkatnya produktivitas pertanian

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang dilaksanakan dalam bentuk:

- Memberikan bantuan paket data ke 26 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian.
- Menyelenggarakan pelatihan pertanian tematik yang diikuti oleh 30 orang peserta di setiap kecamatan yang terdiri dari penyuluh pertanian kecamatan dan kelompok tani.
- Menyelenggarakan sosialisasi geospasial kepada penyuluh pertanian di 26 BPP Kecamatan dengan sasaran meningkatkan kualitas kinerja penyuluh pertanian.



- d. Memberikan bantuan transport untuk penyuluh pertanian dan petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang dibayarkan sebanyak 6 kali pertemuan perbulannya untuk bulan Januari sampai September dan 9 kali pertemuan perbulannya untuk bulan November sampai Desember untuk kelancaran dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani.
- e. Memberikan bantuan berupa benih jagung hibrida sebanyak 750 kg kepada 10 kelompok tani masing-masing 75 kg, untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan serta mendukung peningkatan ekspor di 10 Desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
- f. Melakukan pengadaan jasa tenaga teknis pertanian dan pangan untuk pengelola pembenihan ikan dan babat rumput sebanyak 4 orang, pengadaan pakan induk sebanyak 4.820 kg, pupuk kandang sebanyak 7.000 kg, herbisida sebanyak 8 liter, semen sebanyak 16 zak dan pasir pasang sebanyak 6m³, pengadaan calon induk ikan lele 2 paket dan ikan mas 31 kg, yang dilaksanakan agar terfasilitasinya sarana prasarana budidaya ikan selama 12 bulan di UPT BBPPI DKP3.
- g. Memberikan bantuan ternak ayam untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah bibit ternak sebanyak 360 ekor (80 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 3 dan 280 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 2). Setiap RTM mendapatkan 9 ekor (2 ekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina), yang dilaksanakan dengan berlokasi di 40 RTM yang memelihara ternak ayam kampung (20 RTM di Desa Sukadana dan 20 RTM lainnya di Desa Buninagara).
- h. Meningkatkan produksi hewan ternak dan pengobatan hewan ternak bertujuan untuk mencapai angka kelahiran sapi dengan mutu genetik yang baik sebanyak 20 ekor yang dilaksanakan di UPT BPPT Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Wetan.

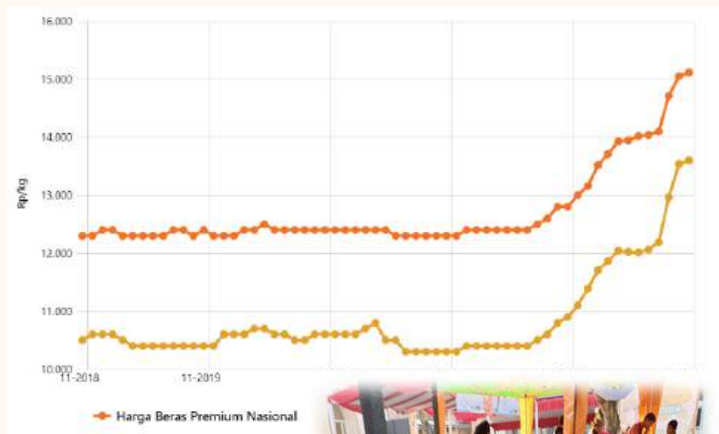


Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang yaitu meningkatkan penyuluhan pertanian, mensubsidi pakan ternak berkualitas, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan pemberian pupuk bersubsidi bagi para petani.

2. Harga komoditas pertanian yang stabil

Harga komoditas yang stabil merujuk pada harga yang relatif konstan atau tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Stabilitas harga komoditas adalah hal yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, karena fluktuasi harga yang besar dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada November 2023 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional mencapai 15.117/kg. Harga tersebut meningkat 18,1% dibandingkan dengan



setahun lalu sekaligus menjadi rekor termahal baru dalam lima tahun terakhir, begitu pula untuk harga beras kualitas medium dengan rata-rata harganya secara nasional mencapai 13.600/kg yang meningkat 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya (katadata, 2023). Selain komoditas beras, komoditas lain seperti telur, cabai, daging, bawang, termasuk pupuk pun perlu dijaga stabilitas harganya. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten

Majalengka, oleh karena itu pada Tahun 2023 telah menyelenggarakan Operasi Pasar Murah sebanyak 2 kali, namun penyelenggaraan perlu lebih ditingkatkan dan meningkatkan bantuan subsidi pupuk, pakan dan kebutuhan pertanian lainnya.



3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

Untuk meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian telah dilaksanakan:

- Pengadaan 22 unit Jaringan Irigasi Tersier secara swakelola, 1 unit jaringan irigasi tersier secara kontraktual, dan 1 unit Perpipaan secara kontraktual. Berlokasi di Kecamatan Palasah, Kecamatan Sumberjaya Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Sindang, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Argapura.
- Pembangunan prasarana pertanian, yang dilaksanakan di 81 Kelompok Tani sebagai Pokmas penyelenggara swakelola di 81 Desa pada 25 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan volume panjang jalan usaha tani sesuai RAB/kondisi di masing-masing lokasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian dan kegiatan lainnya.
- Pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk belanja bahan kimia (NPK 600 kg, pupuk organik padat 700 kg); bahan benih/bibit tanaman (benih cabai rawit hijau 400 gram, benih cabai merah besar 400 gram, benih terong 400 gram, bibit belimbing 400 pohon, bibit jambu air 400 pohon, bibit jambu kristal 400 pohon, bibit mangga 400 pohon) yang berlokasi di Desa Lemahsugih, Kecamatan Lemahsugih.



Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang yaitu tetap memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang terjangkau untuk menjaga kelancaran mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian, memfasilitasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan kebijakan tata ruang, pemanfaatan lahan untuk kegiatan bergizi seimbang dan aman mulai dari tingkat keluarga melalui gerakan

pemanfaatan lahan pekarangan, serta melakukan pengawasan penggunaan sarana pertanian agar kualitas sarana prasarana tetap terjaga.

4. Berkurangnya resiko gagal panen

Untuk mengurangi resiko gagal panen telah dilaksanakan:

- Pengendalian OPT di lapangan dengan memberikan bantuan obat-obatan Rodentisida sebanyak 150 kg.
- Memantau potensi penyakit ikan ke kolam budidaya sebanyak 7 titik, diantaranya di Desa Lengkong Kulon Kecamatan Sindangwangi 2 titik, Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka 1 titik, Desa Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka 1 titik, Desa Cipinang Kecamatan Rajagaluh 2 titik, dan Desa Burujul Kulon Jatiwangi 1 titik.
- Terperiksanya produk asal hewan yang akan dimobilisasi ke luar kabupaten melalui penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan (SKKPH) sebanyak 666 dokumen.
- Terperiksanya hewan kurban tentang Ante Mortem dan Post Mortem sebanyak 678 ekor.
- Terpeliharanya budidaya penangkaran benih padi dan produksi benih padi di Desa Liangjulang dan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten.



Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang yaitu membangun lumbung pangan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan, dan optimalisasi pemasaran bahan pangan.

Program yang mendukung Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp147.500.000,00

2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp38.000.000,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp217.192.400,00
4.	Program Pengolahan dan pemasaran budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp86.280.000,00
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp5.102.425.212,00
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp22.269.220.440,00
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp301.150.000,00
8	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp1.295.480.000
9	Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp45.000.000,00

Efisiensi atas capaian indikator Laju PDRB Sektor Pertanian yaitu 4,01% atau sebesar Rp2.355.487.168,00 dari pagu anggaran Rp58.784.058.056,00 dengan realisasi Rp56.428.570.888,00.

MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA



IKU : Jumlah Kunjungan Wisata

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA WILAYAH III JABAR



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ❑ Meningkatnya daya tarik wisata
- ❑ Meningkatnya promosi wisata
- ❑ Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif

- ❑ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- ❑ Program Pemasaran Pariwisata
- ❑ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PROGRAM

Yang mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini yaitu 0,67% atau sebesar Rp8.298.500,00.

TREN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA



SASARAN 14:

MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA

Sasaran ini diukur dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.



Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan. Sebanyak 1.050.524 wisatawan berwisata di Kabupaten Majalengka, sehingga **capaian kunjungan wisatawan pada Tahun 2023** mencapai 105,05% dari jumlah wisatawan yang ditargetkan sebanyak 1.000.000 wisatawan. Capaian tersebut juga menggambarkan kondisi akhir yang ditetapkan pada RPJMD. Sehingga jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, capaiannya sudah lebih besar 5,05% dari target yang ditetapkan.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini dapat dibuktikan jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Capaian indikator ini pada Tahun 2023 lebih tinggi 8,76% dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini terlihat

pada realisasi pada Tahun 2023 yang lebih banyak 231.981 kunjungan wisatawan dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Capaian 2023	Capaian 2022	Target RPJMD
1.000.000	1.050.524	818.543	105,05%	96,29%	1.000.000

Peningkatan Realisasi	231.981
------------------------------	---------

Peningkatan Capaian
8,76%

Akan tetapi jika **dibandingkan dengan rata-rata Ciayumajakuning**, Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Ciayumajakuning. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Ciayumajakuning pada Tahun 2023 telah mencapai 1.497.086 wisatawan, sedangkan di Kabupaten Majalengka masih lebih rendah 446.562 wisatawan untuk bisa mengejar rata-rata wisatawan Ciayumajakuning.

Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan
Kabupaten Cirebon	683.909
Kota Cirebon	1.833.129
Kabupaten Indramayu	836.785
Kabupaten Majalengka	1.050.524
Kabupaten Kuningan	3.081.084
Jumlah	7.485.431
Rata-rata	1.497.086

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh beberapa **faktor**:

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Pada Tahun 2023 objek wisata di Kabupaten Majalengka bertambah tujuh objek wisata dari tahun sebelumnya, sehingga saat ini terdapat 50 objek wisata di Kabupaten Majalengka yang menyajikan

berbagai keindahan alam seperti hamparan terasering, curug, situ, sungai, bumi perkemahan yang dikelilingi hutan pinus, bukit dan puncak gunung. Terasering Panyaweuyan menjadi objek wisata alam yang paling banyak dikunjungi pada Tahun 2023 dengan angka kunjungan mencapai 135.078 wisatawan, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya dikunjungi 81.553 wisatawan.



Terasering Panyaweuyan, Ds. Argamukti, Kec. Argapura

Kemudian disusul Situ Cipanten dengan kunjungan mencapai 117.699 wisatawan lebih banyak 23.916 wisatawan dari tahun sebelumnya. Ada pula objek wisata buatan seperti taman bermain, *water boom* dan *water park* dengan Jembar *Water Park* menjadi objek wisata buatan yang paling banyak dikunjungi yaitu sebanyak 58.519 pengunjung pada Tahun 2023. Selain objek wisata, kegiatan kepariwisataan juga ditunjang oleh akomodasi perhotelan yang bagus. Terdapat 28 hotel di Kabupaten Majalengka serta 30 tempat makan (*restaurant*) dengan berbagai konsep yang siap menjadi faktor penunjang daya tarik wisata di Kabupaten Majalengka. Berbagai objek wisata ini yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menarik minat wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat tercapai berkat intervensi melalui beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan rutin dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting pengembangan kepariwisataan di daerahnya.
- b. Monitoring objek wisata Sawah Bengkok di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh pada Tanggal 11 April 2023.

- c. Monitoring desa wisata di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi.
- d. Survei potensi desa di Desa Muktisari, Kec. Cingambul pada Tanggal 16 Maret 2023
- e. Survei potensi wisata di Desa Cimeong, Kec. Banjaran.
- f. Survei potensi desa wisata di Desa Jerukleueut, Kec. Maja.
- g. Survei potensi wisata objek wisata Leciguas, Desa Cibunut, Kec. Maja.
- h. Survei potensi objek wisata Air Keramat Gunung Bitung, Desa Wangkelang, Kec. Cingambul.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka upaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Membina pelaku usaha pariwisata.
- b. Memfasilitasi pelaku usaha tentang standardisasi destinasi pariwisata.
- c. Melatih SDM pariwisata tentang pengelolaan destinasi wisata.
- d. Menyusun masterplan objek wisata yang dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi wisata, isu strategis pengembangan pariwisata, analisis pengembangan daya tarik wisata dan rekomendasi perencanaan kawasan wisata guna meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- e. Membangun amenitas objek daya tarik wisata, memelihara objek daya tarik wisata serta memantau pengelolaan destinasi pariwisata.

2. Meningkatnya Kebudayaan Daerah

Budaya sebagai daya tarik wisata mempunyai peranan penting dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Aspek budaya yang dapat dipertunjukkan antara lain seni pertunjukan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah serta cara hidup dan kebijaksanaan masyarakat lokal (*indigenous people*). Di Kabupaten Majalengka, pengembangan seni tradisional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Beberapa kebudayaan daerah yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Majalengka diantaranya:

1. Kampung budaya Kaputren Desa Putri Dalem Kec. Jatitujuh.
2. Festival Nyiramkeun Pusaka Talaga Manggung dan Nunuk Baru.
3. Wisata Religi Sunan Parung Sangiang.
4. Pertunjukan Guyang Munding dan Ngawuluku Desa Bantaragung, Kec. Sindangwangi.



5. Festival Rampak Genteng Kec. Jatiwangi.
6. Festival Binaraga Jebor Kec. Jatiwangi.
7. Kampung Silat Nagara Kembang Kec. Cingambul.
8. Babarit Desa Sidamukti Kec. Majalengka.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kebudayaan daerah seperti Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten/Kota pada Porsenitas, Kirab Budaya Kegiatan Hari Jadi Majalengka, Karnaval Budaya pada kegiatan *West Java Festival*, *Pakauland* serta Dialog Komunitas Sejarah.

Upaya yang dapat dilaksanakan pada tahun mendatang, yaitu:

1. Membina pelaku budaya daerah tentang pemajuan budaya.
2. Menyalurkan bantuan operasional kepada pelaku budaya.
3. Mengevaluasi dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD).
4. Menyusun dokumen sejarah daerah.
5. Memelihara situs cagar budaya.

3. Meningkatnya Promosi Wisata

Promosi wisata merupakan bentuk komunikasi pemasaran dalam pariwisata yang tujuannya untuk memengaruhi target wisatawan agar berkunjung ke daerah wisata yang dipromosikan. Promosi wisata juga menjadi suatu hal yang penting karena dapat menentukan citra suatu daerah terkait kepariwisataannya. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa kegiatan promosi wisata antara lain:

- a. Mempublikasikan informasi wisata melalui media sosial Instagram
@disparbudmajalengka,
TikTok
@disparbudmajalengka dan



website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka
<https://disparbud.majalengkakab.go.id/>.

- b. Berkolaborasi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang redaksi media dan jurnalis. Melalui kolaborasi ini Kabupaten Majalengka mendapatkan manfaat untuk membranding objek wisata lebih masif lagi.



c. Mengikuti kegiatan Ciayumajakuning *Economic Forum and Festival* Angklung Tahun 2023 yang melibatkan para pelaku ekonomi kreatif, UMKM, Bank Indonesia Cabang Cirebon serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan se-Ciayumajakuning.

d. Membangun berbagai kerjasama seperti Kerjasama Pemanfaatan Aset, Kerjasama Penempatan Siswa Magang, Kerjasama Peningkatan Kapasitas Bahasa Asing yang melibatkan pengelola wisata, akademisi dari SMK dan perguruan tinggi Negeri/Swasta baik dari Kabupaten Majalengka maupun dari luar Kabupaten Majalengka. Dalam hal kerja sama ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan selaku pengguna barang, penyedia tempat PKL serta penyedia instruktur, tempat dan modul.

Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2024:

1. Meningkatkan kualitas media promosi dan informasi wisata melalui peningkatan publikasi informasi wisata dan fasilitasi pemasaran wisata.
2. Meningkatkan kualitas data wisata.
3. Membangun kerjasama dengan pelaku wisata dan akademisi.

Selain itu intervensi pemerintah melalui **program** berikut memengaruhi capaian jumlah kunjungan wisatawan.

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp230.092.000,00	Rp223.614.500,00
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp995.614.000,00	Rp993.793.000,00

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan pada sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata yaitu 0,67% atau sebesar Rp8.298.500,00 dari pagu anggaran Rp1.246.706.000,00 dengan realisasi Rp1.238.407.500,00.

MENINGKATNYA INVESTASI SEKTOR INDUSTRI



IKU : LAJU INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



CAPAIAN 2023
170%



FAKTOR

Yang Memengaruhi

- Meningkatnya penanaman modal
- Meningkatnya kualitas produk industri

- Program Pengendalian Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 6,3% atau Rp72.252.200,00.

TREN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

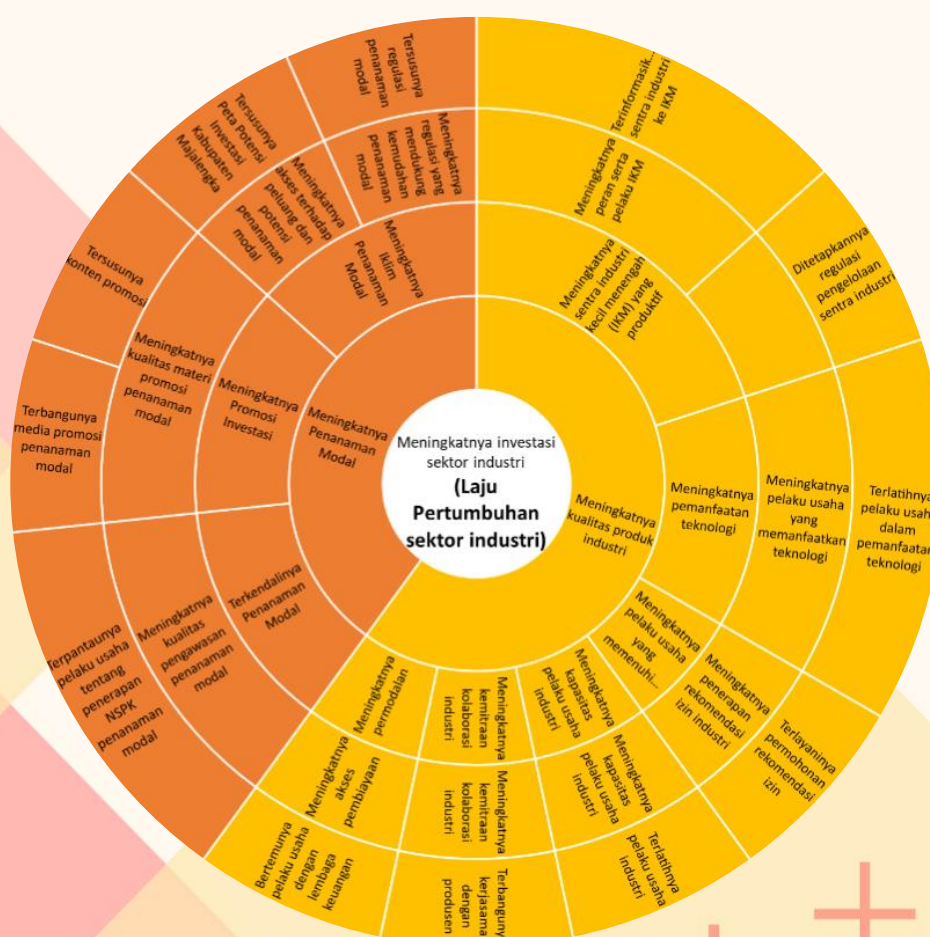


SASARAN 15:

MENINGKATNYA INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

Untuk meningkatkan investasi sektor industri digunakan indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri yang merupakan bagian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sektor industri menggambarkan sumbangan sektor industri terhadap total produksi ekonomi suatu wilayah atau negara. Peningkatan PDRB sektor industri dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor tersebut, sementara penurunan PDRB dapat menunjukkan perlambatan atau masalah dalam sektor industri.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Laju Pertumbuhan Sektor Industri

Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi laju pertumbuhan sektor industri pada Tahun 2023** sebesar 8,50 persen dari target 5,00 persen atau dapat diartikan capaiannya sebesar 170 persen dari target yang ditetapkan. Laju pertumbuhan sektor industri tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan **dibandingkan dengan tahun 2022**, pada saat itu laju pertumbuhan sektor industri menyentuh angka 13,30 persen, atau menurun sekitar 4,80%. Sedangkan untuk capaian Tahun 2023 mengalami penurunan 96% dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 266%.

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Realisasi Jawa Barat
5 %	8,50 %	170%	5%	4,74%

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun 2023 sudah melebihi target/harapan tahun ke-lima RPJMD yaitu mencapai 8,50%, atau selisih lebih tinggi sekitar 3,5%. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Majalengka 3,76 persen poin lebih cepat **dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Jawa Barat** sebesar 4,74 persen.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan indikator ini yaitu

1. Meningkatnya Penanaman Modal

Peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru yang sudah beroperasi di tahun 2023. Hal ini berimplikasi positif dengan semakin membaiknya kinerja sektor usaha industri pengolahan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan penanaman modal ada beberapa hal yang telah dilakukan di Tahun 2023, yaitu:

- Tersusunnya konten promosi investasi melalui website <https://dpmptsp.majalengkakab.go.id/> cetak spanduk, pamflet dan ikut serta dalam kegiatan pameran.
- Terlaksananya pengawasan terhadap para pelaku Usaha/perusahaan melalui kegiatan inspeksi lapangan ke perusahaan perusahaan untuk menyelesaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui pendampingan secara berkala.



- c. Terlaksananya pembinaan terhadap para pelaku Usaha/perusahaan melalui kegiatan Bimtek untuk meningkatkan nilai Realisasi Investasi

Adapun upaya yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain:

- a. Melakukan penyusunan regulasi penanaman modal yang memudahkan investor Pemetaan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Majalengka
- b. Melakukan promosi investasi melalui Pameran Investasi
- c. Melakukan Pembinaan terhadap para pelaku Usaha/perusahaan melalui kegiatan Bimtek untuk meningkatkan nilai Realisasi Investasi
- d. Melakukan Pengawasan terhadap para pelaku Usaha/perusahaan tentang penerapan NSPK penanaman modal melalui kegiatan inspeksi lapangan ke perusahaan perusahaan untuk menyelesaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui pendampingan secara berkala.

2. Meningkatnya Kualitas Produk Industri

Untuk meningkatkan kualitas produk industri Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 telah melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Bertemunya pelaku usaha dengan lembaga keuangan sebanyak 3x bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- b. Terbangunnya kerjasama dengan produsen melalui pelaksanaan pertemuan bekerjasama dengan retail Indomaret dan dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
- c. Terlatihnya pelaku usaha industri melalui beberapa kegiatan seperti :

1. Bimtek Kerajinan Bambu, Bimtek Kue Kering, Jasa Servis Komputer, pengolahan kopi, ikan, keripik buah, pastry, kerajinan bambu, pembuatan tas, kerajinan kain perca, roda 2, pengelasan, servis AC, keripik buah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.



2. Pelaksanaan Seminar Penumbuhan Wirausaha Baru dan Seminar Kewirausahaan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
3. Pelatihan Packaging bekerjasama dengan Indomaret.

4. Bimtek CNC (*Computer Numeric Control*) dan Bimtek Peningkatan Daya Saing IHT (Industri Hasil Tembakau) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 5. Sosialisasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
- d. Terlatihnya pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Hotel Fitra sebanyak 1x.



Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk industri pada tahun mendatang 2024 antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaku usaha
- b. Sosialisasi SIINas
- c. Memfasilitasi Industri Kecil Menengah
- d. Pendataan Industri Kecil Menengah
- e. Pelatihan Tembakau DBHCHT

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp354.700.000,00
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp663.330.000,00
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp129.492.000,00

Efisiensi atas capaian sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Industri dengan indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri sebesar 6,3% atau Rp72.252.200,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.147.522.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.075.269.800,00.

MENINGKATNYA EKONOMI PERDESAAN SESUAI POTENSI UNGGULAN DESA



IKU : Jumlah Desa Tematik

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022

18

Capaian 2022

100%



+8



+44,44%

CAPAIAN 2023

144,44%

TARGET

REALISASI

18

26

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Target RPJMD

18

Realisasi 2023 terhadap target RPJMD

144,44%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Rata-Rata Provinsi

Tidak dapat dibandingkan

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Terbangunnya Desa Wisata
- ☐ Terbangunnya Desa Kreatif

- ☐ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ☐ Program Peningkatan Daya Tarik Wisata

PROGRAM

Yang mendukung

EFISIENSI

Anggaran

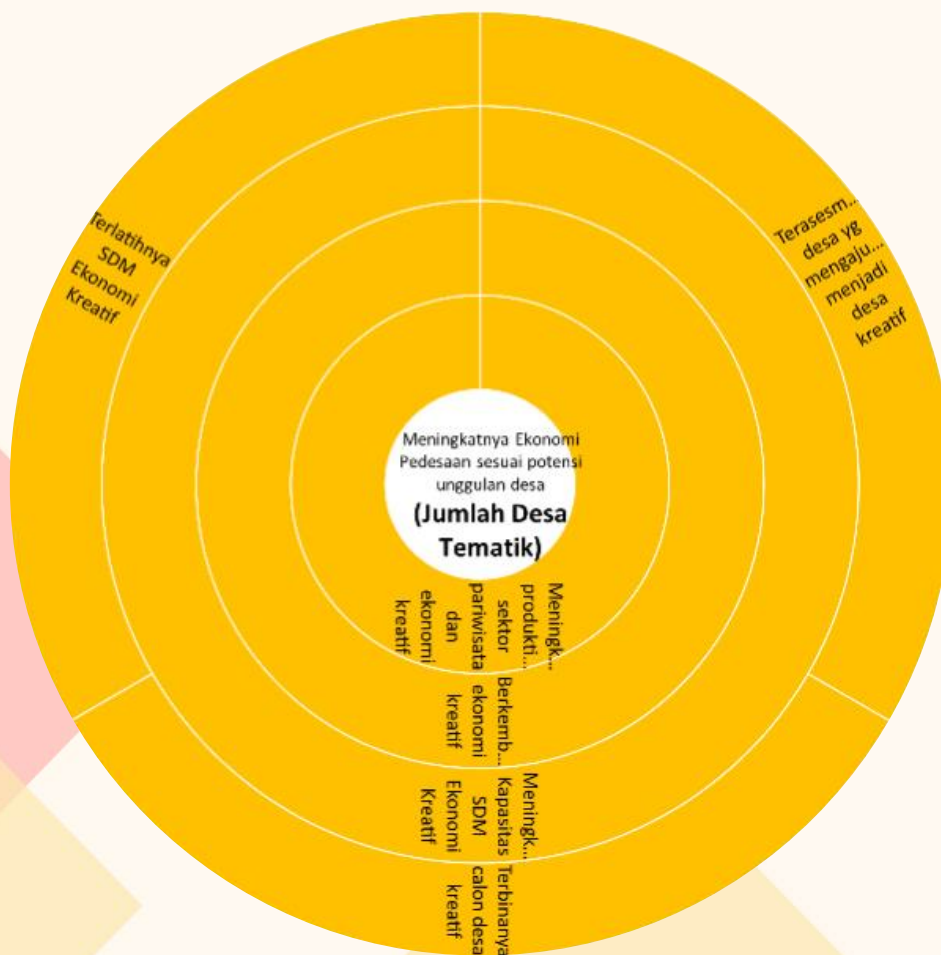
Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini yaitu 0,24% atau sebesar Rp202.500,00.

SASARAN 16:

MENINGKATNYA EKONOMI PERDESAAN SESUAI POTENSI

Sasaran ini diukur dengan Jumlah Desa Tematik. Desa tematik adalah desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu. Desa tematik di Kabupaten Majalengka terdiri dari desa wisata dan desa kreatif.

Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.



Jumlah Desa Tematik

Capaian indikator desa tematik pada Tahun 2023 yaitu mencapai 144,44 persen. Hal ini terlihat dari target Tahun 2023 sebanyak 18 desa dan terealisasi desa tematik sebanyak 26 desa.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun desa tematik baru sebanyak 18 desa dengan capaian 100%. Maka dapat diketahui capaian Tahun 2023 lebih tinggi 44,44% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Indikator ini **tidak bisa dibandingkan dengan indikator di Provinsi Jawa Barat**, dikarenakan desa tematik yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah desa wisata dan desa kreatif, sedangkan yang dibentuk oleh Provinsi Jawa Barat adalah desa digital.

Pemerintah Kabupaten Majalengka merancang agar pada Tahun 2023, akumulasi realisasi desa tematik selama Periode RPJMD 2019-2023 dapat terbentuk sebanyak 59 desa, dengan kondisi awal 33 desa tematik yang telah terbentuk pada Tahun 2019. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun kelima**, realisasi pada Tahun 2023 yang bertambah 26 desa sudah melebihi target pada tahun kelima RPJMD yaitu 18 desa. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD, realisasi Tahun 2023 telah mencapai kondisi akhir, dengan realisasi 59 desa.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)
18	26	18	18

Berikut **faktor-faktor** yang memengaruhi capaian indikator Jumlah Desa Tematik:

1. Terbentuknya Desa Wisata

Desa wisata yaitu desa yang memiliki keunikan daya tarik yang diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata. Jenis desa tematik tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi desa. Sehingga tujuan desa tematik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai potensi unggulannya dapat tercapai. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pembentukan desa wisata yaitu:

- Mengadakan pertemuan rutin dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting pengembangan kepariwisataan di daerahnya, namun kegiatan ini perlu ditingkatkan di tahun selanjutnya.
- Monitoring objek wisata Sawah Bengkok di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh.
- Monitoring desa wisata di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi.
- Survey potensi desa di Desa Muktisari, Kec. Cingambul.

- e. Survey potensi wisata di Desa Cimeong, Kec. Banjaran.
- f. Survey potensi desa wisata di Desa Jerukleut, Kec. Maja.
- g. Survey potensi wisata objek wisata Leciguas, Desa Cibunut, Kec. Maja.
- h. Survey potensi objek wisata Air Keramat Gunung Bitung, Desa Wangkelang, Kec. Cingambul.

Pada Tahun 2023 Desa Wisata Bantaragung masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 dan mendapatkan penghargaan Juara 2 kategori Digital dan Konten Kreatif. Desa Bantaragung merupakan salah satu desa di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang memiliki banyak destinasi wisata seperti Ciboer Pass, Curug Cipeuteuy, Batu Asahan, Buper Awilega dan Bukit Batu Semar.



Terkait dengan pembentukan desa wisata, upaya yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan dan pertemuan dengan kelompok sadar wisata.
- b. Mendorong desa untuk mengidentifikasi potensi unggulan di wilayah desa.
- c. Mengidentifikasi potensi wisata di desa-desa lainnya untuk dikembangkan menjadi rintisan desa wisata.
- d. Mengasesmen desa yang mengajukan menjadi desa wisata.

2. Terbentuknya Desa Kreatif

Desa Tematik Kreatif merupakan desa yang memanfaatkan potensi/keunggulan desa tersebut untuk dikelola secara bersama-sama oleh aktor ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan inovasi yang bersumber dari potensi/keunggulan desa tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pembentukan desa kreatif yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pelatihan pengembangan ekonomi kreatif bagi komunitas dan pelaku ekonomi kreatif se-kabupaten Majalengka.
- b. Kegiatan fasilitasi proses kreasi produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif melalui:
 1. Gelar produk ekonomi kreatif yang dilaksanakan di gedung Majalengka Creative Centre (MCC).
 2. Kegiatan *Folklore* (Festival Film Pendek) dalam rangka Hari Film Nasional Tahun 2023.
 3. Seleksi Peserta UDUNAN (Usaha Dukungan Keuangan) Tk. Kabupaten Majalengka.
 4. Gala Dinner *ASEAN Assessment Summer School* (EASS). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Majalengka, Wakil Bupati Majalengka, Kepala PD Kabupaten Majalengka, Komite Kreatif, JAFF, dan Perwakilan seniman dari berbagai macam Negara anggota ASEAN.
 5. Kegiatan *MAC Day*. Kegiatan *MAC Day* adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Minggu dan salah satunya adalah aktivasi Majalengka *Creative Center* (MCC).

Desa Wisata Putridalem masuk ke dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 dan termasuk salah satu Desa Tematik Kreatif di Kabupaten Majalengka. Desa Putridalem merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang memiliki pesona



Kampung Bambu Kaputren yang menyajikan kreatifitas kerajinan alat musik bambu, seni budaya dan workshop yang juga memberi kesempatan untuk belajar kerajinan bambu itu sendiri. Selain itu juga terdapat Kampung Gedong Gincu Bojong Roreng yang memiliki 20 ha kebun mangga serta menghasilkan produk produk olahan berbahan dasar mangga. Desa Putridalem di lewati Aliran Sungai Cimanuk dan Cipelang. Terdapat fasilitas penyeberangan tradisional yang diminati juga oleh wisatawan Mancanegara. Di Desa Putridalem terdapat juga Kumbung-kumbung jamur merang dan kawasan pertanian yang sedang

dikembangkan sebagai Agro Wisata. Memiliki Balai Budaya, GOR dan Balai Pertemuan yang disewakan dengan tarif dan paket menarik.

Intervensi **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp30.000.000,00
2.	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp54.500.000,00

Efisiensi atas capaian sasaran Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa dengan indikator Jumlah Desa Tematik sebesar 0,24% atau Rp202.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp84.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 84.297.500,00.

MENINGKATNYA STATUS KEMAJUAN KEMANDIRIAN DESA



IKU : JUMLAH DESA YANG MENINGKAT STATUS PERKEMBANGANNYA

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD



PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI



FAKTOR Yang Memengaruhi

- Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Prasarana Desa
- Meningkatnya Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa
- Meningkatnya Kualitas Pembinaan Desa

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM Yang Mendukung

EFISIENSI Anggaran

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini sebesar 9,10% atau Rp1.950.207.463,00.

TREN JUMLAH DESA YANG MENINGKAT STATUS PERKEMBANGANNYA



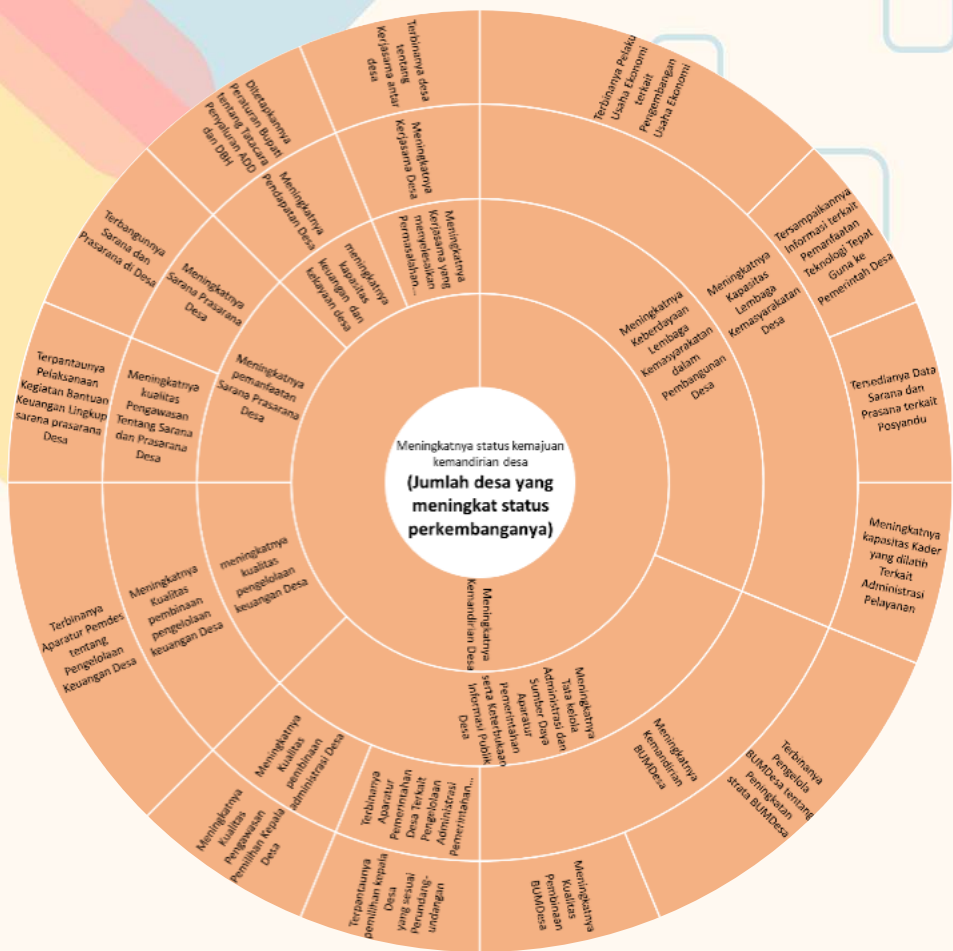
SASARAN 17:

MENINGKATNYA STATUS KEMAJUAN KEMANDIRIAN DESA

Sasaran ini diukur dengan Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya. Desa yang meningkat status perkembangannya ini mencakup peningkatan status Desa dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang, mandiri atau maju yang setiap tahun dihitung perkembangannya melalui Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Komponen penghitungan Indeks Desa Membangun ini terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun diperoleh dari hasil data Potensi Desa Badan Pusat Statistik (BPS) dan melalui Survei Desa Membangun berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala dan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya

Capaian Kinerja untuk indikator Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya **pada Tahun 2023** telah melebihi target yaitu sebesar 264% dengan realisasi 66 desa dari target 25 desa.

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
25	66	264%

Jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan 18 desa dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Akan tetapi, capaian Tahun 2023 lebih tinggi 59,2% dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka menargetkan 41 desa, sedangkan pada Tahun 2023 menargetkan 25 desa yang berkembang statusnya.

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Capaian 2023	Capaian 2022	Target RPJMD
66	84	264%	204,8%	25

Jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, realisasi desa yang meningkat statusnya pada Tahun 2023 sudah melebihi target sebanyak 41 desa dari target RPJMD sebanyak 25 desa.

Indikator ini hanya dipakai di Kabupaten Majalengka sehingga tidak bisa **dibandingkan dengan indikator di tingkat Provinsi atau Nasional**.

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian indikator ini yaitu:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Prasarana Desa

Keberadaan sarana dan prasarana di lingkungan desa menjadi suatu hal yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai keuntungan dapat dirasakan apabila masyarakat mampu memanfaatkan sarana prasarana desa dengan baik. Terkait dengan hal ini, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) yang dilaksanakan di 62 desa berupa perkerasan jalan, pembukaan jalan baru, drainase dan pengecoran jalan.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu:

- Meningkatkan sarana prasarana desa melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sarana Prasarana Desa, menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa terkait bantuan keuangan sarana dan prasarana desa serta membangun sarana prasarana di desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tentang sarana dan prasarana desa melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan lingkup sarana prasarana desa.

2. Meningkatnya Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa

Kerjasama antara TNI dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi salah satu upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah perdesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menjadi wadah dalam mempererat kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat desa sehingga dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Pada Tahun 2023 pelaksanaan kerjasama tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih (Komando Distrik Militer 0617 Majalengka).
- Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Desa Jatiserang Kec. Panyingkiran (Komando Distrik Militer 0617 Majalengka).
- TNI Bhakti Desa Mandiri (TBDM) di Desa Werasari Kec. Malausma (Batalyon Infanteri Raider 321 Galuh Taruna Majalengka).

- TNI Bhakti Desa Sehat (TBDS) di Desa Palasah Kec. Palasah (Pangkalan TNI AU Sugiri Sukani).
- TNI Manunggal Sindang Kasih (TMSK) di Desa Banyusari Kec. Malausma dan desa Kagok Kec. Banjaran (Komando Distrik Militer 0617 Majalengka).

Adapun beberapa hal yang dapat dilaksanakan di Tahun 2024, yaitu pembinaan desa tentang kerja sama antar desa serta pemantauan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota.

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang diawali dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan:

- Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur perdesaan melalui fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa di 330 desa.
- Pembinaan dan bimbingan teknis pembuatan laporan keuangan desa dan aparatur pengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) di 330 desa.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur desa melalui pembinaan peningkatan kapasitas 160 orang aparatur pemerintah desa.
- Pelatihan tata kelola BUMDes kepada pengelola BUMDes.

4. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di 343 desa/kelurahan.

Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa ini dapat dilaksanakan lagi di Tahun 2024 melalui pembinaan administrasi pelayanan, pembinaan pelaku usaha ekonomi terkait pengembangan usaha ekonomi, penyampaian informasi terkait pemanfaatan teknologi tepat guna ke Pemerintahan Desa, Giat Bulan Bhakti Gotong Royong serta penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

5. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Desa

Pembinaan desa oleh Pemerintah Kecamatan perlu dilakukan. Hal ini bermanfaat untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Pembinaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
- Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 330 desa yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
- Melaksanakan penilaian dan pemeringkatan desa (lomba desa) untuk mengevaluasi perkembangan desa di segala bidang.

Adapun yang akan dilaksanakan di Tahun 2024, yaitu membina desa tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, membina desa melalui lomba desa, membina perangkat desa tentang bidang pemerintahan, membina kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB.

Selain itu intervensi **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp1.119.600.000,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp4.827.817.900,00
3.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan	Rp12.700.000.000,00

		Masyarakat dan Desa	
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp3.149.999.900,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	Rp3.997.074.100,00

Untuk pencapaian target kinerja indikator Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp21.436.845.472,00 dan terserap sebesar Rp19.486.638.009,00 sehingga terdapat **efisiensi** sebesar 9,10% atau sebesar Rp 1.950.207.463,00.



Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama	Persentase rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah	100	91,7
2.	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	96,49	90,27
3.	Pengurangan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	92,51	98,04
4.	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	112,18	97,29
5.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat	104,6	95,58
6.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	97,13	98,01
7.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK RI	100	98,29
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	98,11
9.	Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	145,54	92,65



10.	Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pengetahuan	99,46	98,10
11.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	96,38	93,26
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	99,38	99,20
13.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Laju peningkatan PDRB sektor pertanian	178	95,99
14.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	105,05	99,33
15.	Meningkatnya investasi sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri	170	93,7
16.	Meningkatnya ekonomi perdesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	144,44	99,76
17.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	264	90,9

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD yaitu sebesar 123,83%. Dari 17 IKU, sebanyak 11 IKU tercapai dengan rincian dua IKU mencapai 100% dan delapan IKU mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kolaborasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas.

Ada pula enam sasaran strategis RPJMD yang belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang diantaranya (1) sasaran menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, akses sanitasi dan air bersih, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, kesempatan mendapatkan barang-barang pokok yang terjangkau serta kesempatan mendapatkan infrastruktur yang baik. (2) Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, mengurangi kantong kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. (3) Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (4) Sasaran meningkatnya mutu pendidikan, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan mutu pembelajaran melalui penambahan jumlah bimtek bagi pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan akses pendidikan serta meningkatkan kualitas lingkungan belajar. (5) Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan, memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya deteksi dini, memenuhi Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menguatkan jejaring rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. (6) Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, upaya yang dapat

dilakukan yaitu pembangunan sarana dan prasarana air limbah yang mencakup lebih banyak Kepala Keluarga serta meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Rata-rata efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 4,25% atau Rp1.733.626.610,00.

Pemerintah Kabupaten majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan 1 : Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	
1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	5
	Tujuan 2.1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	1. Indeks Gini 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Stunting	
2.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	0,330
3.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,37
4.	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,50
	Tujuan 2.2 : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	
5.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	10
	Tujuan 3 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	
6.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB
7.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK RI	WTP
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
9.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61
		Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemempnan RB	N/A
	Tujuan 4 : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	
10.	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pengetahuan	59,44
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,54
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	70,12
13.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	N/A
		Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	1,0
14.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.000.000
15.	Meningkatnya Investasi sektor Industri	Jumlah industri baru	N/A
		Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5
16.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	18



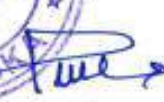
	Tujuan 5 : Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	
17.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	25

No.	Program	Jumlah Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,373,184,830,775.00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	547,799,291,370.00	APBD
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	153,948,451,368.00	APBD
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	49,236,879,110.00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan		APBD
6	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8,967,569,953.00	APBD
7	Program Pemberdayaan Sosial	1,161,502,000.00	APBD
8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	280,923,700.00	APBD
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		APBD
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	75,000,000.00	APBD
11	Program Pendaftaran Penduduk	15,200,000.00	APBD
12	Program Penataan Desa	12,700,000,000.00	APBD
13	Program Pengendalian Penduduk	542,400,000.00	APBD
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22,153,531,555.00	APBD
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	696,820,000.00	APBD
16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		APBD
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	604,999,800.00	APBD
18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	48,000,000.00	APBD
19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	24,000,000.00	APBD
20	Program Pengembangan Kebudayaan	1,175,614,000.00	APBD
21	Program Pembinaan Perpustakaan	1,081,147,000.00	APBD
22	Program Pengelolaan Arsip	114,263,000.00	APBD
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	51,000,000.00	APBD
24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,102,425,212.00	APBD
25	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	129,492,000.00	APBD
26	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13,932,334,784.00	APBD
27	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	25,008,836,739.00	APBD
28	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		APBD
29	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,215,189,700.00	APBD
30	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	480,173,718,989.00	APBD
31	Program Kepegawain Daerah	3,728,556,700.00	APBD
32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,944,151,800.00	APBD
33	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	430,994,600.00	APBD
34	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,360,332,600.00	APBD
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,293,823,300.00	APBD
36	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,114,400,000.00	APBD

37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,925,571,800.00	APBD
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16,622,468,000.00	APBD
39	Program Kawasan Permukiman	467,320,000.00	APBD
40	Program Penanggulangan Bencana	1,908,964,000.00	APBD
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		APBD
42	Program Perlindungan Perempuan	75,000,000.00	APBD
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	147,500,000.00	APBD
44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,732,860,000.00	APBD
45	Program Pencatatan Sipil	14,200,000.00	APBD
46	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	3,149,999,900.00	APBD
47	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12,636,115,000.00	APBD
48	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	454,912,000.00	APBD
49	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		APBD
50	Program Promosi Penanaman Modal		APBD
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16,282,533,400.00	APBD
52	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	36,592,500.00	APBD
53	Program Pemasaran Pariwisata	230,092,000.00	APBD
54	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22,269,220,400.00	APBD
55	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	640,992,500.00	APBD
56	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4,404,541,947.00	APBD
57	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,116,422,400.00	APBD
58	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,452,000,000.00	APBD
59	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	848,432,800.00	APBD
60	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7,028,408,300.00	APBD
61	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	42,786,803,000.00	APBD
62	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	454,736,000.00	APBD
63	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	7,877,940,000.00	APBD
64	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,137,198,000.00	APBD
65	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	738,972,888.00	APBD
66	Program Rehabilitasi Sosial	1,145,164,000.00	APBD
67	Program Penempatan Tenaga Kerja	34,600,375,759.00	APBD
68	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	721,112,300.00	APBD
69	Program Penanganan Kerawanan Pangan	38,000,000.00	APBD
70	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,836,134,93.00	APBD
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26,400,000.00	APBD
72	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,827,817,900.00	APBD
73	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6,717,000,000.00	APBD
74	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	34,032,700.00	APBD
75	Program Pelayanan Penanaman Modal	633,360,000.00	APBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000.00	APBD

77	Program Pembinaan Sejarah	42,000,000.00	APBD
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	217,192,400.00	APBD
79	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		APBD
80	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	301,150,000.00	APBD
81	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	187,756,000.00	APBD
82	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	105,000,000.00	APBD
83	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,426,751,931.00	APBD
84	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	247,460,400.00	APBD
85	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29,000,000.00	APBD
86	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,415,454,000.00	APBD
87	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,383,100,000.00	APBD
88	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	585,039,800.00	APBD
89	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	982,171,700.00	APBD
90	Program Hubungan Industrial	60,707,600.00	APBD
91	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	9,733,879,714.00	APBD
92	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	275,200,000.00	APBD
93	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	17,700,000.00	APBD
94	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,119,600,000.00	APBD
95	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	136,000,000.00	APBD
96	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	354,700,000.00	APBD
97	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		APBD
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	54,500,000.00	APBD
99	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45,000,000.00	APBD
100	Program Pengembangan Ekspor	675,228,000.00	APBD
101	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,625,444,200.00	APBD
102	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	83,925,000.00	APBD
103	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	550,000,000.00	
104	Program Penanganan Bencana	1,035,852,000.00	APBD
105	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50,000,000.00	APBD
106	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		APBD
107	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	115,675,000.00	APBD
108	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		APBD
109	Program Pengelolaan Permuseuman		APBD
110	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	86,280,000.00	APBD
111	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	245,924,000.00	APBD
112	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,997,074,100.00	APBD

113	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	271,910,000.00	APBD
114	Program Pengembangan Permukiman	15,218,656,000.00	APBD
115	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90,132,300.00	APBD
116	Program Perlindungan Khusus Anak	75,000,000.00	APBD
117	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	324,477,900.00	APBD
118	Program Penyuluhan Pertanian	1,295,480,000.00	APBD
119	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	79,092,000.00	APBD
120	Program Penataan Bangunan Gedung	601,162,500.00	APBD
121	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99,567,000.00	APBD
122	Program Pengembangan UMKM		APBD
123	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1,366,593,500.00	APBD
124	Program Penyelenggaraan Jalan	166,920,261,170.00	APBD
125	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50,000,000.00	APBD
126	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	492,077,100.00	APBD
127	Program Pengelolaan Persampahan	6,545,361,000.00	APBD
128	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	520,000,000.00	APBD
		3,136,799,410,802.00	

Majalengka, Nopember 2023
BUPATI MAJALENGKA

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP PEMKAB MAJALENGKA TAHUN 2023 KEPADA KEPALA DAERAH

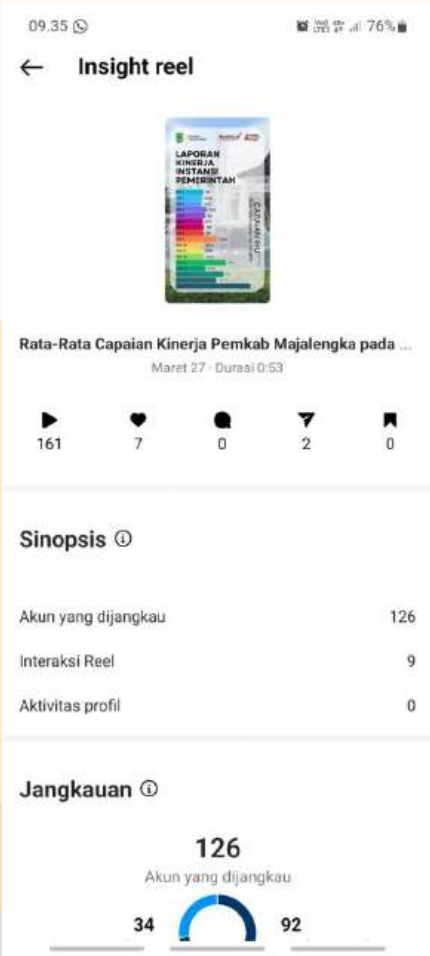


PUBLIKASI LKIP PEMKAB MAJALENGKA TAHUN 2023

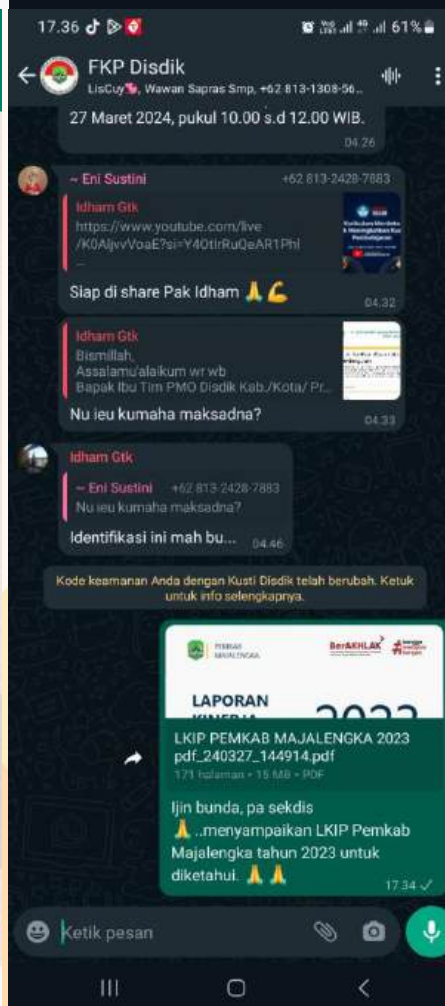
Publikasi LKIP melalui aplikasi Klik ASN yang merupakan aplikasi absensi seluruh ASN di Kabupaten Majalengka

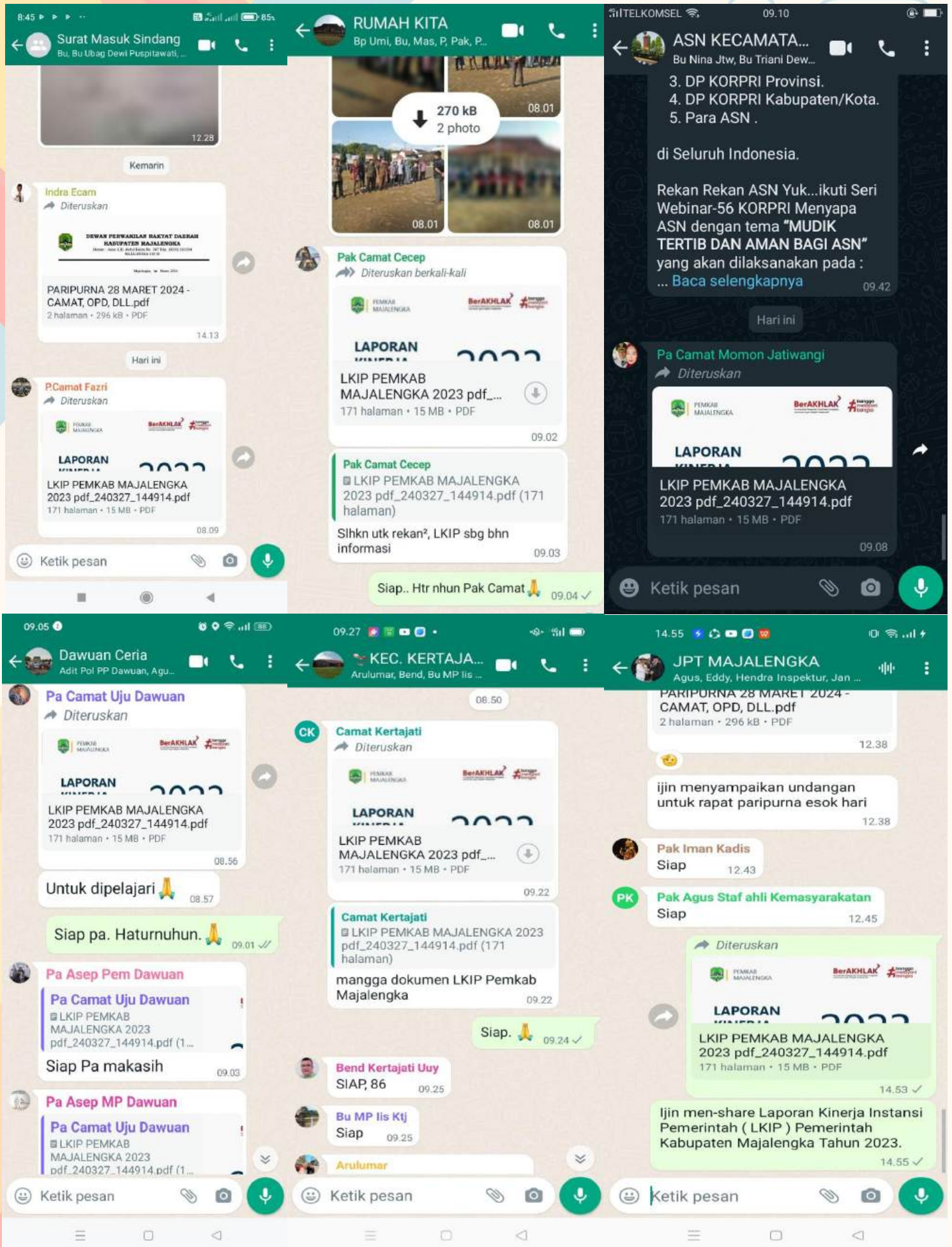


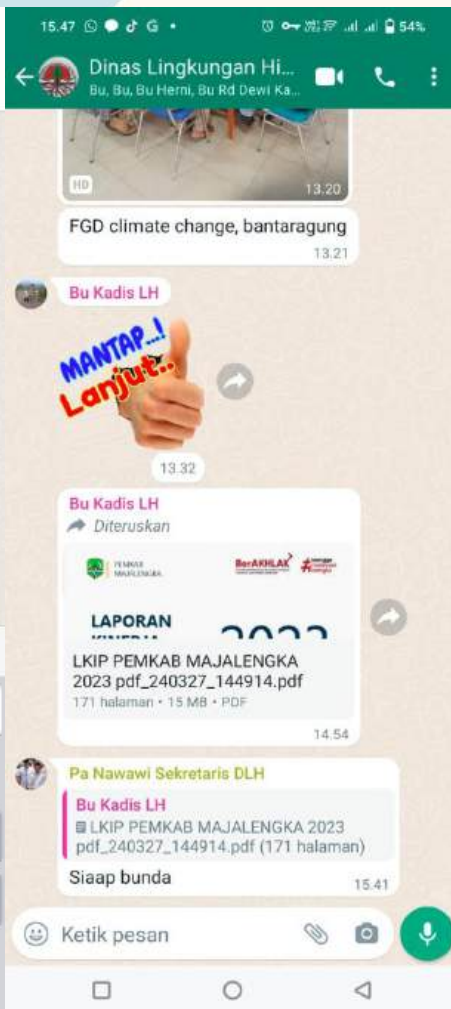
Publikasi LKIP melalui media sosial instagram @bagianorganisasi.majalengka yang dapat dilihat oleh masyarakat

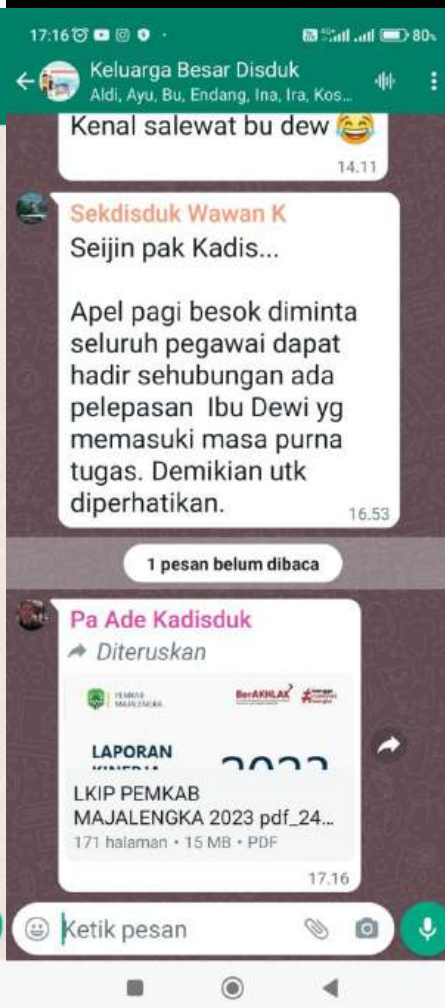
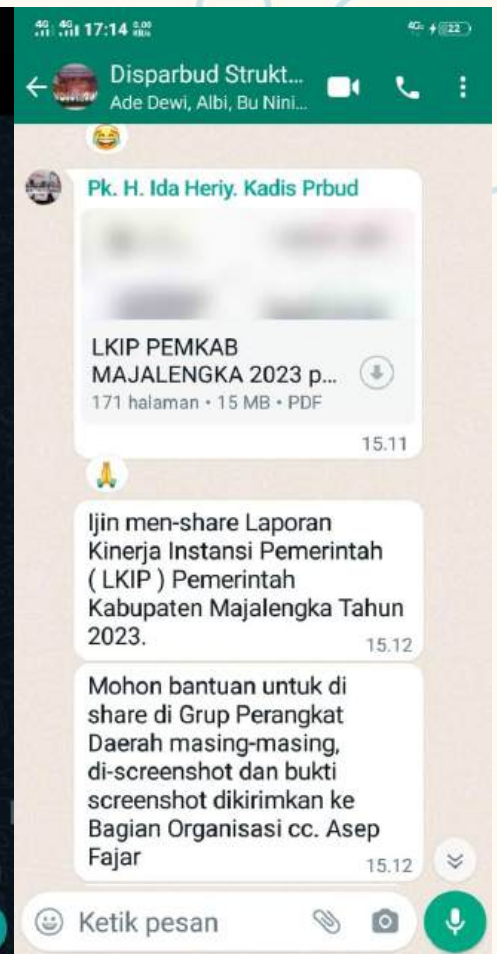
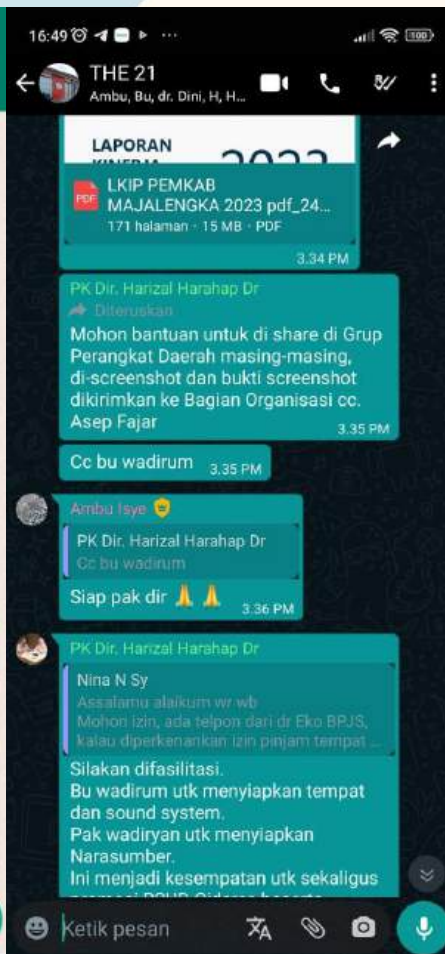


BUKTI PENYEBARAN LKIP PEMKAB MAJALENGKA TAHUN 2023 KEPADA PERANGKAT DAERAH









PRESTASI



